



PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2023

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2023**



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas plafon anggaran sementara untuk penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Denpasar tahun 2023, perlu menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
20. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

RKPD disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Berkenaan

BAB III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI : Penutup

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Juli 2023

WALIKOTA DENPASAR,


I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA DENPASAR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha-Nya, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Denpasar Tahun 2023.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 telah berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Sehingga penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif didalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, serta akan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan/penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Harapan kami, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana 2023 ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan mendesak untuk segera dapat diatasi.

Kami menyadari bahwa Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak.



WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR GAMBAR.....	VI
DAFTAR TABEL	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN.....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-1
2.2. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kota Denpasar tahun 2022.....	II-2
2.2.1. Keselarasan Program RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan RKPD Tahun 2022.....	II-9
2.2.2. Keselarasan Program RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022.....	II-39
2.3. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan RKPD Tahun 2022	II-42
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan 2021.....	III-1
3.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2023 dan 2024	III-10
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-12
3.2.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-14
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-17
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-20
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023.....	IV-3
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV-3
4.2.2. Paradigma Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023	IV-5
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023.....	IV-8

4.2.4. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023	IV-9
4.3. Sasaran Pembangunan Daerah	IV-12
4.4. Kebijakan Pembiayaan Alternatif Daerah	IV-20
4.5. Kebijakan Daerah dalam Penanganan Dampak Pasca Pandemi COVID-19 ...	IV-21
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023	V-1
5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	V-1
5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	V-2
5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	V-5
5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	V-6
5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	V-6
5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	V-7
5.1.7. Unsur Kewilayahan	V-8
5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum.....	V-8
5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2023.....	V-10
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
Gambar 2.1	Capaian Keuangan Per Perangkat Daerah APBD 2022.....	II-5
Gambar 2.2	Capaian Realisasi Fisik Per Perangkat Daerah APBD 2022	II-5
Gambar 2.3	Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2022 dengan Program RPJMD Tahun 2022	II-10
Gambar 2.4	Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2022 dengan Program APBD Tahun 2022.....	II-39
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2018 – 2022....	III-2
Gambar 3.2	aju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2017-2022.....	III-6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Skala Kategori Capaian	II-3
Tabel 2.2	Tabel Rekap Jumlah PD per katagori	II-4
Tabel 2.3	Rekap Capaian Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II	II-6
Tabel 2.4	Keselarasn Program RPJMD dan RKPD	II-12
Tabel 2.5	Perbandingan Jumlah Program – Kegiatan – Subkegiatan antara RKPD dengan APBD 2022	II-40
Tabel 2.6	Kendala, Solusi dan Catatan Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 oleh Perangkat Daerah	II-42
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010.....	III-3
Tabel 3.2	Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022...	III-6
Tabel 3.3	Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022	III-7
Tabel 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022	III-8
Tabel 3.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022	III-9
Tabel 3.6	Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022	III-10
Tabel 3.7	Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2023	III-12
Tabel 3.8	Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2023	III-16
Tabel 3.9	Proyeksi/Target Belanja Kota Denpasar Tahun 2023.....	III-20
Tabel 3.10	Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2023.....	III-21
Tabel 4.1	Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-2
Tabel 4.2	Keselarasn Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023	IV-9
Tabel 4.3	Keselarasn Prioritas Pembangunan Nasional dan Kota Denpasar Tahun 2023.....	IV-10
Tabel 4.4	Keselarasn Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023	IV-11
Tabel 4.5	Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran serta Target Capaian Tahun 2023.....	IV-12
Tabel 4.6	Program Prioritas Kota Denpasar Tahun 2023	IV-14
Tabel 5.1	Perubahan Plafon Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan	V-8
Tabel 5.2	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023	V-11

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD daerah pada tahun yang direncanakan.

Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah. Perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan. Penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perubahan

RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan RKPD berkenaan ; dan atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

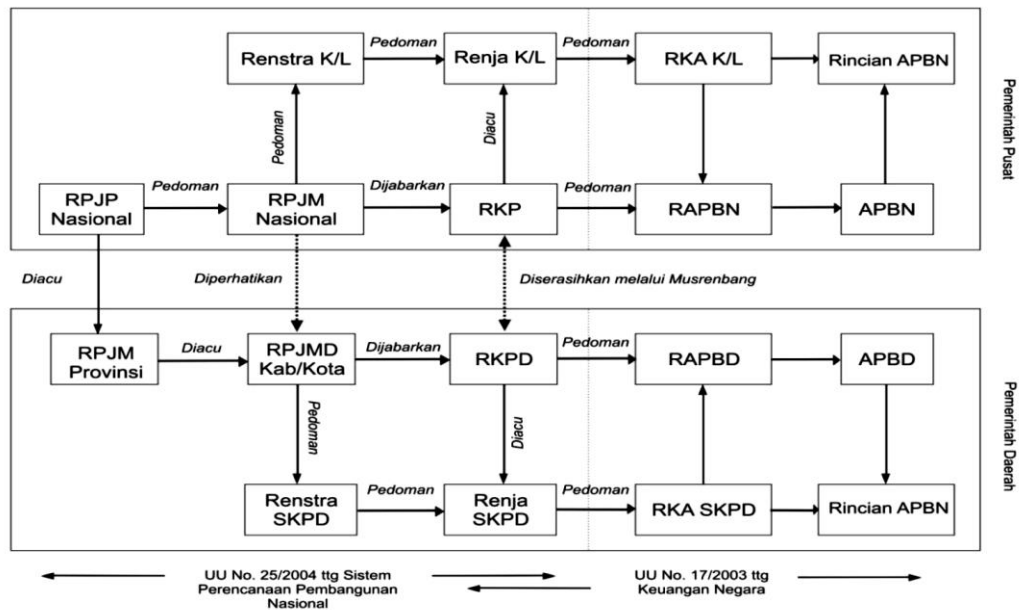
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
20. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 22);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima (5) tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ketahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu (1) tahun dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Adapun hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.1
Hubungan RKPd dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPd Semesta Berencana Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPd tahun 2023 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 antara DPRD Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2023;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan

Menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan.

3. Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi sampai dengan tahun berjalan serta perubahan kerangka keuangan daerah.

4. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada tahun berjalan

5. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Dalam Bab ini disajikan rencana perubahan program dan kegiatan beserta perubahan target kinerja serta rencana pendanaan

6. Penutup

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dengan RPJMD.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah, maka Pelaksanaan RKPD Kota Denpasar tahun 2023 diwajibkan untuk dievaluasi oleh Kepala Daerah melalui Bappeda Kota Denpasar. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Denpasar dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD, digunakan untuk mengetahui :

- 1) Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023,
- 2) Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023,
- 3) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program /kegiatan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan RKPD tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, disusun dengan maksud:

- a. Untuk mengetahui apakah Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD.
- b. Untuk mengetahui apakah Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD telah sesuai dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD.
- c. Untuk mengetahui apakah program dan kegiatan, target dan dana dalam APBD mengacu pada RKPD.
- d. Untuk mengetahui sejauh mana capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan RKPD
- e. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan; dan
- f. Untuk meningkatkan kinerja RKPD di tahun-tahun berikutnya.

Tujuan Evaluasi Hasil RKPD Kota Denpasar tahun 2023 adalah: untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

2.2. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kota Denpasar tahun 2023

Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Paragraf 2 Pasal 280 s.d Pasal 295).

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah terjadi dua kali pergeseran APBD. Pergeseran tersebut dilakukan terkait pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD. Juga terkait pergeseran anggaran di Dinas Kesehatan dalam rangka akreditasi puskesmas. Pada T.A. 2023 terdapat pergeseran yang menyebabkan Perubahan APBD Kota Denpasar

yaitu Pergeseran antar Sub Kegiatan yang sumber dananya DAK Fisik, dan penambahan belanja modal yang sumber dananya DAK Non Fisik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga hal tersebut berdasarkan terbitnya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.14.3/1483/SJ, tanggal 10 Maret 2023 perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT T.A. 2023, DBH DR TA 2023 dan DAK TA 2023 sehingga terdapat mapping baru terkait hal tersebut. Serta terdapat pergeseran belanja modal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Dikpora mengajukan perubahan belanja modal mengingat adanya penggabungan SDN 14 Sesean dengan SDN 9 Sesean yang ditetapkan dengan SK Walikota Nomor 188.45/2831/HK/2022 sehingga belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan pembangunan tembok penyengker SDN 14 Sesean dialihkan menjadi SDN 3 Panjer dikarenakan rusak berat dan berdampak pada keselamatan peserta didik. Serta pergeseran antar SKPD dari BPKAD yaitu pada Belanja Tak Terduga digeser ke Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Utara, dan Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar untuk penanganan inflasi di Kota Denpasar.

Hasil Pelaksanaan Program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori pencapaian kinerja. Dalam pengkategorian capaian, digunakan skala terhadap nilai capaian untuk memudahkan penggambaran atau pengelompokan dari masing-masing capaian. Kategori yang digunakan adalah

Tabel 2.1
Tabel Skala Kategori Capaian

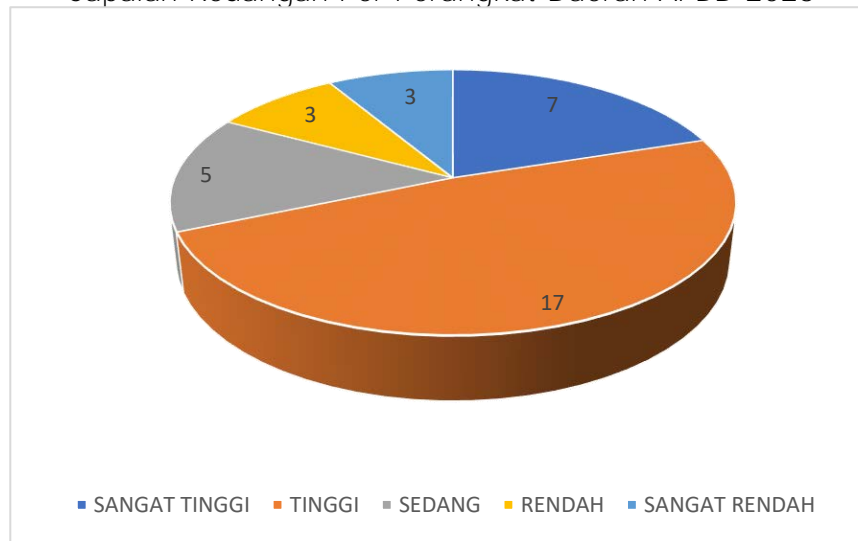
No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi (T)
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang (S)
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah (R)
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah (SR)

Interval Nilai Realisasi Kinerja diatas digunakan untuk menilai realisasi dalam periode satu tahun Renja. Dalam hal monitoring realisasi sampai semester pertama atau triwulan kedua kriteria diatas perlu disesuaikan mengingat dalam jangka waktu baru berjalan 50% sehingga program, kegiatan yang tertuang dalam renja perangkat daerah masih dalam proses pengerjaan. Mengingat jangka waktu baru berjalan setengahnya maka penyesuaian interval nilai realisasi Kinerja dan kriteria penilaian realisasi Kinerja dilakukan dengan asumsi setengah dari interval tahunan. Dengan menggunakan penyesuaian Skala Kategori Capaian diatas dapat digambarkan capaian baik fisik dan keuangan masing-masing perangkat daerah sampai dengan triwulan II 2023.

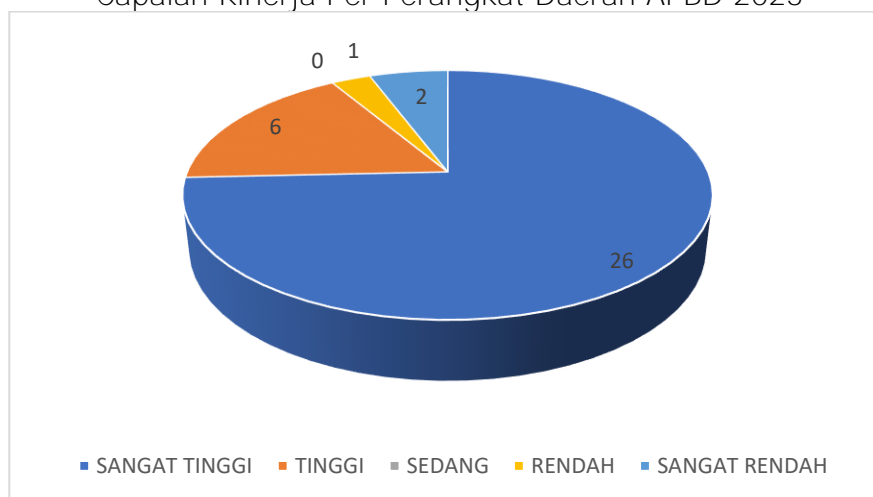
Tabel 2.2
Tabel Rekap Jumlah PD per katagori

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria	Kinerja		Keuangan	
			Jumlah Perangkat Daerah	%	Jumlah Perangkat Daerah	%
1	45% <	Sangat Tinggi	12	34%	8	23%
2	37,5% ≤ 45%	Tinggi	8	23%	13	37%
3	32,5% ≤ 37,5%	Sedang	9	26%	11	31%
4	25% ≤ 32,5%	Rendah	6	17%	3	9%
5	≤ 25%	Sangat Rendah	0	0%	0	0%
Jumlah			35	100	35	100

Gambar 2.1
Capaian Keuangan Per Perangkat Daerah APBD 2023



Gambar 2.2
Capaian Kinerja Per Perangkat Daerah APBD 2023



Dari capaian per perangkat daerah sampai dengan triwulan II dengan katagori capaian merujuk katagori capaian sesuai tabel 2.2 menunjukkan bahwa capaian kinerja di triwulan II sebagian besar dalam katagori sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan data capaian keuangan dimana sebagian besar berada pada katagori tinggi maka melalui data diatas tergambar bahwa pekerjaan fisik telah berjalan dan diikuti dengan realisasi anggarannya. Kedepan hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar serapan anggaran bisa lebih cepat.

Data Detail capaian kinerja dan realisasi keuangan per perangkat daerah disampaikan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Rekap Capaian Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

No.	Urusan/ Unsur/ Bidang Urusan	PAGU Keuangan Rp	TARGET	REALISASI			Predikat Tingkat Capaian Renja / RKPD	
			Keuangan	Kinerja	Keuangan			
			Rp		Rp	Rp.	%	Kinerja
1	2	3	4	5	6	700%	8	9
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	650.848.100.851	392.259.322.598	31,33%	198.053.411.907,00	30,43%	RENDAH	RENDAH
2	DINAS KESEHATAN	366.591.461.836	190.980.614.625	52,93%	155.436.245.851,47	42,40%	SANGAT TINGGI	TINGGI
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	169.799.731.601	53.056.372.529	41,70%	26.146.365.125,00	15,40%	TINGGI	SANGAT RENDAH
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	62.127.444.080	46.287.328.269	70,27%	37.673.103.667,00	60,64%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	23.210.436.157	11.442.364.865	47,93%	10.066.267.182,00	43,37%	SANGAT TINGGI	TINGGI
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25.121.800.993	17.118.131.167	52,77%	9.578.618.677,00	38,13%	SANGAT TINGGI	TINGGI
7	DINAS SOSIAL	14.776.639.832	7.659.578.373	48,61%	5.319.696.495,00	36,00%	SANGAT TINGGI	SEDANG
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
8	DINAS KEBUDAYAAN	39.797.552.683	22.036.909.812	50,57%	18.649.963.213,00	46,86%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
9	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	10.648.338.594	5.460.899.903	47,37%	4.064.118.436,00	38,17%	SANGAT TINGGI	TINGGI
10	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	10.757.330.487	5.768.541.653	50,84%	4.783.720.933,00	44,47%	SANGAT TINGGI	TINGGI
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	149.282.147.606	60.486.023.057	39,24%	47.021.053.789,00	31,50%	TINGGI	RENDAH
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.866.524.892	9.063.329.647	44,58%	6.589.795.302,00	44,33%	TINGGI	TINGGI
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.344.257.094	5.241.395.920	50,74%	4.091.385.845,00	43,79%	SANGAT TINGGI	TINGGI

No.	Urusan/ Unsur/ Bidang Urusan	PAGU Keuangan Rp	TARGET	REALISASI			Predikat Tingkat Capaian Renja / RKPD	
			Keuangan	Kinerja	Keuangan			
			Rp		Rp	Rp.	%	Kinerja
1	2	3	4	5	6	700%	8	9
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.930.874.274	11.217.652.119	56,35%	6.375.914.884,00	31,99%	SANGAT TINGGI	RENDAH
15	DINAS PERHUBUNGAN	59.234.377.824	34.205.987.451	48,81%	26.682.498.829,00	45,05%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	13.737.202.434	7.387.722.654	53,54%	4.567.279.205,00	33,25%	SANGAT TINGGI	SEDANG
17	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	7.898.256.690	4.356.435.253	50,64%	3.532.764.997,00	44,73%	SANGAT TINGGI	TINGGI
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24.695.066.374	11.447.910.601	44,57%	9.156.119.495,00	37,08%	TINGGI	SEDANG
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.970.973.630	5.504.680.539	46,44%	4.639.065.140,00	42,28%	SANGAT TINGGI	TINGGI
URUSAN PILIHAN								
20	DINAS PARIWISATA	19.502.435.785	9.885.902.930	57,32%	7.250.153.201,00	37,18%	SANGAT TINGGI	SEDANG
21	DINAS PERTANIAN	18.061.224.333	9.232.478.365	46,85%	7.579.204.961,00	41,96%	SANGAT TINGGI	TINGGI
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.210.939.812	8.122.311.972	49,64%	7.018.333.234,00	46,14%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
23	SEKRETARIAT DAERAH	86.440.438.031	46.685.080.835	53,76%	35.434.142.984,00	40,99%	SANGAT TINGGI	TINGGI
24	SEKRETARIAT DPRD	93.442.368.686	50.051.463.891	42,38%	33.227.526.083,00	35,56%	TINGGI	SEDANG
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.580.612.320	5.485.655.171	47,71%	4.954.728.335,00	42,78%	SANGAT TINGGI	TINGGI
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	49.494.092.654	11.776.682.935	23,10%	10.588.436.331,00	21,39%	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	220.234.073.350	156.919.260.827	60,41%	122.969.389.394,00	55,84%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI

No.	Urusan/ Unsur/ Bidang Urusan	PAGU Keuangan Rp	TARGET	REALISASI			Predikat Tingkat Capaian Renja / RKPD	
			Keuangan	Kinerja	Keuangan			
			Rp		Rp.	%	Kinerja	Keuangan
1	2	3	4	5	6	700%	8	9
28	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.465.420.282	4.245.312.738	49,42%	3.615.439.751,00	42,71%	SANGAT TINGGI	TINGGI
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.880.903.427	6.877.074.876	48,74%	8.733.867.633,00	51,74%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
30	INSPEKTORAT DAERAH	22.159.529.137	12.330.526.181	48,71%	8.996.980.798,00	40,60%	SANGAT TINGGI	TINGGI
UNSUR KEWILAYAHAN								
31	KECAMATAN DENPASAR UTARA	18.610.343.675	10.200.499.687	44,36%	8.249.262.047,00	44,33%	TINGGI	TINGGI
32	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	19.483.845.265	10.524.663.111	45,32%	8.465.444.615,00	43,45%	SANGAT TINGGI	TINGGI
33	KECAMATAN DENPASAR BARAT	18.451.109.044	11.265.924.265	50,79%	8.508.969.447,00	46,12%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
34	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	27.479.959.042	15.179.430.770	50,57%	11.175.410.676,00	40,67%	SANGAT TINGGI	TINGGI
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.375.899.655	8.370.875.666	18,77%	5.700.053.867,00	18,77%	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
TOTAL		2.359.511.712.430	1.278.134.345.255	47,63%	874.894.732.329,47	40,00%	SANGAT TINGGI	TINGGI

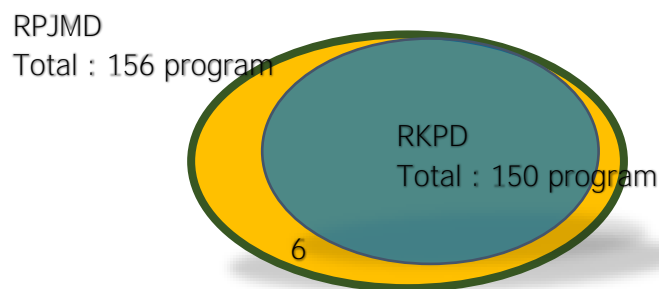
2.2.1. Keselarasan Program RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan RKPD Tahun 2023.

Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar periode 2021-2026. Berdasarkan data pada RPJMD 2021-2026 Tabel 7.2 terdapat 136 Program yang terbagi dalam 8 (delapan) urusan/unsur/fungsi serta terbagi dalam 40 (empat puluh) bidang urusan/sub unsur. Dari 136 Program tersebut, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang tersebar ke semua Perangkat Daerah dan dihitung sebagai satu program karena indikatornya seragam di semua perangkat daerah. Dari 136 Program tersebut juga terdapat 5 (lima) program yang diambil oleh 4 (empat) kecamatan sebagai pengampu unsur kewilayahan meliputi :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Dari 156 program yang ada didalam RPJMD, sebanyak 150 Program tertuang kedalam RKPD Tahun Anggaran 2023 dan terdapat 6 program yang ada di RPJMD tetapi tidak diambil pada RKPD 2023. Keselarasan Program antara RPJMD dengan RKPD tertuang seperti pada tabel berikut:

Gambar 2.3
Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2023 dengan Program RPJMD Tahun 2023



Program pada RPJMD yang tidak terambil pada RKPD tahun 2023 terdiri dari :

Program Pengembangan Permukiman dilaksanakan di dinas PUPR. Tidak dilaksanakan di RKPD Perubahan Tahun 2023 karena pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan yang dulu berada di program Pengembangan Permukiman telah dialihkan ke Program Penyelenggaraan Jalan agar sesuai dengan target dan indikator outcome.

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3). Program ini tidak dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan karena kegiatan yang dilaksanakan hanya monitoring, sedang monitoring sudah bisa diakomodasi melalui sistem yang tersedia (OSS), sehingga untuk efisiensi Program ini tidak dilaksanakan.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM). Program ini tertuang dalam RPJMD dan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Pada Tahun 2023 Program ini tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran dan dioptimalkan pada Program Pengembangan UMKM mengingat objek UMKM yang disasar sama.

Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Program ini dilaksanakan di Dinas Kebudayaan. Kegiatannya meliputi kegiatan pentas budaya sanggar. Tidak dilaksanakan karena lebih diprioritaskan ke kegiatan lainnya. Pentas Budaya difasilitasi melalui kegiatan PKB, dan lomba-lomba yang terakomodir di program lainnya.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Program ini tidak diambil pada RKPD tahun 2023 oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan pertimbangan bahwa Potensi yang bisa diintervensi oleh pemerintah Kota sangat kecil bahkan hampir tidak ada. Seperti diketahui Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota. Di Kota Denpasar Usaha perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk dan Rawa sangat kecil bahkan nyaris tidak ada. Yang bisa dikerjakan sebatas penebaran ikan dan hal tersebut tdk memakai anggaran karena benih disiapkan UPTD perikanan.

Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak diambil di 2023 karena kegiatan yang dilaksanakn terkait HAKI baru sebatas fasilitas HAKI. Kegiatan Fasilitas ini di tahun 2023 tertuang dalam PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Sub kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Data Lebih jelas keselarasan antara RPJMD dengan RKPD 2023 seperti terlihat pada tabel 2.4 dibawah :

Tabel 2.4
Keselarasan Program RPJMD dan RKPD

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,52	262.358.471,93	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Lama Sekolah	11,87	283.119.783,67
		Harapan Lama sekolah	14,02			Harapan Lama sekolah	14,06	
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang telah mereviu Kurikulum K13	100%	150.612,30	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang telah mereviu Kurikulum K13	100%	150.612,30
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase legalitas penyelenggaraan pendidikan	82%	80.493,15	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase legalitas penyelenggaraan pendidikan	82%	80.493,15
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	220.480.496,40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	195.607.930,54

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56			Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56	
		Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,5			Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,5	
		Persentase Balita stunting	10%			Persentase Balita stunting	10%	
		Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%			Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100%	159.840,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100%	159.840,00
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase TPM Memenuhi syarat	54%	218.244,15	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM Memenuhi syarat	54%	218.244,15
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%	789.236,10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%	789.236,10
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang sungai berfungsi normal	1,8% (1.300 M)	3.291.418,09	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang sungai berfungsi normal	1,8% (1.300 M)	3.295.418,09

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal	22,80% (12.513)			Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal	22,80% (12.513)	
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	55,61% (80.672 SR)	4.095.448,52	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	55,61% (80.672 SR)	2.298.513,50
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana persampahan yang memadai	34,88%	5.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana persampahan yang memadai	34,88%	400.000,00
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,45% (10.803 SR)	2.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,45% (10.803 SR)	2.345.212,25
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,10% (1.143.350)	8.768.069,31	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,10% (1.143.350)	9.578.470,71
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman	100%	3.167.986,80	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman	100%	9.279.900,00
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis	0,36% (1080 IMB)	21.619.350,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis	0,36% (1080 IMB)	30.061.280,58
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis	16,67%	21.000.000,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis	16,67%	7.253.036,50

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	78,97 %	42.281.613,10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	78,97 %	52.723.854,75
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	5%	422.730,00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	5%	300.950,72
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	95%	2.806.702,75	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	95%	2.806.702,75
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Presentase pemenuhan SPM perumahan	100%	326.766,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase pemenuhan SPM perumahan	100%	326.766,00
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	0,169%	1.076.174,40	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh	0,169%	1.076.174,40
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	94,48%	1.800.000,00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	94,48%	1.800.000,00
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	100%	56.297.420,18	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	100%	38.433.261,73
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN							

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	86,38%	1.895.440,98	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	86,38%	314.129,84
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	32,56%	9.209.557,55	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	32,56%	3.609.557,55
		Persentase pelayanan penanggulangan bencana	100,00%			Persentase pelayanan penanggulangan bencana	100,00%	
		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100,00%			Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100,00%	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	15 menit	886.099,50	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	15 menit	3.307.289,50
		Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%			Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	1.020.228,10	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	1.020.228,10
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	2.713.713,60	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	2.713.713,60
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	100%	332.886,20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	100%	332.886,20
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	87%	1.799.087,80	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	87%	1.799.087,80
		Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	88%			Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	88%	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	35%	808.242,40	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	35%	808.242,40
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	60%	453.461,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	60%	453.461,00

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	57%			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	57%	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9,80%	830.975,00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9,80%	526.975,00
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	20%	354.610,36	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	20%	545.434,84
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/ Lurah)	4,6 %	116.651,25	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/Lurah)	4,6 %	86.051,25
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Data terpilah Gender dan Anak pada OPD	20%	152.167,50	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data terpilah Gender dan Anak pada OPD	20%	64.767,50
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Indikator KLA	Utama	1.290.100,00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Indikator KLA	Utama	1.019.700,00

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	62%	228.916,00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	62%	240.518,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan pangan lokal (ton/tahun)	25 ton/tahun	,00	#N/A	#N/A	#N/A	-
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari)	3,948	364.435,00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari)	3,948	268.553,24
		Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	172,87			Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	172,87	
		Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari)	2,492			Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari)	2,492	
		Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	82			Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	82	
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan	20%	3.789.349,00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase cadangan pangan	20%	1.123.770,40
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	85%	33.622,00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	85%	31.665,26
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase konflik pertanahan yang terselesaian	100%	7.290,80	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik pertanahan yang terselesaian	100%	7.290,80
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	12 sertifikat	117.830,20	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	12 sertifikat	117.830,20
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	20%	202.474,00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	20%	202.474,00
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kualitas air	2%	1.795.447,18	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kualitas air	2%	1.696.217,48
		Persentase peningkatan kualitas udara	2%			Persentase peningkatan kualitas udara	2%	
		Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	1%			Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	1%	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	33%	22.635.477,89	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	33%	19.729.002,74
		Persentase taman yang terpelihara	100%			Persentase taman yang terpelihara	100%	

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.05	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat	100%	55.712,81	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat	100%	55.712,81
2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	80%	330.267,90	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	80%	330.267,90
2.11.09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	0%	218.334,30	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	0%	218.334,30
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dikelola	94%	106.946.545,75	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	94%	70.630.545,75
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	1.862.030,40	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	283.300,40

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	90%	31.061,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	90%	-
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Validitas Data Kependudukan	100%	710.733,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Data Kependudukan	100%	-
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dokumen Profil Kependudukan	0	,00	#N/A	#N/A	#N/A	-
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	100%	653.263,45	#N/A	#N/A	#N/A	-
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang Terbentuk	30	14.623,60	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama Desa yang Terbentuk	30	14.623,60
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	553.925,95	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	554.571,45

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LKD Aktif	100%	2.083.853,86	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKD Aktif	100%	2.592.853,86
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB.	2,3%	284.050,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB.	2,3%	157.250,00
		Persentase kelompok kerja Bangga Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif	9,3%			Persentase kelompok kerja Bangga Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif	9,3%	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed)	7,80%	455.737,50	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed)	7,80%	1.738.173,50
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)	15%	547.800,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)	15%	885.865,49
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN							

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BIDANG PERHUBUNGAN							
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33%	19.770.855,64	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33%	19.770.855,64
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	60%	381.137,47	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	60%	381.137,47
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	80%	6.303.041,25	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	80%	2.413.679,72
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	80%	8.976.178,09	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	80%	4.158.992,57
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
2.17.03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	85%	320.070,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	85%	307.770,00

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.04	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	16,43%	411.809,20	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	16,43%	750.474,00
2.17.05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	22,34%	453.306,61	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	22,34%	750.474,00
2.17.06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	5%	396.228,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	5%	317.728,00
2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	10%	280.535,70	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	10%	208.435,70
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	5%	995.745,50	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	5%	660.945,50
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	20%	170.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	20%	113.990,00
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	2%	570.000,00	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	2%	

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai 87,87	175.000,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai 87,87	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	20%	120.000,00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	20%	
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	100%	200.000,00	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	100%	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase partisipasi pemuda dalam event nasional	80%	92.739,78	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam event nasional	80%	92.739,78
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase partisipasi atlet di tingkat nasional	91%	12.010.892,50	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase partisipasi atlet di tingkat nasional	91%	57.726.597,50
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kepramukaan	79%		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kepramukaan	79%	1.446.467,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkup pemerintah kota Denpasar	75%	256.470,80	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkup pemerintah kota Denpasar	75%	120.000,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di lingkup pemerintah kota Denpasar	50%	460.781,59	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di lingkup pemerintah kota Denpasar	50%	228.997,46
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100%	25.883.429,03	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100%	29.708.545,18
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	583.429,25	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	583.429,25
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	100%	930.022,15	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	100%	1.194.831,00
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	927.566,55	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	927.566,55

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Tahun	3%	1.706.702,91	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pemustaka Tahun	3%	593.242,41
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan dilestarikan	6,89%	259.834,00	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan dilestarikan	6,89%	259.834,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Nilai rata-rata evaluasi kearsipan	73,1	778.081,53	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai rata-rata evaluasi kearsipan	73,1	425.370,74
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	3640 box	503.279,31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	3640 box	412.176,00
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase capaian pelayanan peminjaman arsip	2,35%	75.650,14	#N/A	#N/A	#N/A	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	1.391 ton	372.266,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	1.391 ton	331.570,00

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi perikanan budidaya	615 ton	840.597,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi perikanan budidaya	615 ton	633.168,25
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase cakupan sumberdaya perikanan yang dipantau	50%					-
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	36,7	183.120,00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	36,7	173.397,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							23.060.739,15
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	4 destinasi	3.716.214,95	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	4 destinasi	3.915.584,73
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	5%	7.724.217,80	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	5%	1.111.200,00
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase peningkatan jumlah produk ekraf yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	50%	1.856.145,40				-
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	100 orang	3.679.442,76	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	100 orang	3.054.782,11

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							20.814.164,09
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	- Padi : 71,27 kw/ha	998.750,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	- Padi : 71,27 kw/ha	1.111.104,90
			- Sayur Hijau : 177,69 kw/ha				- Sayur Hijau : 177,69 kw/ha	
			- Kangkung : 150,75 Kw/Ha				- Kangkung : 150,75 Kw/Ha	
			- Bayam : 56 Kw/Ha				- Bayam : 56 Kw/Ha	
			- Semangka : 290,56Kw/Ha				- Semangka : 290,56Kw/Ha	
			- 1.500 ekor				- 1.500 ekor	
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	36,64%	1.950.000,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	36,64%	2.813.351,25
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	100%	900.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	100%	768.536,81
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	142.660,00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	118.447,70

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan / Pengukuhan Kelas Kelompok Tani	10%	679.600,00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan / Pengukuhan Kelas Kelompok Tani	10%	292.400,10
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							406.709,88
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	40%	39.000,00	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	40%	-
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	68,29%	350.623,17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	68,29%	168.839,09
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten/ Kota, agen, distributor dan pasar rakyat	77,33%	143.800,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten/ Kota, agen, distributor dan pasar rakyat	77,33%	12.000,00
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	2.313.947.199.330	441.563,24	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	2.313.947.199.330	49.970,21
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	344.064,54	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	112.000,00

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	0,94%	572.075,87	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	0,94%	63.900,58
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							13.995.811,88
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	36%	1.737.012,36	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin	36%	45.099,20
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	90%	76.706,00	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	90%	21.706,00
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Data informasi industri yang lengkap dan terkini	90%	27.437,80	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Data informasi industri yang lengkap dan terkini	90%	27.437,80
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							91.089.000,18
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	24.545.824,70	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	24.545.824,70

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	
		Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	100%			Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	100%	
		Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%			Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100%	1.714.604,00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100%	1.714.604,00
		Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100%			Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100%	
		Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100%			Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100%	
4.02	SEKRETARIAT DPRD							97.728.412,94
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	85%	35.864.972,17	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	85%	35.864.972,17
		Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan	100%			Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan	100%	

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perda, Penganggaran dan Pengawasan				Perda, Penganggaran dan Pengawasan		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01	PERENCANAAN							11.758.982,69
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	100%	839.831,12	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	100%	939.831,12
		Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100%			Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100%	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	2.030.433,10	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	1.051.677,38
		Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100%			Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100%	
5.02	KEUANGAN							232.966.728,42
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52	175.632.092,60	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52	175.632.092,60

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85	1.568.329,98	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85	1.568.329,98
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	36%	1.211.825,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	43%	1.211.825,00
5.03	KEPEGAWAIAN							14.155.937,67
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	76%	2.517.980,41	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	76%	1.654.315,16
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							4.599.497,00
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit	53%	4.813.297,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit	53%	4.599.497,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							10.516.028,56
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	70%	3.535.165,51	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	70%	1.084.371,80
		Persentase Penetapan Inovasi Daerah	100%			Persentase Penetapan Inovasi Daerah	100%	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01	INSPEKTORAT DAERAH							20.492.895,55
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas APIP	Level 3	907.549,70	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP	Level 3	427.446,00
		Maturitas SPIP	Level 3			Maturitas SPIP	Level 3	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	50%	288.630,80	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	50%	30.020,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN							85.353.918,57
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	80%	#REF!	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	80%	1.181.203,69
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	80%			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	80%	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur	80%			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur	80%	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	80%			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	80%	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	12.634.349,13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	10.893.193,11

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	1.790.348,16	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	2.067.299,46
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	716.649,66	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	343.403,50
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	98.051,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	96.751,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							14.973.988,87
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	8.671.595,66	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	3.900.323,53
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	70%	1.706.449,80	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	70%	1.615.042,80

RPJMD 2021-2026					RKPD 2023			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		PROGRAM RKPD 2023	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	67%	1.312.878,86	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	67%	910.675,90
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100%	157.381,15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100%	157.381,15
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	60%	1.415.956,10	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Konflik Sosial	60%	506.552,80
X.XX	FUNGSI PENUNJANG URUSAN							-
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	858.165.947,39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	858.165.947,39

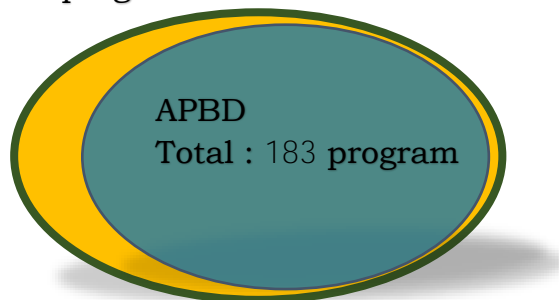
2.2.2. Keselarasan Program RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023.

Bila dihitung berdasarkan jumlah program per Perangkat Daerah, maka pada RKPD 2023 terdapat 183 Program yang dijalankan oleh semua Perangkat Daerah. Nilai ini termasuk program penunjang urusan kabupaten/kota yang tersebar kesemua perangkat daerah. Juga termasuk 5 program yang seragam di 4 kecamatan. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah program yang dilaksanakan di Perangkat Daerah. Pada APBD jumlah Program yang dilaksanakan sejumlah 183 Program.

Keselarasn antara program yang tertuang dalam RKPD dan APBD 2023 terlihat pada gambar dibawah ini.

RKPD

Total : 183 program



Gambar 2.4

Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2023 dengan Program APBD Tahun 2023 Perbandingan Jumlah Program sampai ke Jumlah Kegiatan dan sub kegiatan anantara RKPD 2023 dengan APBD Pergeseran II Tahun 2023 dapat tergambarkan melalui tabel dibawah ini

Tabel 2.5
Perbandingan Jumlah Program – Kegiatan – Sub kegiatan antara RKPD dengan APBD
2023

NO	Perangkat Daerah	RKPD 2023			Pergeseran APBD II			Selisih		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	SubKegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	19	60	7	19	66	0	0	-6
2	DINAS KESEHATAN	5	16	45	5	16	53	0	0	-8
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	23	66	12	23	66	0	0	0
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	8	15	29	8	15	29	0	0	0
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	12	31	3	12	31	0	0	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	6	13	2	7	14	0	-1	-1
7	DINAS SOSIAL	4	10	26	4	9	23	0	1	3
8	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	4	11	14	4	11	14	0	0	0
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10	25	56	10	26	66	0	-1	-10
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	8	14	29	8	14	29	0	0	0
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	12	23	4	12	23	0	0	0
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	7	20	4	7	20	0	0	0
13	DINAS PERHUBUNGAN	3	13	30	3	13	30	0	0	0
14	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	5	8	22	5	8	22	0	0	0
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	7	13	34	7	13	34	0	0	0
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	10	21	6	10	21	0	0	0

NO	Perangkat Daerah	RKPD 2023			Pergeseran APBD II			Selisih		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	SubKegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
17	DINAS KEBUDAYAAN	7	14	28	7	14	28	0	0	0
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5	13	28	5	13	28	0	0	0
19	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	7	17	37	7	17	37	0	0	0
20	DINAS PARIWISATA	4	8	20	4	8	21	0	0	-1
21	DINAS PERTANIAN	6	12	26	6	12	27	0	0	-1
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10	16	40	10	16	40	0	0	0
23	SEKRETARIAT DAERAH	4	16	35	4	16	35	0	0	0
24	SEKRETARIAT DPRD	2	15	43	2	15	42	0	0	1
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	10	22	3	10	22	0	0	0
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	7	26	2	7	26	0	0	0
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	12	54	3	12	54	0	0	0
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	11	31	3	11	31	0	0	0
29	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	10	31	2	10	31	0	0	0
30	INSPEKTORAT DAERAH	3	9	22	3	9	22	0	0	0
31	KECAMATAN DENPASAR BARAT	6	12	29	6	12	29	0	0	0
32	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	6	12	28	6	12	28	0	0	0
33	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	6	12	26	6	12	26	0	0	0
34	KECAMATAN DENPASAR UTARA	6	11	23	6	11	23	0	0	0
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	29	6	12	29	0	0	0
	REKAP TOTAL :	183	444	1098	183	444	1120	1	0	-22

2.3. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan RKPD Tahun 2023

Adapun kendala dan permasalahan terkait pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Kendala, Solusi dan Catatan Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 oleh
Perangkat Daerah

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pada triwulan I tahun 2023 hanya kegiatan yang bersifat rutin yang bisa direalisasikan	Beberapa kegiatan baru dilaksanakan mulai pada triwulan II tahun 2023	Memeriksa kembali terkait rencana belanja yang akan direalisasikan dengan anggaran kas yang sudah disusun.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor secara fisik telah terlaksana 50.29%, namun keuangannya belum dapat terealisasi dikarenakan masih dalam proses pembayaran kepada rekanan 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara fisik telah terlaksana 35.16%, namun realisasi keuangannya tercapai hanya 2.36% dikarenakan masih dalam proses pengamprahan ATK; 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD secara fisik terlaksana 26.20%, namun realisasi keuangannya hanya tercapai 10.10% dikarenakan belanja makanan dan minuman rapat masih dalam proses pengamprahan SPJ; 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Menyusun perencanaan anggaran dengan lebih cermat dan detail sehingga untuk ke depannya alokasi anggaran dapat mewujudkan anggaran tepat guna dan tepat sasaran; Mengevaluasi serapan anggaran tahun yang telah berjalan/sebelumnya sehingga bisa menjadi acuan dalam merancang anggaran belanja pada tahun berikutnya, sehingga daya serap anggaran belanja APBD bisa terserap maksimal; Lebih mengintensifkan koordinasi dan sinergi yang baik dengan pihak-pihak / instansi terkait

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		<p>Lainnya secara fisik telah terlaksana 50%, namun keuangannya belum dapat terealisasi dikarenakan masih dalam proses administrasi pengamprahan belanja modal AC, sedangkan belanja modal yang lain masih indent; 5. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota secara fisik telah terealisasi 16.82%, sedangkan keuangannya terealisasi 4.45% dikarenakan anggaran belanja perjalanan dinas belum terpakai sebagai akibat belum ada terlaksananya kegiatan dinas; 6. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Penyusunan Standar Harga secara fisik hanya terealisasi 1.41%, sedangkan keuangannya belum dapat terealisasi dikarenakan belanja makanan dan minuman rapat masih dalam proses pengamprahan; 7. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah secara fisik hanya terealisasi 8.60%, sedangkan keuangannya belum dapat terealisasi dikarenakan masih dalam proses pencetakan; 8. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah secara fisik hanya terealisasi 15.31%, sedangkan keuangannya juga baru terealisasi 2.50% dikarenakan masih dalam proses kelengkapan sertifikat; 9. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah secara fisik hanya terealisasi 16.70%, sedangkan keuangannya belum dapat terealisasi dikarenakan masih menunggu faktur dari rekanan; 10. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah secara fisik telah mencapai 50%, keuangannya hanya terealisasi 0.62% dikarenakan masih proses di rekanan; 11. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Penilaian Barang Milik</p>	

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		Daerah secara fisik telah tercapai 50%, namun keuangannya terealisasi hanya 2.56%, dikarenakan masih proses kontrak dengan pihak ke-3; 12. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah secara fisik hanya tercapai 0.85%, keuangannya pun hanya terealisasi sebesar 0.24% dikarenakan belum ada permohonan hibah; 13. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah secara fisik hanya tercapai 32.91%, sedangkan keuangannya belum dapat terealisasi dikarenakan masih proses audit BPK	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	1. Minimnya data dan tidak tertibnya laporan Perangkat Daerah akan sangat berdampak pada ketetapan waktu dalam proses dan penetapan dokumen perencanaan 2. Kemampuan dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Kota Denpasar masih belum maksimal 3. Database yang belum akurat dan terstruktur sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan ketepatan waktu dalam proses penetapan dokumen perencanaan 2. Meningkatkan kapasitas perencana khususnya dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Kota Denpasar melalui diklat, bimtek dan workshop 3. Mengembangkan sistem integrasi data sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
DINAS KEBUDAYAAN	-	Adanya belanja yang menggunakan E-Purchasing melalui sistem katalog elektronik dan Mbizmarket, sehingga jika sistem eror maka akan terjadi keterlambatan dalam proses pemesanan pengadaan kegiatan	Dilakukan pemesanan pengadaan lebih awal untuk meminimalisasikan keterlambatan pemesanan jika terjadi eror pada sistem katalog elektronik dan mbizmarket
		Kendala dalam pengumpulan data penerima honor kegiatan terutama nomor rekening penerima honor yang tidak aktif sehingga dibutuhkan proses administrasi lebih lanjut di Bank	Melakukan koordinasi kepada penerima honor untuk memenuhi data yang diperlukan
		Kendala terkait pemenuhan kelengkapan administrasi yaitu Surat Keputusan (SK) yang mengalami keterlambatan di Bagian Hukum karena adanya birokrasi tertentu yang harus dilalui	Berkoordinasi dengan Bagian Hukum terkait percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK)
		Pelaksanaan kegiatan yang tidak bisa terlaksana sesuai dengan rancangan anggaran kas terutama pada kegiatan-kegiatan terkait	Anggaran kas yang dirancang sesuai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun sebelumnya

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		Administrasi Umum dikarenakan realisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan	
DINAS KESEHATAN	-	DAK Fisik terkendala RKBMD belum masuk di aplikasi	Mengajukan telaahan staf ke Walikota dan Inspektorat dan sudah diijinkan melaksanakan kegiatan mulai Bulan April
		Harga obat mengalami kenaikan sehingga tidak bias melaksanakan pengadaan obat	Melakukan permohonan pergeseran
		Sumber dana DID baru turun bulan april	Dilaksanakan di Triwulan II
	Dana OP terdapat silpa	Rencana pelaksanaan kegiatan sub keg. Operasional Puskesmas bulan Januari dan Februari tidak bisa input ekatalog karena tidak ada nomor RUP	Koordinasi dengan UKPBJ untuk merubah metode pengadaan
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	-	Terdapat kegiatan yang sumber dananya dari DID (PUSAT) Belum Tersalurkan sehingga belum bisa direalisasikan	Melakukan koordinasi dengan BPKAD terkait Kegiatan yang sumber dananya DID dan Tenggat waktu untuk pencairan anggaran
DINAS PARIWISATA	-	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota - Belanja Jasa pihak ketiga (rebranding sanur) tidak teralisasi karena kajian Tahap I perlu diimplementasikan terlebih dahulu - Pada pelaksanaan kegiatan Table Top Kota Denpasar, "Visit Denpasar, Enjoy Morning of the World" ada beberapa spek barang/jasa yang tidak ditentukan dalam Perwali SHB dan SBJ - Pada pelaksanaan kegiatan Table Top Kota Denpasar, "Visit Denpasar, Enjoy Morning of the World" masih kurang maksimalnya kehadiran buyers	- Belanja jasa pihak ketiga akan dikembalikan pada anggaran perubahan - Dilakukan survei harga sebelum penyusunan HPS - Meningkatkan komunikasi dengan stakeholder pariwisata di lokasi pelaksanaan Table Top
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota Perdin dan jasa pihak ketiga sedang dalam proses administrasi keuangan	Followup proses administrasi keuangan
		Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Penyerapan anggaran untuk belanja fotocopy tidak sesuai dengan target yang ditetapkan	Belanja cetak / fotocopy berjalan sesuai kebutuhan
		Sub Kegiatan : Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini belum optimal	Masih menunggu dana DID masuk ke kasda

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja sewa tanaman masih mencari rekanan pada aplikasi E-katalog	Menunggu arahan dari pimpinan
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja obat-obat belum terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan	Belanja obat - obatan akan dikembalikan pada anggaran perubahan
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja obat-obatan (hands sanitaizer) tidak terealisasi	Belanja obat - obatan akan dikembalikan pada anggaran perubahan
		Sub Kegiatan : Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Belanja spanduk tidak terealisasi	Belanja spanduk akan dikembalikan pada anggaran perubahan
		Sub Kegiatan : Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Sertifikasi hotel dan pemandu wisata sedang dalam proses administrasi keuangan	Followup proses administrasi keuangan
		Sub Kegiatan :Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif : - Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas tidak terealisasi karena Bapak Walikota telah menjadi narasumber dalam kegiatan gathering I - Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan tidak terealisasi karena pada kegiatan gathering I telah diliput oleh Humas Walikota - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan tidak terealisasi	- Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas akan dilaksanakan pada gathering selanjutnya - Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan akan dilaksanakan pada kegiatan Gathering selanjutnya - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan akan dikembalikan pada anggaran perubahan
		Sub Kegiatan :Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Kegiatan mundur di TW II	Menjalankan sesuai dengan perubahan rencana realisasi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	- Realisasi anggaran tidak sesuai dengan anggaran kas - Kurang akuratnya penyusunan rencana anggaran kas	- Mempercepat penyusunan dokumen tender - Mempercepat pencairan uang muka - Mempercepat realisasi anggaran sesuai dengan progres pekerjaan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	Proses dalam pembelian barang dari rekanan memakan waktu yang lumayan lama, karena memakai E-Purchasing sehingga kegiatan lambat untuk direalisasikan	Pembelian yang sekiranya bisa cepat lebih baik lewat pengadaan langsung, seperti Belanja bahan Cetak
		Terdapat beberapa kegiatan dimana Fisik sudah berjalan namun realisasi keuangan sedang di proses	Koordinasi kepada masing-masing bendahara bidang, agar lebih meningkatkan proses pembuatan SPJ

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	1. SPJ kegiatan TW I masih dalam proses pencairan dana, 2. Untuk pengadaan AC merk belum memenuhi sertifikat TKDN sehingga belum bisa dilaksanakan pengadaannya dan 3. Akseptor pelayanan KB gratis belum memenuhi target	1. Agar bisa dipercepat proses pencairan dana kegiatan TW I, 2. Pengadaan AC bermerk tersebut akan diajukan revisi pada anggaran perubahan dan 3. Agar digencarkan lagi informasi pelayanan KB gratis kepada masyarakat sehingga mereka bersedia menjadi akseptor
		1. SPJ kegiatan TW II masih ada yang dalam proses pencairan dana, 2. Untuk pengadaan Printer dan Screen Proyektor masih belum memenuhi sertifikat TKDN dan 3. Jumlah Akseptor yang mengikuti pelayanan KB gratis belum memenuhi target	1. Agar dipercepat proses dalam pengajuan pencairan dana sehingga tidak melewati TW, 2. Akan dilakukan pergeseran pada Anggaran Perubahan agar pengadaan printer dan screen proyektor dapat memenuhi sertifikat TKDN dan 3. Agar digencarkan lagi informasi dan sosialisasi terkait pelayanan KB gratis kepada masyarakat sehingga mereka mau menjadi akseptor KB.
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	SPJ masih dalam proses administrasi	Mempercepat proses SPJ sesuai dengan alur kas
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	data yang diperoleh dari DPMPTSP kota Denpasar berbeda berbeda format dari yang harus dilaporkan pada aplikasi SIINas	menyesuaikan pada format laporan sesuai aplikasi SIINas
		industri kecil di kota Denpasar belum memahami tentang apa itu SIINas	diadakan solusi ke industri kecil tentang SIINas
		Kita tidak tahu berapa pedagang dijadikan responden agar data yang kita dapat menjadi lebih akurat. Waktu pengambilan data yang terlalu pagi membuat aktivitas berjualan terganggu. Intensitas untuk mendapatkan informasi harga ke pedagang terlalu sering sehingga para pedagang merasa terganggu sementara perubahan harga bahan pokok tidak terjadi setiap hari.	kita harus melakukan koordinasi kepada kepala pasar agar para pedagang pasar diberi pemahaman untuk bisa membantu pemerintah memberikan informasi harga bahan pokok untuk keperluan masyarakat.
		Realisasi Keuangan Tidak sesuai target	Kegiatan agar tidak dilaksanakan di akhir-akhir Triwulan

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		Terjadi beberapa kendala saat belanja barang di e-katalog yaitu: 1. Menunggu rekanan untuk input jenis barang di e-katalog 2. Respon cukup lama dari rekanan untuk acc di e-katalog 3. Ada beberapa barang yang belum muncul dan belum di input oleh rekanan	Mengarahkan rekanan untuk segera menginput jenis-jenis barang sesuai dengan pesanan dan mengarahkan rekanan untuk standby dan aktif membuka aplikasi
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	.	Kendala pada E-Katalog terkait negosiasi harga terkait belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Bahan cetak	Melaksanakan negosiasi lebih lanjut dengan rekanan terkait harga alat/bahan untuk kegiatan kantor Bahan cetak
		Masih terdapat proses keuangan pada bahan komputer dan belanja kelengkapan buku	Mempercepat penyelesaian proses keuangan
		Menunggu koreksi SK Tim Pusling dari Bagian Hukum terkait belanja pakaian	Koordinasi dengan Bagian Hukum untuk proses SK Tim Pusling
		SPJ masih dalam proses	Mempercepat proses penyelesaian SPJ
DINAS PERTANIAN	-	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang disediakan tidak dapat terlaksana karena barang yang ditampilkan di e-purchasing melebihi pagu anggaran	realokasi di anggaran perubahan
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	Adanya pemeriksaan BPK terhadap kegiatan tahun sebelumnya banyak menyita waktu	Menyelesaikan dan memenuhi permintaan data dari BPK dengan tetap melaksanakan kegiatan tahun 2023
		Pekerjaan Masih dalam proses pengadaan	-
		Pengajuan fasos fasum sering terkendala karena pemohon mengajukan fasos fasum yang fisiknya belum selesai 100%	Memberikan waktu kepada pihak pengembang untuk menyelesaikan kondisi fisik faso fasum.
		Penyusunan HPS/RAB pekerjaan terkendaa karena stuan harga belum ditetapkan	Mengikuti standar satuan harga yang ditetapkan oleh Dinas PUPR dan menyesuaikan dengan standar harga Kota Denpasar yang agak lambat keluarnya
		Proses pajak ppn dari penyedia/kontraktor masih dalam proses di kantor pajak, karena verifikasi perusahaan yang KSO (Kerja Sama Operasi)	Mempercepat proses perpajakan
		Proses persertifikatan masih menunggu proses berjalan di kantor pertanahan	Melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan kantor pertanahan

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	-	Bidang (Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja) kendala yang dihadapi : Aliran kas lebih banyak ada di TW 2 dan TW 3	Masih dalam Proses Pengamprahan
		Bidang (Penempatan Tenaga Kerja)kendala yang dihadapi : Kurangnya peserta yang mempunyai keahlian khusus dan kurangnya waktu sehingga pengamprahan di alihkan ke te triwulan II	Diadakan sosialisasi kembali kepada unsur camat se'Kota Denpasar,media sosial,dan Yowana Kota Denpasar
		Bidang (Hubungan Industrial) , kendalanya : SK Dewan pengupahan baru diterima hari ini 12 april 2023,sehingga baru akan dicairkan bulan april ini.	SK Dewan pengupahan untuk tahun depan akan diusulkan pada bulan desember tahun ini.
KECAMATAN DENPASAR BARAT	-	Pemilihan penyedia dalam aplikasi E-purchasing (Katalog Lokal) terbatas karena tidak semua rekanan di Kecamatan Denpasar Barat terdaftar di katalog lokal	agar dilakukan sosialisasi ke penyedia di Kota Denpasar tentang katalog lokal
		Pengamprahan SPJ terhambat karena penyedia belum sepenuhnya memahami sistem katalog lokal tersebut	agar dilakukan sosialisasi ke penyedia di Kota Denpasar tentang katalog lokal
KECAMATAN DENPASAR TIMUR	Komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait (Desa/Kelurahan) dan OPD	Sarana dan Prasarana kerja kurang memadai,Kompetensi dan kuantitas SDM di bagian perencanaan perlu ditingkatkan	Penambahan SDM yang berkualitas dalam bekerja
KECAMATAN DENPASAR UTARA	-	capaian kinerja dan anggaran triwulan II dibawah 60%	mempercepat proses pengajuan amprahan belanja agar memenuhi target realisasi Triwulan III
		Di Triwulan I belanja modal pada kelurahan se Kecamatan Denpasar Utara tidak dapat terealisasi dikarenakan persentase TKDN pada rekanan/penyedia belum memenuhi syarat pada aplikasi E-Proc, sehingga persentase serapan anggaran Kecamatan Denpasar Utara kecil.	Pada Triwulan II akan kami usahakan untuk peningkatan serapan anggaran khususnya belanja modal/pengadaan.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	Kendala Triwulan I 1. terdapat keterlambatan SPJ sehingga realisasi todak maksimal 2. terdapat pekerjaan di TW I tetapi anggaran kas ada di TW II	Solusi Triwulan I 1. mempercepat proses penyerapan anggaran 2. melakukan pergeseran anggaran kas

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
SEKRETARIAT DAERAH	-	Bagian Organisasi 1. sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan : Belanja Makanan dan minuman rapat belum terealisasi pelaksanaan rapat masih menggunakan media Zoom 2. sub keg. Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi : Bahan fotocopy belum teralisasi, dan Honorarium Narasumber dan Perjalanan Dinas biasa belum terealisasi masih menunggu jadwal dari KemenPANRB RI selaku narasumber	Pelaksanaan rapat - rapat pada sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan untuk segera dijadwalkan sehingga tepat waktu.
		Bagian Perekonomian 1) untuk Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan kegiatan fisik sudah terlaksana dan realisasi keuangan masih dalam proses. 2) untuk Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil khususnya pada kegiatan TPAKD tertunda karena menunggu jadwal dari Pemerintah Provinsi.	Lebih cermat dalam proses perencanaan kegiatan
		Kendala Bagian Administrasi Pembangunan 1) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kegiatan : Kegiatan FPD yang direncanakan diselenggarakan secara Luring berubah menjadi Hybrid dengan undangan Luring yang terbatas oleh karena keterbatasan kapasitas tempat penyelenggaraan kegiatan; 2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan : Kegiatan pada Triwulan pertama sudah terlaksana, tapi keuangannya belum terealisasi karena kendala pada sistem permohonan pembayaran	1. Ke depan perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan sarana pendukung kegiatan; 2. Melakukan koordinasi lebih awal terkait mekanisme permohonan pembayaran
		Kendala Bagian Pengadaan Barang / Jasa pada Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdapat pada Belanja Modal. Bagian PBJ tidak dapat melakukan Belanja Modal – Printer pada e-katalog karena produk yang di beli wajib memiliki TKDN minimal 25% + BMP 15% sedangkan harga printer dengan TKDN yang sesuai melebihi pagu yang dianggarkan. Maka dari itu target fisik dan keuangan tidak dapat tercapai.	Belanja modal akan dialihkan pada anggaran perubahan serta untuk kedepannya pada penyampaian usulan ranwal renja akan dilakukan pengecekan terlebih pada e-katalog agar pagu yang ada dapat membeli produk yang memiliki TKDN yang sesuai.

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		Pada Triwulan II, Bagian Perekonomian 1) pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD terdapat berkurangnya kuantitas jadwal rapat terkait kajian BUMD dan BLUD (meminimalisir waktu kegiatan), 2) Pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil khususnya pada kegiatan TPAKD terdapat perubahan rencana rapat TPAKD dari Pemerintah Provinsi dan menyesuaikan jadwal pimpinan, 3) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan kegiatan fisik sudah terlaksana dan masih dalam proses keuangan.	Efisiensi Anggaran dan Pergeseran Anggaran
		Pada Triwulan II, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa beserta subkegiatannya tidak terdapat kendala.	-
		Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 diwujudkan melalui program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah dan 3 sub kegiatan dengan total belanja langsung sebesar Rp.1.522.055.857 1 . Pada su kegiatan fasilitasi kerjasama Dalam Negeri pada belanja makan minum, belanja materai secara fisik telah terealisasi tapi masih dalam proses administrasi. 2. Pada sub Kegiatan Fasilitas kerjasama luar negeri pada belanja makan minum masih dalam proses administrasi dan pada belanja sewa jaringan komputer terjadi perubahan kontrak. pada sub kegiatan evaluasi pelaksanaan kerjasama, anggaran untuk belajar pemeliharaan komputer sudah terealisasi dan masih dalam proses administrasi	Kedepannya akan dilakukan Pencermatan pembuatan anggaran kas
		Triwulan I pada Bagian Kesra 1. pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual dimana Kegiatan fisik tidak berjalan sesuai perencanaan, hal tersebut disesuaikan dengan adanya undangan dari pihak masyarakat dan untuk kegiatan yang sudah berjalan masih ada beberapa administrasi keuangan yang	Lebih cermat dalam proses perencanaan kegiatan dan koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		masih dalam proses dan 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dimana Kegiatan fisik sudah terlaksana dan realisasi keuangan masih dalam proses karena anggaran kas ada di triwulan II.	
		Triwulan I pada Bagian Kesra pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dimana Kegiatan fisik sudah terlaksana dan realisasi keuangan masih dalam proses karena anggaran kas ada di triwulan II.	Lebih cermat dalam proses perencanaan kegiatan
		Triwulan II pada Bagian Kesra 1. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kendala yang dihadapi adalah Administrasi keuangan masih dalam proses penyelesaian dan Kegiatan punia tidak berjalan sesuai perencanaan, hal tersebut disesuaikan dengan adanya undangan dari pihak masyarakat, 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Untuk Kegiatan fisik sudah terlaksana sesuai kalender kegiatan, administrasi keuangan masih dalam proses pengajuan pembayaran dan terdapat juga efisiensi anggaran dikarenakan : a. kegiatan (Harkitnas) tidak berjalan maksimal karena intruksi pelaksanaan kegiatan baru turun 1 hari menjelang pelaksanaan, jd kegiatan dilaksanakan secara sederhana, b. target kegiatan belanja penghargaan atas suatu prestasi (penerima bantuan veteran) telah selesai 100% dengan jumlah realisasi 4 orang dari target 12 orang dan c. target untuk ahli waris berdasarkan telaahan staf yang terbaru yang memenuhi kriteria hanya 1 orang dari target 5 orang sehingga terdapat sisa anggaran dan akan di gunakan untuk melengkapi kekurangan anggaran kegiatan di anggaran perubahan. 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kendala yang dihadapi Terdapat kegiatan Hibah yang terlaksana di Semester 2 dan masih dalam tahap melengkapi	Solusi yang akan di ambil Melaksanakan efisiensi anggaran serta lebih cermat dalam perencanaan kegiatan, melaksanakan efisiensi anggaran dan Lebih cermat kembali dalam mencantumkan anggaran kas sesuai kalender kegiatan

Perangkat Daerah	catatan	kendala	solusi
		administrasi dan terdapat Terkait belanja Rapat belum dapat direalisasikan karena rapat akan dilaksanakan di semester 2.	
		Triwulan II, pada Bagian Tata Pemerintahan untuk sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah belanja aci- aci tidak terealisasi karena pelaksanaan bimtek via zoom; belanja kursus yang direncanakan 6 orang baru terealisasi satu orang dan pelaksanaannya menunggu surat dari pemerintah pusat; belanja Bimtek tidak terealisasi karena bimtek terlaksana via zoom; belanja transportasi dan akomodasi belanja bintek LPPD tidak terealisasi karena Bimtek melalui Zoom meeting; dan administrasi keuangan masih dalam proses.	Anggaran untuk kegiatan Bimtek LPPD di anggaran induk karena pelaksanaannya via zoom akan dialihkan untuk pelaksanaan Bimtek SMP di perubahan; lebih cermat dalam proses perencanaan
		Triwulan II, pada Bagian Tata Pemerintahan untuk Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan belanja aci-aci dan sesajen untuk kegiatan HUT kota Denpasar dan HUT OTDa sudah ditangani oleh Bagian kesra, undangan untuk tamu hanya pakai undangan lampiran kertas biasa, anggaran makmin rapat untuk kegiatan lainnya belum terealisasi karena belum ada petunjuk dari pimpinan, makmin aktivitas lapangan untuk kegiatan HUT RI di Triwulan III, anggaran untuk partisipasi Fee Apeksi menunggu arahan Apeksi pusat, dan perdin apeksi baru terlaksana 1 kali (Pra Muskomwil)	Efisiensi anggaran dan untuk tahun selanjutnya akan di evaluasi penganggarannya
		Triwulan II, pada Bagian Tata Pemerintahan untuk Sub Pengelolaan Administrasi Kewilayahan administrasi keuangan masih dalam proses	Mempercepat proses administrasi keuangan
		Triwulan II, Pada Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum, pada belanja jasa tenaga ahli (Kasus Masyarakat Miskin) tidak dapat direalisasikan dan akan direalisasikan pada triwulan III	Lebih cermat dalam proses perencanaan kegiatan
SEKRETARIAT DPRD	Nihil	1. Pelaksanaan tidak tepat waktu sesuai anggaran kas 2. Persyaratan TKDN dan PDN yang harus dipenuhi	1. Percepatan pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan 2. Koordinasi lebih intensif untuk dapat dipenuhinya persyaratan TKDN dan PDN

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan dasar pembangunan Kota Denpasar sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global. Sesuai dengan kebijakan dasar pembangunan, arah kebijakan pembangunan ekonomi menitik beratkan pada sektor pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri kerajinan rakyat sesuai dengan potensi wilayah di Kota Denpasar.

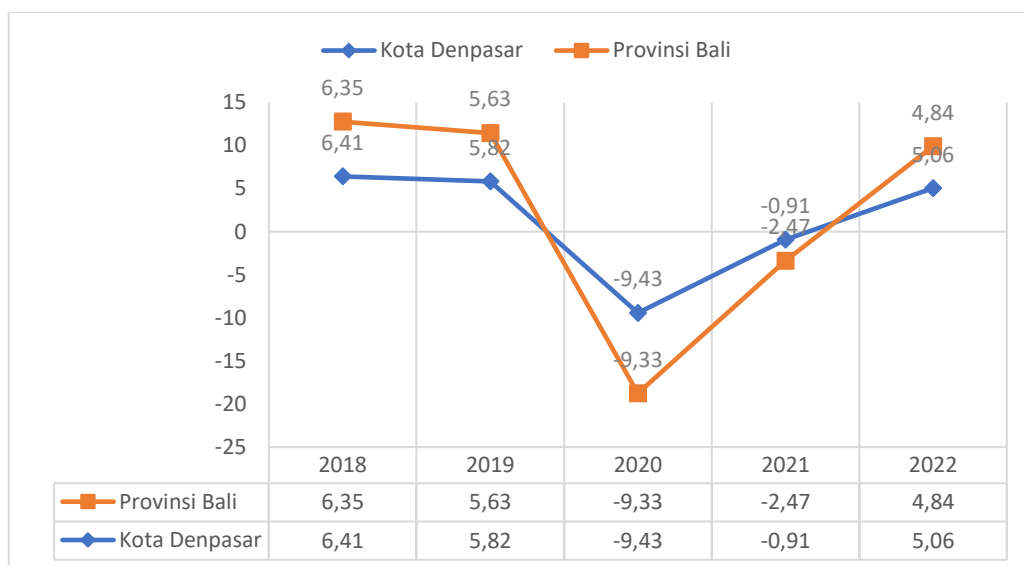
Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, maka kebijakan ekonomi Kota Denpasar diarahkan agar sejalan dengan kebijakan ekonomi Provinsi Bali Tahun 2023 dan kebijakan ekonomi nasional Tahun 2023.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan 2022

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Ditengah upaya penguatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar di tahun 2020, diawal tahun 2020 dunia dihantam oleh pandemi virus SARS-CoV2 yang melumpuhkan perekonomian di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar mengalami kontraksi sebesar -0,91% pada tahun 2021. Hal ini membawa pengaruh yang besar bagi perekonomian Kota Denpasar dengan pariwisata sebagai sektor utama perekonomian. Bali mengalami penurunan tingkat kunjungan wisata dan okupansi hotel yang cukup drastis akibat ditutupnya jalur penerbangan dari beberapa negara.

Pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kota Denpasar menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 5,06%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh mulai meningkatnya lapangan usaha yang sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif terutama pada sektor lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.



Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2018 – 2022
sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terkontraksi sebesar -10,45 pada tahun 2021 menjadi 14,85 di tahun 2022. Katagori Transportasi dan Pergudangan sebelumnya mengalami kontraksi -9,16 menjadi 9,83 di tahun 2022. Begitu pula Pengadaan Listrik dan Gas sebelumnya terkonstraksi -6,47 menjadi 17,57 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan tanda-tanda perbaikan sebagai hasil penanganan pandemi. Salah satunya dengan percepatan pemberian vaksin sehingga beberapa aktivitas perekonomian perlahan mulai dibuka

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) dari tahun 2020 sampai dengan 2022 terlihat seperti tabel dibawah :

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010

Nama Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3.57	3.15	-0.17
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
C. Industri Pengolahan	-7.09	0.72	6.32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-10.29	-6.47	17.57
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1.68	1.21	-2.17
F. Konstruksi	-3.63	5.77	4.24
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7.26	-1.41	6.28
H. Transportasi dan Pergudangan	-19.57	-9.16	9.83
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-29.84	-10.45	14.85
J. Informasi dan Komunikasi	6.30	3.46	-0.95
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-4.19	-3.69	7.17
L. Real Estate	0.13	0.99	2.20
M,N. Jasa Perusahaan	-4.76	-3.16	9.33
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.01	1.92	-2.58
P. Jasa Pendidikan	-0.77	1.80	0.33
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.78	6.38	1.31
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-6.10	-1.51	9.64
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-9.43	-0.91	5.06

sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Jika dibandingkan dengan kabupaten se Provinsi Bali, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar berada di peringkat ke-2 dibawah Kabupaten Badung yang menduduki peringkat 1. Laju pertumbuhan ekonomi semua kabupaten dan Kota se-Bali di tahun 2022 mengalami sudah mengalami peningkatan dari yang sebelumnya terkoreksi menjadi positif di tahun 2022 sehingga secara akumulasi Laju Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali berkisar di nilai 4.84 meningkat dari yang sebelum nya berada pada peringkat terbawah menjadi peringkat ke 21 secara nasional.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	5,59	5.56	-4.98	-0.65	2.98
Kab. Tabanan	5,72	5.58	-6.17	-1.97	2.94

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Badung	6,75	5.81	-16.55	-6.74	9.97
Kab. Gianyar	6,01	5.62	-8.40	-1.07	4.04
Kab. Klungkung	5,50	5.42	-6.38	-0.23	3.12
Kab. Bangli	5,50	5.45	-4.10	-0.33	2.79
Kab. Karangasem	5,48	5.50	-4.49	-0.56	2.58
Kab. Buleleng	5,62	5.51	-5.80	-1.22	3.11
Kota Denpasar	6,41	5.82	-9.43	-0.91	5.06
Provinsi Bali	6,35	5.60	-9.33	-2.47	4.84

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang berperan penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

PDRB Kota Denpasar atas dasar harga berlaku pada Tahun 2022 sebesar 54.650,43 Milyar Rupiah berada pada peringkat kedua jika dibandingkan Kabupaten Badung di Tahun 2022 yang sebesar 55.290,00 Milyar Rupiah. Tahun 2022 PDRB Kota Denpasar mengalami peningkatan menjadi 54.650,43 Milyar. Hal ini menunjukkan mulai ada perbaikan perekonomian semenjak adanya pandemi di tahun 2020 khususnya di Kota Denpasar walaupun secara keseluruhan di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari total 219.800,03 Milyar Rupiah di Tahun 2021 menjadi 245.233,24 Milyar Rupiah. Perkembangan PDRB Kota Denpasar disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun
2018 – 2022

Kabupaten/Kota	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	13.136,61	14.136,70	13.439,11	13.510,13	14 532,26
Kab. Tabanan	22.127,88	23.795,93	22.257,58	22.010,14	23 681,30
Kab. Badung	57.791,25	62.836,11	49.014,03	44.803,89	55 290,00
Kab. Gianyar	26.460,40	28.520,28	25.865,37	25.836,19	27 944,21
Kab. Klungkung	8.459,34	9.099,50	8.450,67	8.529,43	9 210,21
Kab. Bangli	6.490,23	6.993,64	6.716,21	6.799,14	7 337,51
Kab. Karangasem	15.886,26	17.086,88	16.407,77	16.487,62	17 669,49
Kab. Buleleng	32.926,63	35.362,32	33.306,17	33.337,29	35 805,28
Kota Denpasar	51.374,78	55.456,04	49.558,96	49.588,38	54 650,43
Provinsi Bali	233.636,77	251.934,10	223.900,89	219.800,03	245 233,24

Sumber : BPS Provinsi Bali

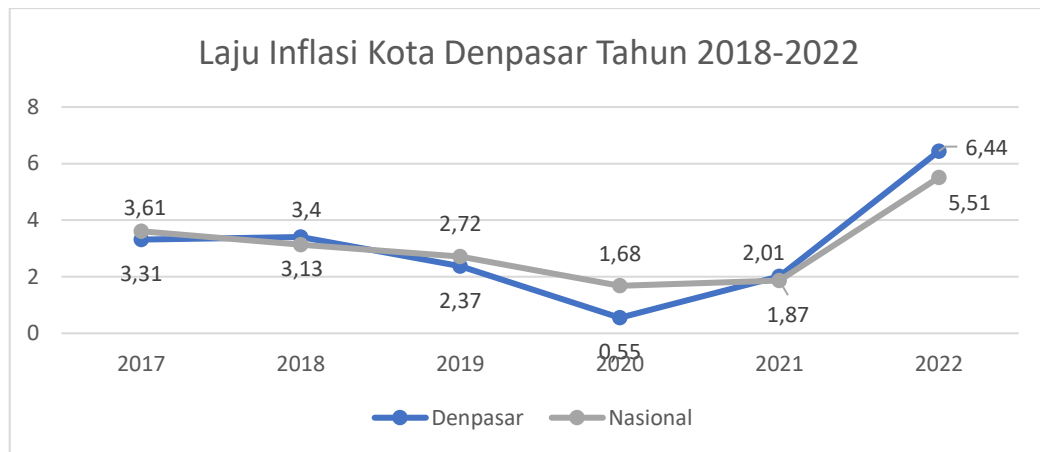
Tabel 3.4
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali
Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/Kota	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	8.924,38	9.420,44	8.951,35	8.892,80	9 157,67
Kab. Tabanan	14.949,32	15.783,04	14.808,65	14.516,58	14 942,44
Kab. Badung	35.275,42	37.326,47	31.147,82	29.049,52	31 946,55
Kab. Gianyar	18.027,09	19.040,90	17.441,75	17.254,61	17 956,69
Kab. Klungkung	5.682,94	5.990,94	5.608,69	5.595,88	5 770,48
Kab. Bangli	4.350,14	4.587,22	4.399,24	4.384,70	4 507,10
Kab. Karangasem	10.550,25	11.130,34	10.630,37	10.570,60	10 843,41
Kab. Buleleng	22.201,45	23.425,32	22.066,16	21.797,73	22 463,38
Kota Denpasar	34.166,04	36.154,42	32.745,22	32.447,06	34 082,91
Provinsi Bali	154.072,66	162.693,36	147.521,41	143.870,40	150 821,44

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.3. Laju Inflasi

Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,43% dari tahun 2021 menjadi 6,44%. Sedangkan pada Tahun 2020 Inflasi Kota Denpasar tercatat sebesar 0,55% dampak terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 3.2
Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2017-2022

Inflasi pada tahun 2022 tertinggi terjadi pada kelompok Transportasi, sebesar 15,15%, sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,02%. Kondisi ini diakibatkan oleh di cabutnya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemi covid-19 seperti PKM, penutupan destinasi pariwisata sehingga perekonomian di Kota Denpasar mulai bergerak.

Tabel 3.2
Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022

11 Kelompok Pengeluaran Inflasi	Inflasi Tahunan Kota Denpasar Menurut 11 Kelompok Pengeluaran (Persen) 2022
Makanan, Minuman, dan Tembakau	6.70
Pakaian dan Alas Kaki	1.18
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah tangga	4.60
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	8.63
Kesehatan	2.78
Transportasi	15.15
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-1.02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	5.99
Pendidikan	3.64
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	5.82

11 Kelompok Pengeluaran Inflasi	Inflasi Tahunan Kota Denpasar Menurut 11 Kelompok Pengeluaran (Persen) 2022
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8.49
Umum	6.44

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.4. Gini Rasio

Gini Rasio / Indek Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di suatu daerah. Suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Gini Rasio mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Gini Rasio makin mendekati satu. Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Gini Rasio adalah sebagai berikut :

1. Gini Rasio < 0.3 : ketimpangan rendah.
2. $0.3 \leq \text{Gini Rasio} \leq 0.5$: ketimpangan sedang.
3. Gini Rasio > 0.5 : ketimpangan tinggi.

Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2022 sebesar 0,3680 sedikit lebih tinggi sedikit dibandingkan Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2022 sebesar 0,3630. Artinya distribusi pendapatan di Kota Denpasar lebih timpang jika dibandingkan Gini Rasio di Provinsi Bali. Berikut disajikan Gini Rasio Kabupaten/Kota se Provinsi Bali dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

Tabel 3.3
Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022

Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota						
Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	0.3170	0.3272	0.2903	0.3531	0.3170	0.3260
Kab. Tabanan	0.3108	0.3249	0.3080	0.3239	0.3110	0.2990
Kab. Badung	0.3190	0.3392	0.3244	0.3167	0.3320	0.3160
Kab. Gianyar	0.2682	0.3050	0.2866	0.3171	0.3330	0.3070
Kab. Klungkung	0.3714	0.3915	0.3847	0.3575	0.3460	0.3510
Kab. Bangli	0.3005	0.3126	0.2744	0.2829	0.2850	0.2880
Kab. Karangasem	0.3232	0.3393	0.3125	0.3268	0.3180	0.2970
Kab. Buleleng	0.3086	0.3446	0.2847	0.2851	0.2820	0.2810
Kota Denpasar	0.3414	0.3422	0.3473	0.3301	0.3750	0.3680
Provinsi Bali	0.3840	0.3774	0.3662	0.3690	0.3780	0.3630

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.5. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar mengalami lonjakan cukup tinggi di tahun 2020, walaupun sudah mengalami tren penurunan yang cukup signifikan yaitu mencapai 5,08% pada Tahun 2022 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,02%. Namun, TPT Kota Denpasar masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Bali yang sebesar 4,80%. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Denpasar diantaranya yaitu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terutama generasi muda di Kota Denpasar dengan harapan nantinya dapat bersaing mengisi kesempatan kerja maupun menjadi wirausaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, Kota Denpasar menggelar Festival Kerja dengan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk memfasilitasi pekerja yang terkena PHK sebelumnya yang diakibatkan masa pandemi dan belum mendapat pekerjaan. Selain menyediakan lowongan kerja, program ini juga diiringi dengan pelatihan pemasaran dan strategi usaha berbasis digital sehingga dengan dapat membangkitkan potensi wirausaha dan diharapkan mampu merintis usahanya secara mandiri. Secara detail disampaikan TPT Kabupaten/Kota se Provinsi Bali pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017 – 2022

Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)						
Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	0.67	1.41	1.44	4.52	4.11	3.94
Kab. Tabanan	1.79	1.45	1.29	4.21	3.94	3.83
Kab. Badung	0.48	0.46	0.40	6.92	6.93	6.87
Kab. Gianyar	1.02	1.61	1.46	7.53	6.90	6.78
Kab. Klungkung	0.94	1.47	1.57	5.42	5.35	1.96
Kab. Bangli	0.48	0.81	0.75	1.86	1.80	0.76
Kab. Karangasem	0.72	1.03	0.62	2.42	2.32	3.09
Kab. Buleleng	2.41	1.88	3.12	5.19	5.38	5.20
Kota Denpasar	2.63	1.87	2.29	7.62	7.02	5.08
Provinsi Bali	1.48	1.40	1.57	5.63	5.37	4.80

Sumber : BPS Provinsi Bali

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Tahun 2022, TPAK Kota Denpasar sudah mencapai 72,37% walaupun masih dibawah TPAK Provinsi Bali sebesar 76,86%. Tahun 2022, TPAK Kota Denpasar terendah di provinsi Bali sebesar 72,37%

Tabel 3.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017 – 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)						
Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	78.62	77.30	67.36	75.92	81.26	80.60
Kab. Tabanan	71.33	77.29	75.42	75.47	74.98	76.93
Kab. Badung	70.43	71.15	72.60	72.69	72.52	72.80
Kab. Gianyar	78.17	78.96	76.11	71.27	69.88	80.26
Kab. Klungkung	77.07	77.87	76.05	75.27	72.83	79.81
Kab. Bangli	84.14	85.72	83.11	82.20	82.09	83.36
Kab. Karangasem	78.37	82.28	80.61	80.75	81.15	85.39
Kab. Buleleng	75.44	76.60	69.51	75.07	73.08	75.38
Kota Denpasar	73.91	73.52	71.70	70.91	68.67	72.37
Provinsi Bali	75.24	76.56	73.77	74.32	73.54	76.86

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.6. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Denpasar mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 0,01% menjadi sebesar 2,97% di Tahun 2022. Tingkat Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2022 masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2022.

Di Tahun 2022 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 2,97%. Tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Penyebab kemiskinan lebih didorong pada fasilitas infrastruktur yang dimiliki Kota Denpasar. Jumlah kaum migran yang cukup tinggi, sering menimbulkan masalah karena tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang memadai, sementara persaingan ekonomi cukup tinggi. Akibatnya pendatang justru membawa masalah pengangguran yang

berdampak pada kemiskinan penduduk. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022 disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2022

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota						
Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	5.38	5.20	4.88	4.51	5.06	5.30
Kab. Tabanan	4.92	4.46	4.21	4.27	5.12	5.18
Kab. Badung	2.06	1.98	1.78	2.02	2.62	2.53
Kab. Gianyar	4.46	4.19	3.88	4.08	4.85	4.70
Kab. Klungkung	6.29	5.86	5.40	4.87	5.64	6.07
Kab. Bangli	5.23	4.89	4.44	4.19	5.09	5.28
Kab. Karangasem	6.55	6.28	6.25	5.91	6.78	6.98
Kab. Buleleng	5.74	5.36	5.19	5.32	6.12	6.21
Kota Denpasar	2.27	2.24	2.10	2.14	2.96	2.97
Provinsi Bali	4.25	4.01	3.79	3.78	4.53	4.57

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2023 dan 2024

Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 menjadi 2,3% dari prakiraan sebelumnya sebesar 2,6%. Hal ini disebabkan oleh fragmentasi politik dan ekonomi yang belum usai serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Selain itu, koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dan disertai dengan meningkatnya risiko potensi resesi terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Pertumbuhan ekonomi Bali Tahun 2023 diproyeksikan mengalami perlambatan seiring dengan pengaruh *base effect* cukup tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, serta tertahannya tendensi perputaran ekonomi global akibat risiko resesi global dan konflik geopolitik yang berpotensi menahan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara. Kemudian, Pertumbuhan Ekonomi Bali diproyeksikan mengalami akselerasi pada 2024 pada rentang 4,90% - 5,70% di topan oleh prakiraan membaiknya situasi ekonomi dari sisi global serta tingkat kunjungan wisatawan Bali yang diharapkan sudah kembali pada level pre-pandemi pada 2024. Di sisi lain massive nya pembangunan infrastruktur di Bali dalam 3 tahun ke depan diperkirakan juga menjadi *source of growth* pertumbuhan ekonomi Bali.

Perbaikan kinerja perekonomian Denpasar didorong oleh relaksasi kebijakan mobilitas masyarakat, sehingga mendorong kinerja aktivitas pariwisata yang tercermin dari perbaikan Lapangan Usaha Akmamin dan Perdagangan. Perbaikan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan dan Konstruksi juga terakselerasi sejalan dengan proyek pembangunan pemerintah dan swasta, termasuk, fasilitas Pendidikan. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja perekonomian terutama bersumber dari tumbuhnya konsumsi swasta (konsumsi RT dan konsumsi LNPR) seiring dengan peningkatan permintaan agregat masyarakat akibat dilonggarkannya restriksi mobilitas dan insentif kebijakan fiskal. Berdasarkan hasil riset *Growth Strategy* dan KPJU, beberapa industri yang potensial menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kota Denpasar yaitu Perhiasan, Pengolahan Susu, Makanan lainnya, dan Industri Minuman.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2023 mencapai 5,16% tumbuh sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya. Kemudian, diproyeksikan mengalami akselerasi peningkatan sebesar 5,4% di Tahun 2024. Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja lapangan usaha yang terkait dengan pariwisata dan sejumlah proyek konstruksi yang dilaksanakan di Kota Denpasar.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, terdapat tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023. Pertama, adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dihadapkan pada tahun 2024 (kemiskinan ekstrem) bisa mencapai 0-1 persen, artinya tahun 2023 harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5-3 juta penduduk secara nasional. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan. Ketiga, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*. Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Keenam, ekonomi hijau. Mengingat Indonesia akan mencapai net-zero emission pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting

sebagai respons terhadap perubahan iklim. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Sasaran pembangunan nasional pada tahun 2023 meliputi: pertama pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35, serta tingkat kemiskinan 7-8 persen. Indikator pembangunan adalah nilai tukar petani (NTP) antara 103-105 dan nilai tukar nelayan (NTN) 105-107.

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah; nasional; dan internasional, secara makro pada tahun 2023 prospek pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar diprediksi secara perlahan mulai mengalami peningkatan. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kota Denpasar diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 3.7
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2023

No	Indikator Makro Ekonomi	Target 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,16%
2	Inflasi (%)	2,25%
3	Angka Kemiskinan (%)	2,01%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,18%
5	Indeks Pembangunan Manusia	84,35%
6	Gini Rasio / Indeks Gini	0,29

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan

dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Kebijakan keuangan daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari : (1) Pendapatan; (2) Belanja dan (3) Pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah satu instrumen dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disesuaikan dan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah yang dilakukan melalui mekanisme dan tahapan yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, APBD harus mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan dinamika kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat serta perlunya sinkronisasi kebijakan, isu-isu strategis, dan prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah sehingga APBD diharapkan menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Denpasar, oleh karena itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Pendapatan Daerah Kota Denpasar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan data Realisasi Pendapatan Daerah Kota Denpasar tahun 2022, Pendapatan Daerah Kota Denpasar terbesar bersumber dari Pendapatan Transfer yaitu sebesar Rp. 1.003.390.442.143,00 atau sebesar 57,53% dari keseluruhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Denpasar di tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan di Kota Denpasar.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar terbagi atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Akibat Pandemi COVID-19, Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2020 berkontraksi sampai sebesar -9,42% di tahun 2020 dan PAD Kota Denpasar mengalami penurunan yang signifikan sebesar 27,65% dari tahun 2019 sebesar Rp. 1.010.669.179.532,63 menjadi sebesar Rp. 731.261.280.905,53 di tahun 2020.

Pada tahun 2023 ini tepatnya di bulan Juni Indonesia mulai memasuki masa Endemi COVID-19, hal tersebut diharapkan dapat membuat Kontribusi PAD Kota Denpasar tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya selama masa Pandemi COVID-19. Tahun 2023 Kontribusi PAD Kota Denpasar di proyeksikan meningkat dari target induk 2023 sebesar Rp.115.090.336.684 menjadi Rp.1.014.585.996.283

Pendapatan Pajak Daerah masih menjadi penyumbang terbesar bagi PAD Kota Denpasar, walaupun mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19. Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2023 di targetkan meningkat sebesar Rp.107.748.394.912 menjadi sebesar Rp.821.000.000.000.

Pajak Daerah pada tahun 2023 diproyeksikan meningkat sebesar 47,74% dibandingkan target Pajak Daerah tahun 2022, menjadi Rp. 821.000.000.000. Tahun 2023, diproyeksikan kondisi pariwisata di Kota Denpasar sudah semakin membaik sehingga penerimaan pajak hotel di tahun 2023 diproyeksikan dapat optimal. Serta, tumbuhnya industri kuliner di Kota Denpasar dalam beberapa waktu terakhir, diproyeksikan dapat berkontribusi besar pada penerimaan pajak restoran di tahun 2023. Pajak Daerah di tahun 2023 diproyeksikan akan berkontribusi sebesar 81,10% terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp Rp.1.014.585.996.283.

Melihat dibukanya kembali pariwisata dan meningkatnya produktivitas di Kota Denpasar, PAD Kota Denpasar diharapkan dapat dioptimalkan sejalan dengan peningkatan perekonomian Kota Denpasar. Untuk mengoptimalkan potensi PAD, serta meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, arah kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
2. Peningkatan kualitas data wajib pajak
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber potensi PAD

Pemanfaatan teknologi merupakan prioritas utama yang akan dilakukan dalam upaya mengoptimalkan potensi PAD Kota Denpasar. Diharapkan dengan penggunaan kanal-kanal digital dalam pembayaran Pajak dan Retribusi dapat mempermudah masyarakat melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD Kota Denpasar.

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer masih diproyeksikan sebagai sumber terbesar Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Tahun 2023, Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp. 1.221.220.309.151 dengan proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.029.562.750.000 serta Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 191.657.559.151.

Proyeksi Pendapatan Transfer mencapai 54,12% dari keseluruhan proyeksi Pendapatan Daerah, dengan kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 45,62% terhadap Pendapatan Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Umum diproyeksikan sama dengan target tahun 2023 sebesar Rp. 633.386.906.000 serta Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan sebesar Rp. 222.757.392.000. Besarnya kontribusi proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Pendapatan Daerah menggambarkan bahwa untuk melaksanakan pembangunan di Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar masih membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar dari Pemerintah Pusat terutama untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional di Kota Denpasar.

Secara terinci, realisasi, target dan proyeksi pendapatan Kota Denpasar disampaikan pada tabel berikut

Tabel 3.8
Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	899.495.659.600	1.014.585.996.283	115.090.336.684
4.1.01	Pajak Daerah	713.251.605.088	821.000.000.000	107.748.394.912
4.1.02	Retribusi Daerah	19.447.424.196	19.652.005.200	204.581.004
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53.256.529.836	55.711.576.103	2.455.046.268
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	113.540.100.480	118.222.414.980	4.682.314.500
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.216.217.988.130	1.221.220.309.151	5.002.321.021
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.029.548.033.000	1.029.562.750.000	14.717.000

KODE	URAIAN	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	186.669.955.130	191.657.559.151	4.987.604.021
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.871.418.000	20.689.330.230	6.817.912.230
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.871.418.000	20.689.330.230	6.817.912.230
	Jumlah Pendapatan	2.129.585.065.730	2.256.495.635.664	126.910.569.935

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Berpedoman kepada Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Denpasar Maju”, Kebijakan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Diarahkan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Denpasar
2. Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023;

3. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
5. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah di jajaran pemerintah Kota Denpasar.
6. Meningkatkan efesiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefesiensian keuangan daerah.

Proporsi Belanja Operasi pada tahun 2023 diproyeksikan meningkat sebesar Rp.114.410.180.272 menjadi sebesar Rp.1.958.257.145.570. Pada tahun 2023, Belanja Pegawai diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp.1.377.099.580. Proporsi Belanja Hibah pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 174.380.641.995.

Belanja Modal pada tahun 2023 diproyeksikan meningkat yaitu sebesar Rp.94.084.876.130 menjadi sebesar Rp.403.755.750.283 yang dialokasikan sebagian besar untuk pemenuhan kebutuhan Ruang Kelas pada Sekolah Dasar, serta perbaikan infrastruktur jalan, yang merupakan prioritas pembangunan tahun 2023. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 diproyeksikan naik sebesar Rp. 83.975.230.337 menjadi sebesar Rp. 112.869.488.316.

Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja wajib terkait Kesehatan meliputi kegiatan operasional RSUD Wangaya dan 11 Puskesmas, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan. Pada

APBD tahun 2023 alokasi bidang Kesehatan terhitung sebesar 18,92%. Alokasi bidang Kesehatan di RKPD perubahan sebesar 20,02%.

Untuk pemenuhan belanja wajib terkait Pendidikan Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Pendidikan di APBD Induk Tahun 2023 teralokasi sebesar 27,58%, sedang di RKPD Perubahan teralokasikan sebesar 24,78%.

Pemenuhan belanja infrastruktur sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) pasal pasal 147 menyebutkan Alokasi anggaran infrastruktur diarahkan menuju pemenuhan alokasi anggaran infrastruktur publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan yaitu pada tanggal 5 Januari 2022. Pada APBD Tahun 2023 alokasi belanja Infrastruktur sebesar 21,77% sedang pada RKPD Perubahan sebesar 23,50%.

Kabupaten/kota yang memiliki Desa wajib memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD. Formulasinya = $10\% \times (\text{DAU} + \text{DBH (diluar DBH CHT)})$. Nilai ADD wajib dianggarkan sesuai ketentuan oleh pemerintah daerah agar tidak berimbas pada penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan ke daerah, untuk itu Pemerintah Kota Denpasar dalam RKPD Perubahan tetap menjaga alokasi ADD sebesar 10%.

Secara terinci, proyeksi belanja daerah tahun 2023 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Proyeksi/Target Belanja Kota Denpasar Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.843.846.965.298	1.958.257.145.570	114.410.180.272
5.1.01	Belanja Pegawai	899.077.793.104	897.700.693.524	-1.377.099.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	805.563.030.869	882.593.360.051	77.030.329.182
5.1.05	Belanja Hibah	136.458.691.325	174.380.641.995	37.921.950.670
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.747.450.000	3.582.450.000	835.000.000
5.2	BELANJA MODAL	309.670.874.153	403.755.750.283	94.084.876.130
5.2.01	Belanja Modal Tanah	346.500.000	18.346.500.000	18.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.625.270.438	73.135.085.930	30.509.815.492
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.989.744.826	173.161.097.926	12.171.353.100
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.668.990.889	122.369.687.927	34.700.697.038
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.040.368.000	16.642.378.500	-1.397.989.500
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	101.000.000	101.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	28.894.257.979	112.869.488.316	83.975.230.337
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	28.894.257.979	112.869.488.316	83.975.230.337
5.4	BELANJA TRANSFER	177.584.904.000	205.477.180.720	27.892.276.720
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	73.271.000.000	84.065.200.520	10.794.200.520
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	104.313.904.000	121.411.980.200	17.098.076.200
	Jumlah Belanja	2.359.997.001.430	2.680.359.564.889	320.362.563.459

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo,

pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 3.10

Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	234.988.340.789	448.940.334.313	213.951.993.525
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	234.988.340.789	448.940.334.313	213.951.993.525
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	234.988.340.789	448.940.334.313	213.951.993.525
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.576.405.088	25.076.405.088	20.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.576.405.088	25.076.405.088	20.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.576.405.088	25.076.405.088	20.500.000.000
	Pembiayaan Netto	230.411.935.701	423.863.929.225	193.451.993.525

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Perubahan Semester Berencana Kota Denpasar Tahun 2023 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target/capaian kinerja atas janji dan visi misi Pemerintah Kota Denpasar, berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi Kota Denpasar Tahun 2021-**2026** adalah **"KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU"** dengan misi pembangunan Kota Denpasar sebagai berikut:

1. Meningkatkan KeMAKMURan Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan;
2. Menjaga Stabilitas KeAMANan dengan Terkendalnya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana;
3. KeJUJURan dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance);
4. UNGGUL dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana;
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan KeBUDAYAan Bali.

Adapun tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan masing – masing misi dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Kota Denpasar disertai target capaian di tahun 2023 secara terinci disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,779
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	75,46
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan	2.422.121
		Mengurangi kemiskinan	Angka Kemiskinan	2,01%
Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Persentase penegakan PERDA	89,34%
		Menurunnya kasus kriminalitas	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	105,63
		Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	93,7
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana	98,72
Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM	88,16
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat SAKIP	A (80,01)
			Opini BPK	WTP

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
yang Baik (Good Governance)				
Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18%
		Optimalnya pemanfaatan teknologi	Indeks SPBE	3,7
		Meningkatnya inovasi daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
	Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis tri hita karana	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	60,47%
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,95
Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	68,54

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha; Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Adapun Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional sebagaimana disebutkan pada RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Insfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhumkam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.2. Paradigma Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/ menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

1. Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala Niskala

Pembangunan yang mengandung dimensi sakala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.

2. Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3. Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/ Kota se-Bali secara parsial dengan

tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan. Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarnya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

4. Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5. Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

6. Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

7. Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam nindihin Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara Genuine Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

Pembangunan Provinsi Bali tahun 2023 dalam mewujudkan Visi **"Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana"** mengambil tema **"Mewujudkan Transformasi Ekonomi**

Bali: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera” dengan agenda prioritas pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Pangan, Sandang dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata
6. Penguatan Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023

Dalam pencapaian target-target kinerja pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah, ditetapkan prioritas pembangunan yang disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya yang disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Bali tahun 2023.

Sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan, ditetapkan Tema **Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Denpasar Maju” dengan 5 Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023** ditetapkan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Sosial dan Ketenagakerjaan
3. Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan
4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
5. Reformasi Birokrasi

4.2.4. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023

Dalam pelaksanaan pembangunan keterpaduan pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Sinergi pusat-daerah dan antar daerah terus dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah.

Transformasi ekonomi yang menjadi kata kunci Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali di tahun 2023, diwujudkan dengan diversifikasi sektor perekonomian di Kota Denpasar dengan melihat potensi UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar disamping sektor pariwisata. Dengan upaya meningkatkan potensi UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lain untuk mewujudkan Denpasar Maju.

Tabel 4.2
Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar
Tahun 2023

TEMA PEMBANGUNAN		
NASIONAL	PROVINSI BALI	KOTA DENPASAR
Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Bali : Hijau, Tangguh, Dan Sejahtera	Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Denpasar Maju

Berikut disampaikan secara terinci keselarasan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 dikaitkan dengan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 4.3
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Kota Denpasar
Tahun 2023

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat
	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatkan ketahanan pangan
PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan
		Mengurangi pengangguran
PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya inovasi daerah
	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pembangunan kebudayaan
	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
PN 5: Memperkuat Insfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
		Optimalnya pemanfaatan teknologi
PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhumkam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda
		Menurunnya kasus kriminalitas
	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023 dikaitkan dengan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.4
Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Provinsi Bali	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
Pangan, Sandang dan Papan	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatkan ketahanan pangan
	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan
	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat
Kesehatan dan Pendidikan	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi pengangguran
Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pembangunan kebudayaan
Pariwisata	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat
	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Menurunnya kasus kriminalitas
Penguatan Infrastruktur	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
		Optimalnya pemanfaatan teknologi
		Meningkatnya inovasi daerah
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda
	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

4.3. Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Berikut merupakan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran pembangunan daerah beserta target capaiannya di tahun 2023

Tabel 4.5
Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran serta Target Capaian Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2023
1.	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,779
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	75,46
2.	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan	Angka Kemiskinan	2,01%
		Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18%
3.	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan	2.422.121
		Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	68,54
4.	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	60,47%
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,95
		Optimalnya pemanfaatan teknologi	Indeks SPBE	3,7
		Meningkatnya inovasi daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
		Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Persentase penegakan PERDA	89,34%
		Menurunnya kasus kriminalitas	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	105,63
		Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	93,7

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Target 2023
5.	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM	88,16
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat SAKIP	A (80,01)
			Opini BPK	WTP

Dalam mendukung pencapaian sasaran daerah yang menjadi prioritas pembangunan Kota Denpasar, dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut:

Tabel 4.6
Program Prioritas Kota Denpasar Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu
1	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	289.419.669.472
				Harapan Lama Sekolah	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	1.337.541.598
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	103.225.618.129
				Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	
				Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	
				Persentase Balita stunting	
				Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	
2	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	4.334.544.156
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase TPM Memenuhi syarat	824.037.500
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1.484.599.477
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	863.246.574
		Mengurangi pengangguran	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	539.018.478
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	1.906.159.152
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	2.481.067.100
				Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	3.845.772.090
3	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	466.937.586
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	149.517.337
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	410.169.767
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	110.774.950
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	324.611.050
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	354.700.000
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	5.165.058.000
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	826.611.849
			Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	845.661.079
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	1.274.123.728
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	51.566.240
		Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	39.845.673.984
			Program Pembinaan Sejarah	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	1.556.190.616
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	64.902.809
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Tahunan	1.008.373.594
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.264.676.460

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu
4	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	121.668.372.236
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	10.078.733.735
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	9.752.868.000
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	74.765.572.100
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	422.977.901
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	1.104.500.000
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	2.503.752.000
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	239.944.144
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kualitas air	506.330.531
				Persentase peningkatan kualitas udara	
				Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	17.101.927.892
				Persentase taman yang terpelihara	
			Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	137.090.513
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dikelola	62.839.522.109
		Optimalnya pemanfaatan teknologi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	3.239.829.928
		Meningkatnya inovasi daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	835.873.833

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu
				Persentase Penetapan Inovasi Daerah	
		Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	262.245.322
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.683.455.943
		Menurunnya kasus kriminalitas	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	443.661.722
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	808.438.235
		Meningkatkan ketahanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari)	471.437.729
				Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	
				Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari)	
				Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	
			Program Penanganan Kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan	230.555.289
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	69.132.113
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang baik	2.255.455.175
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	918.720.653
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	193.795.152
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi perikanan budidaya	575.719.096
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	138.429.882

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	1.757.390.646
				Persentase pelayanan penanggulangan bencana	
				Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	
			Program Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan penanganan bencana	60.935.060
5	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	1.007.899.419
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur	
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	216.298.071
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	10.031.412.789
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat	45.194.850
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas APIP	436.081.395
				Maturitas SPIP	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	514.233.357
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	2.605.970.293
				Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	1.467.119.371

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	Pagu
				Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	1.402.878.745
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit	3.926.994.187
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	320.162.418.088
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	21.388.323.460
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	2.740.918.250

4.4. Kebijakan Pembiayaan Alternatif Daerah

Pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. Dengan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar perlu dilakukan dengan langkah-langkah inovatif dengan melibatkan pihak-pihak swasta maupun masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang memadai merupakan salah satu layanan publik yang menjadi prioritas pembangunan Kota Denpasar, dengan salah satu fokusnya adalah ketersediaan Alat Penerangan Jalan yang sangat vital untuk mengatasi masalah keamanan dan keselamatan lalu lintas. Alat Penerangan Jalan yang saat ini sudah dimiliki oleh Kota Denpasar masih belum cukup memadai, terutama masih belum mencakup seluruh titik lokasi dan kawasan strategis di Kota Denpasar

Penyediaan air bersih juga merupakan salah satu isu strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Denpasar. Saat ini, cakupan ketersediaan jaringan air bersih belum dapat mengimbangi pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman yang meningkat pesat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar. Peningkatan cakupan ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kota Denpasar direncanakan dilakukan dengan strategi revitalisasi serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Denpasar.

Peningkatan layanan kesehatan terutama dalam pelayanan rawat jalan dan seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan Rawat Inap pada RSUD Wangaya yang dimana ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jejaring Pelayanan Stroke dan Kardiovaskular dirasa perlu dilakukannya penambahan fasilitas untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Selain menjawab kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, perubahan regulasi terkait penyelenggaraan rumah sakit, persyaratan standar sarana dan prasarana rumah sakit juga menjadi dasar

pertimbangan diperlukannya pengembangan rumah sakit dan penambahan layanan khusus geriatri atau layanan khusus lansia.

Karena keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah Kota Denpasar untuk dapat menyediakan infrastruktur yang memadai dalam pemenuhan Alat Penerangan Jalan, Sistem Penyediaan Air Minum serta Peningkatan Layanan Rumah Sakit di Kota Denpasar yang membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar, pada tahun 2023 Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan skema Pembayaran Berdasarkan Ketersediaan Layanan atau yang biasa dikenal dengan Availability Payment dan berdasarkan Tarif (*user charge*) lewat proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

4.5. Kebijakan Daerah dalam Penanganan Dampak Pasca Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020, membawa dampak pada semua dimensi kehidupan, baik sektor kesehatan, sosial dan perekonomian. Terkendalnya laju kasus pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini telah mendorong perbaikan kondisi perekonomian Kota Denpasar yang ditandai dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi diatas 5% hingga kuartal keempat tahun 2022. Pondasi perekonomian Kota Denpasar juga kian menguat dengan adanya dukungan peningkatan investasi dan konsumsi masyarakat.

Ancaman resesi ekonomi global dan pengendalian tingkat inflasi pasca pandemi juga menjadi fokus utama pembangunan Kota Denpasar dengan laju inflasi Kota Denpasar pada Mei 2023 berada di angka 4,09% yoy dan diharapkan dapat dikendalikan di angka 2,25% pada akhir Tahun 2023 secara year on year. Penanganan inflasi di Kota Denpasar dengan menjaga stabilitasi harga, memperkuat produksi cadangan pemerintah, penguatan kerjasama antar daerah, serta meningkatkan komunikasi kordinasi antar stakeholder terkait.

Dengan tetap pemulihan ekonomi menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kota Denpasar di Tahun 2023 dan diharapkan Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dapat tumbuh hingga 5,16%. Strategi pemulihan ekonomi di sektor pariwisata sebagai sektor utama perekonomian Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan event-event tahunan Kota Denpasar yang pelaksanaannya tahun sebelumnya tidak optimal akibat Pandemi COVID-19, seperti **misalnya pelaksanaan D'Youth Festival** dan Denpasar Festival.
2. Melaksanakan event-event budaya sebagai daya tarik wisata Kota Denpasar. Event-event budaya direncanakan akan digelar secara rutin sepanjang tahun 2023 dengan tema yang beragam.
3. Melakukan penataan wajah kota dan perbaikan infrastruktur-infrastruktur yang mendukung pariwisata.
4. Melakukan promosi pariwisata terutama mengenai kesiapan Kota Denpasar dalam menyambut wisatawan pasca pandemi COVID-19.

Karena kerentanan sektor pariwisata, Kota Denpasar juga mengembangkan potensi perekonomian lainnya dalam upaya memulihkan perekonomian Kota Denpasar pasca Pandemi COVID-19. UMKM dan ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi sektor alternatif bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, melihat potensi pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Denpasar.
2. Penguatan UMKM Kota Denpasar untuk dapat bersaing memasuki pasar digital dalam perluasan pasar produk-produk UMKM Kota Denpasar
3. Peningkatan investasi dengan mempermudah berbagai proses perijinan usaha.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Usulan Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kota Denpasar dialokasikan bertambah sebesar Rp.320.362.563.459 dari APBD Kota Denpasar Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 2.680.359.564.889.

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023

Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan rincian sebagai berikut

5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terbagi menjadi 6 bidang urusan, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pagu usulan yang dialokasikan untuk urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bertambah sebesar Rp. 9.581.030.223 menjadi sebesar Rp. 634.648.346.231 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan merupakan program prioritas dengan pagu usulan sebesar Rp. 393.883.602.045 bertambah sebesar Rp. 27.305.362.809

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dialokasikan sebesar Rp. 216.663.823.017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bertambah sebesar Rp. 46.864.091.416

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dialokasikan bertambah sebesar Rp. 26.093.036.275 menjadi sebesar Rp.90.687.529.259 yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan pagu usulan sebesar Rp.58.034.211.998 bertambah sebesar Rp.9.703.469.248

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dialokasikan sebesar Rp.15.912.282.803 bertambah sebesar Rp.1.241.242.971.

5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi dialokasikan bertambah sebesar Rp. 1.394.248.000 menjadi sebesar Rp. 11.634.186.594.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pagu usulan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana dialokasikan bertambah sebesar Rp.836.007.338 menjadi Rp.13.453.530.242

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pagu usulan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dialokasikan bertambah sebesar Rp. 191.944.961 yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan menjadi sebesar Rp. 771.125.131

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan. Pagu usulan dialokasikan bertambah sebesar Rp. 191.322.438 menjadi sebesar Rp. 515.427.213

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan, pagu usulan dialokasikan berkurang sebesar Rp.1.323.380.404 menjadi sebesar Rp.145.167.613.523.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, pagu usulan pada Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dialokasikan bertambah sebesar Rp. 10.249.723.840 menjadi sebesar Rp. 25.116.248.732

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pagu usulan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dialokasikan bertambah Rp.1.965.727.021 menjadi sebesar Rp.11.809.984.115

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu usulan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dialokasikan berkurang sebesar Rp.10.995.680 sehingga menjadi Rp.7.324.347.050 Urusan Pemerintahan

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pagu usulan yang dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan bertambah sebesar Rp.6.541.619.011 menjadi sebesar Rp.65.775.996.835 diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dengan alokasi pagu usulan bertambah sebesar Rp. 781.205.815 menjadi Rp. 14.208.308.249 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pagu usulan yang dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bertambah sebesar Rp. 733.479.585 menjadi sebesar Rp. 8.631.736.275 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Pagu usulan yang dialokasikan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal bertambah sebesar Rp. 310.877.620 menjadi sebesar Rp. 25.005.943.994 Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga dialokasikan sebesar Rp.29.601.183.279 bertambah sebesar Rp.3.820.398.436

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dialokasikan sebesar Rp. 41.750.000 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dialokasikan bertambah sebesar Rp.7.350.000 menjadi sebesar Rp. 275.700.000 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dengan pagu usulan dialokasikan bertambah sebesar Rp.11.084.701.697 menjadi sebesar Rp.50.882.254.380

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dengan pagu usulan dialokasikan bertambah sebesar Rp.807.869.439 menjadi sebesar Rp.11.623.305.630

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan alokasi pagu usulan sebesar Rp.155.537.439.

5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pagu usulan yang dialokasikan untuk melaksanakan urusan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan bertambah sebesar Rp.574.425.968 menjadi sebesar Rp.10.516.351.285 yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pagu usulan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dialokasikan bertambah sebesar Rp.5.822.666.279 menjadi Rp.25.325.102.064 Usulan Belanja pada Urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata ini sebagian besar dialokasikan untuk pelaksanaan Denpasar Festival sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat terdampak Pandemi COVID-19.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian oleh Dinas Pertanian bertambah sebesar Rp.275.235.273 menjadi Rp.18.261.059.606

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Pagu usulan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertambah sebesar Rp. 94.986.580 menjadi sebesar Rp.2.542.514.072.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pagu usulan yang dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertambah sebesar Rp.148.082.988 menjadi sebesar Rp.12.825.881.728.

5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri atas 2 unsur yaitu

1. Sekretariat Daerah

Pagu usulan yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan bertambah sebesar Rp.15.070.249.973 menjadi sebesar Rp. 101.503.938.004

2. Sekretariat DPRD

Pagu usulan yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan bertambah sebesar Rp. 5.329.432.064 menjadi sebesar Rp. 98.771.800.750

5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar terdiri atas 5 unsur yaitu

1. Perencanaan

Pagu usulan untuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertambah sebesar Rp. 1.465.611.988 menjadi Rp. 13.046.224.308

2. Keuangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Pagu usulan yang dialokasikan bertambah sebesar Rp.122.379.263.258 menjadi Rp. 394.589.450.936 sebagian besar untuk Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan pasca Pandemi COVID-19 serta Belanja Transfer Daerah.

3. Kepegawaian

Pagu usulan untuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dialokasikan berkurang sebesar Rp.200.134.975 menjadi Rp. 12.813.774.265.

4. Pendidikan Dan Pelatihan

Pagu usulan untuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dialokasikan bertambah sebesar Rp.60.000.000 menjadi sebesar Rp. 3.926.994.187.

5. Penelitian Dan Pengembangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian Dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan dialokasikan bertambah sebesar Rp. 259.427.714 menjadi sebesar Rp. 8.724.847.996

5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah

Pagu usulan yang dialokasikan untuk Inspektorat Daerah bertambah sebesar Rp. 231.676.217 menjadi sebesar Rp. 22.391.205.354

5.1.7. Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan

Pagu usulan yang dialokasikan untuk Unsur Kewilayahan bertambah sebesar Rp. 8.335.686.390 menjadi Rp. 90.796.916.322

5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pagu usulan yang dialokasikan untuk Unsur Pemerintahan Umum yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertambah Rp. 2.123.630.323 menjadi Rp. 32.499.529.978.

Pagu Usulan berdasarkan Urusan Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Perubahan Plafon Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan

KODE	BIDANG URUSAN	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023
1	2	3	4
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	625.067.316.008	634.648.346.231
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	366.578.239.236	393.883.602.045
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	169.799.731.601	216.663.823.017
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	64.594.492.984	90.687.529.259
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	48.330.742.750	58.034.211.998
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	14.671.039.832	15.912.282.803
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	10.239.938.594	11.634.186.594

KODE	BIDANG URUSAN	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023
1	2	3	4
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.617.522.904	13.453.530.242
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	579.180.170	771.125.131
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	324.104.775	515.427.213
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	146.490.993.927	145.167.613.523
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.866.524.892	25.116.248.732
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.844.257.094	11.809.984.115
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.313.351.370	7.324.347.050
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	59.234.377.824	65.775.996.835
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.427.102.434	14.208.308.249
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.898.256.690	8.631.736.275
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	24.695.066.374	25.005.943.994
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	25.780.784.843	29.601.183.279
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	41.750.000	41.750.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	268.350.000	275.700.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	39.797.552.683	50.882.254.380
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	10.815.436.191	11.623.305.630
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	155.537.439	155.537.439
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.941.925.317	10.516.351.285
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	19.502.435.785	25.325.102.064
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	17.985.824.333	18.261.059.606
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.447.527.492	2.542.514.072

KODE	BIDANG URUSAN	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023
1	2	3	4
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	12.677.798.740	12.825.881.728
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	86.433.688.031	101.503.938.004
4.02	SEKRETARIAT DPRD	93.442.368.686	98.771.800.750
5.01	PERENCANAAN	11.580.612.320	13.046.224.308
5.02	KEUANGAN	272.210.187.678	394.589.450.936
5.03	KEPEGAWAIAN	13.013.909.240	12.813.774.265
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.866.994.187	3.926.994.187
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.465.420.282	8.724.847.996
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.159.529.137	22.391.205.354
7.01	KECAMATAN	82.461.229.932	90.796.916.322
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.375.899.655	32.499.529.978
		2.359.997.001.430	2.680.359.564.889

5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2023

Rencana Program Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2023 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel 5.2 tentang Program dan Kegiatan.

Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif														
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1																			
1	01					642,098,597,785	625,067,316,008	634.648.346.231						740,185,925,784					
1	01	01				360,584,414,135	344,453,135,336	345.074.335.306						416,657,601,019					
1	01	01	2.02			347,018,620,083	330,711,191,929	330.711.191.929						398,027,478,695					
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3119 Orang/bulan	3119 Orang/bulan	347,018,620,083	330,711,191,929	330.711.191.929	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; DAK Non Fisik-TPG PNSD; DAK Non Fisik-Tamrel Guru PNSD	Rutin	ASN Dinas Pendidikan Kota Denpasar	3119 Orang/bulan	398,027,478,695	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	01	2.06																
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	49,459,464	49,455,432	49.455.432	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	9 Paket	54,405,410	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	375,121,648	640,554,589	640.554.589	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	5 Paket	4,126,338,128	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	58,079,760	58,901,183	58.901.183	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	17 Paket	58,079,760	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	260,210,000	267,256,297	267.256.297	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	7 Paket	328,031,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	56,388,000	56,388,000	56.388.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	4 Dokumen	62,026,800	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	33,650,000	33,640,000	33.640.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	1 Laporan	26,026,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	01	2.07																
1	01	01	2.07	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	125,000,000	83,246,150	83.246.150						100 %	140,800,000	
1	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	105,000,000	63,246,150	63.246.150	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	6 Unit	118,800,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	1 Unit	22,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	01	2.08																
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	11,885,397,356	11,861,276,756	12.346.536.726						100 %	13,038,477,188	
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	15.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Pendidikan, Korwil Kecamatan, SKB	1 Laporan	16,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1,380,000,000	1,373,070,000	1.373.070.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Pendidikan, Korwil Kecamatan, SKB	1 Laporan	1,420,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	65,032,600	10,376,000	10.376.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Pendidikan, Korwil Kecamatan, SKB	1 Laporan	71,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	10,425,364,756	10,462,830,756	10.948.090.726	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Pendidikan, Korwil Kecamatan, SKB	1 Laporan	11,530,477,188	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	01	2.09																
1	01	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	722,487,824	691,225,000	827.165.000						100 %	795,938,038	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30,500,000	42,500,000	42.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	1 Unit	33,550,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	68 Unit	329,437,824	343,905,000	418.905.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	68 Unit	363,683,038	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	293 Unit	341 Unit	311,550,000	253,820,000	284.760.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	341 Unit	342,705,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu indikatif					
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	9 Unit	51,000,000	51,000,000	81.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Korwil Kecamatan, SKB	9 Unit	56,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama sekolah	11,60; 14,03		281,347,239,550	280,459,839,219	289,419,669,472						323,345,794,085					
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI; Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI		103.5 %; 97 %	179,978,750,874	182,123,951,364	189,675,832,748						103.5 %; 97 %	207,686,790,268				
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		165 Ruang	77,140,014,200	75,870,529,221	76,837,529,221	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	165 Ruang	93,786,932,288	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		1 Ruang	0	0	126.016.738	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	1 Ruang	138,729,950	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		1 Ruang	0	0	275.368.713	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	1 Ruang	303,017,123	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		7 Unit	1,494,605,100	3,746,095,893	2,839,620.587	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD; Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	7 Unit	1,809,065,610	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat Kelas		18 Ruang	1,486,218,000	1,310,154,948	3,928.309.896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	18 Ruang	1,520,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Ruang	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	1 Ruang	54,221,453	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		1 Unit	103,856,400	219,223,625	219.223.625	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	1 Unit	114,242,040	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		25 Paket	512,031,248	511,845,032	7.736.605.532	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	25 Paket	572,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		1 Paket	161,500,000	161,486,500	161.486.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	1 Paket	161,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik; Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		215 Peserta Didik; 0 Peserta Didik	402,464,726	399,026,945	399.026.945	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	215 Peserta Didik; 0 Peserta Didik	1,018,879,186	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		6 Paket	354,481,100	314,338,954	693.979.177	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	6 Paket	395,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		167 Satuan Pendidikan	190,914,200	181,200,822	181.200.822	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	167 Satuan Pendidikan	374,846,340	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		400 Peserta Didik	492,758,500	475,574,164	475.574.164	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	400 Peserta Didik	554,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		596 Orang	11,075,626,320	19,157,747,920	15.463.713.856	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	596 Orang	11,075,626,320	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		300 Orang	33,377,400	18,390,059	18.390.059	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	300 Orang	7,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		214 Satuan Pendidikan	86,530,903,680	79,758,337,281	79.758.337.281	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAK Non Fisik-BOS Reguler; DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	214 Satuan Pendidikan	95,184,018,028	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif									Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	0	0	561.449.632	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisk-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar	2 Ruang	617.711,930	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs; APM SMP/MTs	93 %; 80 %	80,480,588,244	79,042,962,219	79.710.759.091						93 %; 80 %	93,817,165,159					
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	20,145,000,000	20,145,000,000	21.777.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	1 Unit	22,159,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	0	0	99.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	9 Ruang	108,900,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0	0	716.884.632	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisk-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	2 Ruang	788.573,095	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	0	0	1.506.919.138	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisk-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	8 Unit	1,657,611,051	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	0	49.292.230	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisk-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	1 Ruang	54,221,453	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0	0	218.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	1 Ruang	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang	436,000,000	2,709,096,000	654.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisk-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP; Dana Insentif Daerah		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	3 ruang	479,600,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	0	0	654.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendidikan dan Kesehatan;	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	3 Unit	700,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15 Paket	2,346,763,160	2,343,236,978	2.389.096.442	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	15 Paket	2,581,439,476	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	750,998,400	436,348,133	436.348.133	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	1 Paket	826,098,460	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	435 Peserta Didik	988,204,200	1,363,030,197	1.363.030.197	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	435 Peserta Didik	1,087,025,720	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	654,944,080	569,859,749	569.859.749	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	4 Paket	500,438,510	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	15000 Peserta Didik	425,345,500	405,552,743	405.552.743	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	15000 Peserta Didik	467,883,350	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	870 Peserta Didik	340,879,400	363,051,008	363.051.008	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	870 Peserta Didik	374,967,340	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	158 Orang	3,797,382,304	6,503,086,195	4.101.558.703	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	158 Orang	6,159,655,884	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	5,988,400	4,722,511	206.687.411	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	100 Orang	3,260,840	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	85 Satuan Pendidikan	66,321,700	57,740,605	57.740.605	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	85 Satuan Pendidikan	72,953,870	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	68 Satuan Pendidikan	50,522,760,100	44,142,238,100	44.142.238.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisk-BOS Reguler; DAK Non Fisk-BOS Kinerja		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan SMP di Kota Denpasar	68 Satuan Pendidikan	55,575,036,110	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	62.5 %	17,422,012,532	16,063,556,855	16.803.708.889						62.5 %	18,359,723,968					
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	0	0	150.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	1 Unit	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0	0	315.360.630	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	1 Unit	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	201,276,900	200,177,760	200.177.760	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	1 Paket	221,404,700	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	254,650,000	228,261,746	228.261.746	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	3 Paket	280,115,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	328 Peserta Didik	300,000,000	290,654,940	469.936.140	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	328 Peserta Didik	330,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	847 Orang	4,290,039,232	4,290,021,639	4.323.674.871	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	847 Orang	4,313,084,268	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	2,996,400	2,980,770	32.696.376	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan; Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	60 Orang	1,670,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	281 Satuan Pendidikan	0	0	32.141.366	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	281 Satuan Pendidikan	336,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	281 Satuan Pendidikan	12,373,050,000	11,051,460,000	11.051.460.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD		Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan PAUD di Kota Denpasar	281 Satuan Pendidikan	12,377,450,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK SD/MT; APK SMP/MTs	103.5 %; 93 %	3,465,887,900	3,229,368,781	3.229.368.744							103.5 %; 93 %	3,482,114,690				
1	01	02	2.04	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	8 Paket	157,410,000	120,893,744	120.893.707	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Non Formal Kota Denpasar	8 Paket	95,876,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	0	18,127,929	18.127.929			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Non Formal Kota Denpasar	2 Paket	22,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	344 Peserta Didik	52,707,900	49,647,108	49.647.108	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Non Formal Kota Denpasar	344 Peserta Didik	57,978,690	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	3,255,770,000	3,040,700,000	3.040.700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Non Formal Kota Denpasar	14 Satuan Pendidikan	3,306,260,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang telah merevisi Kurikulum K13	100%	84,923,100	73,858,599	73.858.599							92,307,580					
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Satuan Pendidikan Dasar	17 %	32,825,300	24,788,288	24.788.288							17 %	35,000,000				
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	80 Orang	32,825,300	24,788,288	24.788.288	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Pendidik di Satuan Pendidikan Dasar Kota Denpasar	80 Orang	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)dan Pendidikan Non Formal	25 %	52,097,800	49,070,311	49.070.311							25 %	57,307,580				
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	52,097,800	49,070,311	49.070.311	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Pendidik PAUD dan Pendidik Sekolah Non Formal Kota Denpasar	2 Dokumen	57,307,580	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase legalitas penyelenggaraan pendidikan	84%	82,021,000	80,482,854	80.482.854							90,223,100					
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal	84 %	82,021,000	80,482,854	80.482.854							84 %	90,223,100				
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	96 Dokumen	82,021,000	80,482,854	80.482.854	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Lembaga PAUD dan Non Formal Kota Denpasar	96 Dokumen	90,223,100	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA			25,683,613,900	25,780,784,843	29.601.183.279							30,398,263,990					
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam event nasional	81%	25,244,400	24,235,420	160.281.856							47,892,240					
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda Dalam Pengembangan Kepeloporan dan Kewirausahaan Tingkat Kabupaten/Kota	83 %	0	0	0						83 %	20,123,400					
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	10 Orang	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rutin	Pemuda Kota Denpasar	10 Orang	20,123,400	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelikutsertaan Pemuda Dalam Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	83 %	25,244,400	24,235,420	160.281.856						83 %	27,768,840					
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	25,244,400	24,235,420	160.281.856	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Organisasi Pemuda Kota Denpasar	1 Dokumen	27,768,840	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	Persentase partisipasi atlet di tingkat nasional	92%	24,596,196,000	24,694,375,933	28.378.727.923							28,903,904,750					
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota	93 %	840,333,300	834,675,436	834.675.436						93 %	924,366,630					
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2292 Unit	840,333,300	834,675,436	834.675.436	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Satuan Pendidikan, dan Siswa Kota Denpasar	2292 Unit	924,366,630	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perolehan Juara Dalam Event Kejaraan Tingkat Kabupaten/Kota	2 Peringkat	8,008,059,700	8,111,897,487	11.796.249.487							12,231,735,120					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	8,008,059,700	8,111,897,487	11.796.249.487	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin		Atlet Pelajar Kota Denpasar	5 Dokumen	12,231,735,120	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	93 %	15,747,803,000	15,747,803,000	15.747.803.000						93 %	15,747,803,000					
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	15,747,803,000	15,747,803,000	15.747.803.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin		KONI dan Organisasi Olahraga Kota Denpasar	1 Organisasi	15,747,803,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kepramukaan	80%	1,062,173,500	1,062,173,500	1.062.173.500							1,446,467,000					
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Tingkat Kota Denpasar	87 %	1,062,173,500	1,062,173,500	1.062.173.500						87 %	1,446,467,000					
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1,062,173,500	1,062,173,500	1.062.173.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin		Organisasi Kepramukaan di Kota Denpasar	1 Organisasi	1,446,467,000	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			188,700,266,407	201,480,512,826	235.883.792.239							264,802,272,415					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	88,340,608,963	91,710,168,012	147.558.078.555							137,290,862,633					
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	68,434,560,800	70,119,478,383	122.555.205.478						100 %	110,911,299,487					
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	930 Orang/bulan	68,434,560,800	70,119,478,383	122.555.205.478		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Pendapatan Dana Kapitasi IKN pada FKTP	Rutin	0		930 Orang/bulan	110,911,299,487	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	1,978,357,752	1,894,445,972	2.555.722.420						100 %	2,176,193,526					
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	761,941,926	720,865,163	1.342.143.495		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0		7 Paket	838,136,118	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	246,998,076	205,243,318	230.243.318		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0		8 Paket	271,697,883	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	899,740,000	899,740,000	914.740.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0		11 Paket	989,714,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	63,197,750	63,197,491	63.195.607		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0		7 Paket	69,517,525	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1092 Dokumen	6,480,000	5,400,000	5.400.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0		1092 Dokumen	7,128,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	16,497,705,411	18,231,003,657	19.155.435.657						100 %	22,630,386,120					
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2,328,900,000	2,328,900,000	2.688.900.000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Rutin	0		3 Laporan	2,561,790,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	14,168,805,411	15,902,103,657	16.466.535.657		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Rutin	0		6 Laporan	20,068,596,120	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	1,429,985,000	1,465,240,000	3.291.715.000						100 %	1,572,983,500					
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	155 Unit	1,229,985,000	1,265,240,000	1.427.715.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	0		155 Unit	1,352,983,500	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	200,000,000	1.864.000.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	0		1 Unit	220,000,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%	93,964,391,749	105,225,927,787	82.424.422.339							121,320,142,308					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan obat di Puskesmas; Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	95 %; 100 %	18,721,335,787	28,380,121,319	11.730.484.083						95 %; 100 %	27,121,429,365					
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	0	0	765.000.000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	3 Unit	965,000,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	61 unit	1,306,400,000	11,740,848,000	4.740.848.000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusapan-Penurunan AKI dan AKB; DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit; DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	61 unit	7,000,000,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	14,166,435,298	13,428,741,540	2.456.899.340		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD); DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	1 Paket	15,583,078,828	DINAS KESEHATAN				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif														
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		1 Paket	2,786,279,489	2,786,114,879	3.436.985.743		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD); Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOK; Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	1 Paket	3,064,907,437	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		606 paket	368,555,000	330,751,000	330.751.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	606 paket	405,410,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Paket	93,666,000	93,665,900	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya	1 Paket	103,032,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat	180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	75,029,150,962	76,632,981,685	70.481.113.473							180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	93,963,417,443	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		17051 Orang	281,706,566	281,705,950	33.150.884		Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	17051 Orang	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		16332 Orang	570,904,450	570,904,450	271.802.450		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	16332 Orang	6,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		16513 Orang	92,701,500	92,701,200	92.701.200		Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	16513 Orang	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		54424 Orang	183,112,500	183,112,213	183.112.213		Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	54424 Orang	185,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		171121 Orang	765,090,500	765,090,190	423.878.190		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	171121 Orang	423,878,190	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		51126 orang	242,541,220	2,235,472,220	2.235.472.220		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	51126 orang	436,102,942	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		62884 Orang	306,505,000	306,504,850	163.233.650		Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan			puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	62884 Orang	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		15914 Orang	153,916,000	153,916,000	153.916.000		Pajak Kendaraan Bermotor; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	15914 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1039 Orang	127,126,000	127,126,000	1.083.510.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	1039 Orang	139,838,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		1089 Orang	113,860,000	113,860,000	16.830.000		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan; Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	1089 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		27949 Orang	820,501,056	733,159,117	753.361.117	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	27949 Orang	806,475,028	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		20587 Orang	1,225,074,608	1,201,611,779	1.218.411.779		PENDAPATAN ASU DAERAH; Dana Insentif Daerah; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	20587 Orang	1,347,582,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		11 Dokumen	1,881,669,000	1,881,668,900	0		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	11 Dokumen	2,069,835,900	DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11 Dokumen	847,460,090	847,459,440	193.016.440		Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	11 Dokumen	850,000,000	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	123,952,500	123,945,000	10.792.500		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	2 Dokumen	130,000,000	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	631,112,000	631,112,000	210.220.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	6 Dokumen	650,000,000	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40 Dokumen	679,686,300	3,455,465,331	302.984.606		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	40 Dokumen	747,654,930	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen	227,455,000	213,847,750	213.847.750		Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	5 Dokumen	250,200,500	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1,708,710,000	1,708,710,000	907.861.900		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOK; Dana Insentif Daerah; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	12 Dokumen	1,879,581,000	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 orang	441,268,000	441,268,000	477.283.000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	40 orang	610,640,800	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	7 Dokumen	2,674,776,496	2,674,776,396	3.168.648.066		PENDAPATAN ASLU DAERAH; Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	7 Dokumen	4,164,185,660	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Bulan	16,131,676,184	12,011,589,351	11.947.919.424		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD); Dana Insentif Daerah; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan; Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	12 Bulan	17,744,843,802	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen	42,850,686,200	42,850,685,900	42.850.685.900		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD); Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	6 Dokumen	47,135,754,820	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	120,515,000	120,515,000	120.515.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	1 Dokumen	230,000,000	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11 Unit	408,600,000	187,194,610	485.939.146		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD); Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	11 Unit	449,460,000	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	2915 Keluarga	85,160,000	85,160,000	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	2915 Keluarga	145,660,000	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4732 Orang	139,081,500	1,040,331,491	1.040.331.491		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Insentif Daerah		puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	4732 Orang	152,989,650	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6667 Orang	1,193,253,292	1,593,038,547	1.920.638.547		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD); DAK Non Fisik-BOKKB-BOK; Dana Insentif Daerah; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	6667 Orang	1,312,578,621	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1,050,000	1,050,000	1.050.000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas beserta jaringannya, staf puskesmas, RS, masyarakat kota Denpasar	1 Orang	1,155,000	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes memenuhi standar mutu	100 persen	213,905,000	212,824,783	212.824.783					100 persen	235,295,500						
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasinal Mutu (INM) pelayanan kesehatan	11 unit	213,905,000	212,824,783	212.824.783		PENDAPATAN ASLU DAERAH	Pendidikan dan Kesehatan	puskesmas kota Denpasar	11 unit	235,295,500	DINAS KESEHATAN					
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100%	5,056,660,172	3,215,299,550	3.866.865.550						4,173,405,325						
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100 %	7,700,000	7,699,800	7.699.800					100 %	8,470,000						
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100 Dokumen	7,700,000	7,699,800	7.699.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pendidikan dan Kesehatan	tenaga kesehatan	100 Dokumen	8,470,000	DINAS KESEHATAN					
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	terlaksananya perencanaan kebutuhan sumber daya manusia	100 persen	5,048,960,172	3,207,599,750	3.280.460.750						3,528,359,725						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	44 Orang	4,929,360,172	3,190,000,000	3.190.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	tenaga kesehatan	44 Orang	3,509,000,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8 Dokumen	119,600,000	17,599,750	90.460.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	tenaga kesehatan	8 Dokumen	19,359,725	DINAS KESEHATAN				
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan kapasitas SDM kesehatan	100 persen	0	0	578.705.000						100 persen	636,575,500					
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	160 Orang	0	0	578.705.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	0	160 Orang	636,575,500	DINAS KESEHATAN				
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM Memenuhi syarat	55%	284,462,841	274,975,500	824.037.500							937,862,249					
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) memiliki ijin	100 persen	13,310,000	13,310,000	124.760.000						100 persen	137,236,000					
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	36 Sarana	13,310,000	13,310,000	124.760.000		DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	apotek, toko obat, umot	36 Sarana	137,236,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Industri pangan bersertifikat produksi	40 persen	47,110,841	42,775,000	263.895.095						40 persen	290,284,604					
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	200 Dokumen	47,110,841	42,775,000	263.895.095	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	industri rumah tangga pangan	200 Dokumen	290,284,604	DINAS KESEHATAN				
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persentase Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat	55 persen	3,540,000	3,540,000	3.540.000						55 persen	10,000,000					
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3 Dokumen	3,540,000	3,540,000	3.540.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Pendidikan dan Kesehatan	pengelola TPM	3 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada tempat pengelolaan makanan jajanan	500 lokasi	113,350,000	113,350,000	113.350.000						500 lokasi	150,000,000					
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	113,350,000	113,350,000	113.350.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan dan Kesehatan	pengelola majkan	1 Dokumen	150,000,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan dan minuman	12 sampel	107,152,000	102,000,500	318.492.405						12 sampel	350,341,645					
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	63 sampel	107,152,000	102,000,500	318.492.405	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Pendidikan dan Kesehatan	produk makanan dan minuman IRT dan IRT	63 sampel	350,341,645	DINAS KESEHATAN				
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%	1,054,142,682	1,054,141,977	1.210.388.295							1,080,000,000					
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase penyaudu aktif; persentase RT ber PHBS	80 persen; 80 persen	921,881,682	921,881,320	734.419.638						80 persen; 80 persen	950,000,000					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Dokumen	921,881,682	921,881,320	734.419.638		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan; DAK Non Fisik - BOKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat kota Denpasar	24 Dokumen	950,000,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan remaja	100 persen	132,261,000	132,260,657	475.968.657						100 persen	130,000,000					
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11 Dokumen	132,261,000	132,260,657	475.968.657		Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan; DAK Non Fisik-BOKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	petugas puskesmas, guru, siswa (SD, SMP, SMA), kader dan masyarakat	11 Dokumen	130,000,000	DINAS KESEHATAN				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			764,612,000	764,612,000	1.875.481.604							2,003,320,356					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 100%; 100%	764,612,000	764,612,000	1.862.881.604							1,990,720,356					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes melitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat	180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	764,612,000	764,612,000	1.862.881.604				180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	1,990,720,356							
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648 Orang	0	0	56.460.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	648 Orang	56,460,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8 Orang	0	0	3.200.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	8 Orang	3,200,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5460 Orang	0	0	43.680.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	5460 Orang	43,680,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang	0	0	14.400.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	180 Orang	14,400,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2706 Orang	0	0	54.590.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	2706 Orang	54,590,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	0	0	7.680.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	48 Orang	7,680,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	33 Orang	0	0	2.640.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	33 Orang	2,640,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	78 Orang	0	0	6.240.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	78 Orang	6,240,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	0	0	23.960.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	4 Dokumen	23,960,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	0	0	17.200.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	7 Dokumen	17,200,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	0	0	235.284.080		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	6 Dokumen	235,284,080	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	0	0	29.680.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	5 Dokumen	29,680,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4 Orang	0	0	480.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	4 Orang	480,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Dokumen	0	0	85.840.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	18 Dokumen	85,840,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	764,612,000	764,612,000	1.278.387.524		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	24 Dokumen	1,406,226,276	DINAS KESEHATAN				

Perubahan RKPD Semesta Berencana tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		220 Orang	0	0	9.600.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	220 Orang	9,600,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		400 Orang	0	0	1.600.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	400 Orang	1,600,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		17 Dokumen	0	0	27.240.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	17 Dokumen	27,240,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		19 Dokumen	0	0	10.470.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	19 Dokumen	10,470,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		31 Dokumen	0	0	15.040.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	31 Dokumen	15,040,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		34 Dokumen	0	0	68.440.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	34 Dokumen	68,440,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		45 Dokumen	0	0	29.200.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	45 Dokumen	29,200,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		127 Dokumen	0	0	254.720.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	127 Dokumen	249,320,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		24 Dokumen	627,692,640	627,692,640	1.041.163.056	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangamblian; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH; DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	24 Dokumen	1,041,163,056	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		30 Laporan	0	0	2.400.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	30 Laporan	2,400,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		20 Orang	0	0	1.600.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	20 Orang	1,600,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		6 Orang	0	0	240.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga, masyarakat	6 Orang	240,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%		0	0	12.240.000						12,240,000					
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	100 %		0	0	12.240.000					100 %	12,240,000					
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		4 Dokumen	0	0	12.240.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	4 Dokumen	12,240,000	DINAS KESEHATAN				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			655,897,560	655,897,560	1.766.113.890							1,766,113,890					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PENORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%		655,897,560	655,897,560	1.752.613.890						1,752,613,890					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat		180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 99 persen; 100 persen	655,897,560	655,897,560	1.752.613.890					180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 99 persen; 100 persen	1,752,613,890					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		889 Orang	0	0	32.860.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	889 Orang	32,860,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		11.508 Orang	0	0	57.060.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	11.508 Orang	57,060,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		13788 Orang	0	0	24.600.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	13788 Orang	24,600,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS)		1190 Orang	0	0	83.060.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1190 Orang	83,060,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		12.492 Orang	0	0	47.200.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	12.492 Orang	47,200,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		40 Orang	0	0	1.600.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	40 Orang	1,600,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		1285 Orang	0	0	12.480.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1285 Orang	12,480,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		30 Orang	0	0	1.200.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	30 Orang	1,200,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		24 Dokumen	0	0	9.860.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	9,860,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		3310 Dokumen	0	0	67.400.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	3310 Dokumen	67,400,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		35 Dokumen	0	0	16.480.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	35 Dokumen	16,480,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		13 Dokumen	0	0	125.882.500	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	13 Dokumen	125,882,500	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		24 Dokumen	0	0	13.280.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	13,280,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		150 Orang	0	0	6.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	150 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		99 Dokumen	0	0	75.200.950	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	99 Dokumen	75,200,950	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		20 Paket	0	0	800.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	20 Paket	800,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		24 Dokumen	655,897,560	655,897,560	1.169.970.440	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod; Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kengin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	1,169,970,440	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)		12 Laporan	0	0	480.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	12 Laporan	480,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		238 Orang	0	0	7.200.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	238 Orang	7,200,000	DINAS KESEHATAN				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif														
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	05																	
1	02	05	01																
1	02	05	2.03																
1	02	05	2.03	01															
1																			
1	02																		
1	02	02																	
1	02	02	2.02	01															
1	02	02	2.02	05															
1	02	02	2.02	07															
1	02	02	2.02	11															
1	02	02	2.02	15															
1	02	02	2.02	17															
1	02	02	2.02	18															
1	02	02	2.02	25															

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		24 Dokumen	447,953,280	447,953,280	753.713.896	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH; DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarganya	24 Dokumen	753,713,896	DINAS KESEHATAN			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			363,508,320	363,508,320	1.051.980.550							1,051,980,550					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84.50%; 5%; 1,4; 10%; 100%		363,508,320	363,508,320	1.027.985.550						1,027,985,550					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat	180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	363,508,320	363,508,320	1.027.985.550						180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	1,027,985,550					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		373 Orang	0	0	13.050.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	373 Orang	13,050,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		198 Orang	0	0	7.920.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	198 Orang	7,920,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		505 Orang	0	0	20.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	505 Orang	20,200,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1190 Orang	0	0	36.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1190 Orang	36,600,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1768 Orang	0	0	28.220.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1768 Orang	28,220,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		135 Orang	0	0	5.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	135 Orang	5,400,000	DINAS KESEHATAN			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2023		Pagu Indikatif														
							Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	02	02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		66 Orang	0	0	2.640.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	66 Orang	2,640,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		26 Dokumen	0	0	19.860.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	26 Dokumen	19,860,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		51 Dokumen	0	0	13.040.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	51 Dokumen	13,040,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		65 Dokumen	0	0	137.970.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	65 Dokumen	137,970,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		10 Dokumen	0	0	1.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	10 Dokumen	1,200,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		63 Orang	0	0	2.520.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	63 Orang	2,520,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		83 Dokumen	0	0	75.565.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	83 Dokumen	75,565,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		24 Dokumen	363,508,320	363,508,320	653.880.550	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	PENDAPATAN ASU DAERAH; DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	653,880,550	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		3 Laporan	0	0	240.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	3 Laporan	240,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		66 Orang	0	0	2.640.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	66 Orang	2,640,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		176 Orang	0	0	7.040.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	176 Orang	7,040,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%		0	0	23.995.000							23,995,000					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	100 %	0	0	23.995.000						100 %	23.995,000					
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21 Dokumen	0	0	23.995.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	21 Dokumen	23,995,000	DINAS KESEHATAN				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			279,745,680	279,745,680	700.414.723							752,473,195					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%	279,745,680	279,745,680	687.744.723		#REF!					737,883,195					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat	180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 99 persen; 100 persen	279,745,680	279,745,680	687.744.723						180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 %; 100 persen; 99 persen; 100 persen	737,883,195					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1344 Orang	0	0	53.460.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	1344 Orang	53,460,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	228 Orang	0	0	9.120.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	228 Orang	9,120,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang	0	0	5.800.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	145 Orang	5,800,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70 Orang	0	0	2.800.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	70 Orang	2,800,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648 Orang	0	0	10.920.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	648 Orang	10,920,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	0	0	1.920.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	48 Orang	1,920,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72 Orang	0	0	2.880.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	72 Orang	2,880,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	0	0	2.000.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	50 Orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1721 Dokumen	0	0	32.815.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	1721 Dokumen	32,815,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	975 Dokumen	0	0	15.725.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	975 Dokumen	15,725,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	84 Dokumen	0	0	3.360.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	84 Dokumen	3,360,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	123 Dokumen	0	0	1.920.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	123 Dokumen	1,920,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	80 Dokumen	0	0	3.200.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	80 Dokumen	3,200,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22 Orang	0	0	1.000.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	22 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	859 Dokumen	0	0	34.360.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	859 Dokumen	34,360,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	279,745,680	279,745,680	501.384.723	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan; Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH; DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	24 Dokumen	551,523,195	DINAS KESEHATAN				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)		1 Laporan	0	40.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	1 Laporan	40,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		12 Orang	0	2.880.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	12 Orang	2,880,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		54 Orang	0	2.160.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, staf puskesmas, peserta JKN dan keluarga	54 Orang	2,160,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%	80%	0	12.670.000							12,670,000					
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja		100 %	0	12.670.000							100 %	12,670,000				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		21 Dokumen	0	12.670.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	21 Dokumen	12,670,000	DINAS KESEHATAN				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			452,926,320	452,926,320	774.752.680							774,752,680					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%		452,926,320	452,926,320	770.784.377						770,784,377					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; Pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat		180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	452,926,320	452,926,320	770.784.377					180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	770,784,377					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		756 Orang	0	9.120.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	756 Orang	9,120,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3213 Orang	0	5.040.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	3213 Orang	5,040,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2189 Orang	0	4.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	2189 Orang	4,800,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3529 Orang	0	46.420.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	3529 Orang	46,420,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		338 Orang	0	2.160.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	338 Orang	2,160,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		8 Orang	0	40.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	8 Orang	40,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		788 Orang	0	400.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	788 Orang	400,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		3 Dokumen	0	1.410.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	3 Dokumen	1,410,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dokumen	0	1.565.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1 Dokumen	1,565,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		22 Dokumen	0	10.080.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	22 Dokumen	10,080,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		10 Dokumen	0	800.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	10 Dokumen	800,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		10882 Orang	0	1.120.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	10882 Orang	1,120,000	DINAS KESEHATAN				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif														
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	15 Dokumen	0	0	12.560.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	15 Dokumen	12.560.000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	452,926,320	452,926,320	675.029,377	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH; DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	675,029,377	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	1 Laporan	0	0	80.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1 Laporan	80,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53 Orang	0	0	80.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	53 Orang	80,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	0	0	80.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1 Orang	80,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%		0	0	3.968.303					3,968,303			
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	100 %	0	0	3.968.303					100 %	3,968,303			
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	0	3.968.303	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	1 Dokumen	3,968,303	DINAS KESEHATAN		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			521,938,080	521,938,080	1.264.606.545						1,005,742,247			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%	521,938,080	521,938,080	1.252.726.545						993,862,247			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat	180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 99 persen; 100 persen	521,938,080	521,938,080	1.252.726.545					180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 99 persen; 100 persen	993,862,247			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	0	0	27.180.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	200 Orang	27,180,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0	0	6.740.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	100 Orang	6,740,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	0	0	11.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	300 Orang	11,200,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5000 Orang	0	0	6.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	5000 Orang	6,200,000	DINAS KESEHATAN		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		500 Orang	0	0	95.990.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	500 Orang	95.990,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		9 Orang	0	0	1.440.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	9 Orang	1,440,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		24 Orang	0	0	10.560.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	24 Orang	10,560,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		20 Orang	0	0	8.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	20 Orang	8,800,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen	0	0	55.299.970	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	12 Dokumen	55,299,970	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		4 Dokumen	0	0	19.695.197	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	4 Dokumen	19,695,197	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen	0	0	6.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	12 Dokumen	6,800,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		12 Dokumen	0	0	23.520.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	12 Dokumen	23,520,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen	0	0	4.440.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	12 Dokumen	4,440,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		5016 Orang	0	0	5.880.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	5016 Orang	5,880,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		60 Dokumen	0	0	94.460.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	60 Dokumen	94,460,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		24 Dokumen	521,938,080	521,938,080	866.481.378	PENDAPATAN ASLI DAERAH; DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	24 Dokumen	607,617,080	DINAS KESEHATAN				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)		11 Laporan	0	0	2.640.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	11 Laporan	2,640,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		33 Orang	0	0	3.960.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	33 Orang	3,960,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		12 Orang	0	0	1.440.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarganya, staf puskesmas	12 Orang	1,440,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	80%		0	0	11.880.000							11,880,000				
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja		100 %	0	0	11.880.000						100 %	11,880,000				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		12 Dokumen	0	0	11.880.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	12 Dokumen	11,880,000	DINAS KESEHATAN			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			491,237,840	491,237,840	1.116.145.820								1,116,145,820				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%		491,237,840	491,237,840	1.104.565.820							1,104,565,820				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat	180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	491,237,840	491,237,840	1.104.565.820						180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	1,104,565,820					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		42 Orang	0	0	6.410.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	42 Orang	6,410,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		406 Orang	0	0	16.240.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	406 Orang	16,240,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		484 Orang	0	0	19.360.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	484 Orang	19,360,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		212 Orang	0	0	8.480.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	212 Orang	8,480,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		75 Orang	0	0	3.000.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	75 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		444 Dokumen	0	0	18.720.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	444 Dokumen	18,720,000	DINAS KESEHATAN			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	532 Dokumen	0	0	21.280.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	532 Dokumen	21,280,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1709 Dokumen	0	0	49.900.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	1709 Dokumen	49,900,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	967 Dokumen	0	0	38.680.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	967 Dokumen	38,680,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2587 Dokumen	0	0	103.480.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	2587 Dokumen	103,480,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	491,237,840	491,237,840	817.575.820		PENDAPATAN ASLI DAERAH; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	817,575,820	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	0	0	1.440.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	36 Orang	1,440,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%	0	0	11.580.000							11,580,000					
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	100 %	0	0	11.580.000						100 %	11,580,000					
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	331 Dokumen	0	0	11.580.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	331 Dokumen	11,580,000	DINAS KESEHATAN				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			771,360,480	771,360,480	1.377.883.359							1,377,883,359					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%	771,360,480	771,360,480	1.361.563.359								1,361,563,359				
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100.000 penduduk; pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan Kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar; Pelayanan Kesehatan usia produktif; persentase balita gizi buruk mendapat perawatan; Persentase balita mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase KLB ditangani kurang dr 24 jam; Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar; Persentase TTU memenuhi syarat	180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 persen; 99 persen; 100 persen	771,360,480	771,360,480	1.361.563.359						180 per 100.000 pdd; 100 %; 100 %; 100 %; 100 %; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 100 %; 100 persen; 99 persen; 100 persen	1,361,563,359					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	323 Orang	0	0	34.680.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	323 Orang	34,680,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang	0	0	26.080.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	326 Orang	26,080,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	0	0	21.600.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	540 Orang	21,600,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	191 Orang	0	0	7.640.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	191 Orang	7,640,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43 Orang	0	0	36.975.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	43 Orang	36,975,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang	0	0	9.600.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	80 Orang	9,600,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang	0	0	1.800.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	15 Orang	1,800,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	49 Orang	0	0	3.920.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	49 Orang	3,920,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	274 Dokumen	0	0	10.820.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	274 Dokumen	10,820,000	DINAS KESEHATAN				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	361 Dokumen	0	0	37.615.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	361 Dokumen	37,615,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	243 Dokumen	0	0	19.440.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	243 Dokumen	19,440,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2904 Dokumen	0	0	61.950.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	2904 Dokumen	61,950,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	44 Dokumen	0	0	1.760.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	44 Dokumen	1,760,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	21 Orang	0	0	840.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	21 Orang	840,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2635 Dokumen	0	0	104.200.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	2635 Dokumen	104,200,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen	771,360,480	771,360,480	979.763.359	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja; Kota Denpasar, Denpasar Utara, Penivangan Kapuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	24 Dokumen	979,763,359	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	6 Laporan	0	0	240.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	6 Laporan	240,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22 Orang	0	0	2.640.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	masyarakat, peserta JKN dan keluarga, staf puskesmas	22 Orang	2,640,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%		0	0	16.320.000						16,320,000					
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	100 %	0	0	16.320.000						100 %	16,320,000					
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	480 Dokumen	0	0	16.320.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	480 Dokumen	16,320,000	DINAS KESEHATAN				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			158.352,913,303	159,224,432,210	144.071.460.713							181,397,380,825					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		158,352,913,303	159,224,432,210	136.603.782.107						173,929,702,219					
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	55,852,913,303	56,724,432,210	15.932.611.106						100 %	68,867,202,219					
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 orang/bulan	55,852,913,303	56,724,432,210	15.932.611.106		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin	Seluruh Pegawai RSUD Wangaya	500 orang/bulan	68,867,202,219	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya operasional BLUD RS Wangaya	84.5 %	102,500,000,000	102,500,000,000	120.671.171.001						84.5 %	105,062,500,000					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	102,500,000,000	102,500,000,000	120.671.171.001		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1 Unit Kerja	105,062,500,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEROKANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	84,50%; 56; 1,4; 10%; 100%	0	0	7.000.000.000							7,000,000,000					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan obat dan vaksindi Puskesmas; Persentase penggunaan obat rasional (POR) di puskesmas	95 %; 100 %	0	0	7.000.000.000						95 %; 100 %	7,000,000,000					
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	59 Unit	0	0	7.000.000.000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusapan-Penurunan AKI dan AKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan; Pendidikan dan Kesehatan	Nakes RS Wangaya	59 Unit	7,000,000,000	DINAS KESEHATAN				
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100%		0	0	467.678.606						467,678,606					
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pdayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM	100 %	0	0	467.678.606						100 %	467,678,606					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	90 Orang	0	0	467.678.606		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pendidikan dan Kesehatan	0	90 Orang	467,678,606	DINAS KESEHATAN				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				170,469,285,868	169,799,731,601	216.663.823.017							124,931,544,295					
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		39,323,512,244	39,302,557,331	43.013.678.447							48,630,792,000					
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	0	0							4,632,000					
1	03	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Infrastruktur dan Keamanan			0 Dokumen	1,896,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rutin			0 Dokumen	1,602,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rutin			0 Laporan	1,134,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	17,571,112,000	17,392,150,850	17.392.150.850							100 %	19,554,860,000				
1	03	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		129 Orang/bulan	17,571,112,000	17,392,150,850	17.392.150.850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin		ASN DPUPR Kota Denpasar	129 Orang/bulan	19,554,860,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0	0	0							0					
1	03	01	2.03	03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rutin			0 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0 %	0	0	0							0 %	180,000,000				
1	03	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0 Orang	0	0	0			Rutin		ASN DPUPR Kota Denpasar	0 Orang	180,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	5,799,541,354	6,026,625,569	9.187.195.569							100 %	6,506,300,000				
1	03	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	453,768,830	418,328,219	484.328.219		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin		DPUPR Kota Denpasar	4 Paket	964,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	55,278,524	53,202,950	53.202.950		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin		DPUPR Kota Denpasar	1 Paket	57,450,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	106,514,000	111,904,400	111.904.400		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin		DPUPR Kota Denpasar	1 Paket	115,150,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		8 Dokumen	56,700,000	12,960,000	12.960.000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin		DPUPR Kota Denpasar	8 Dokumen	56,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		2 Paket	5,115,280,000	5,419,430,000	8.514.000.000		Dana Insentif Daerah	Rutin		DPUPR Kota Denpasar	2 Paket	5,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12 Laporan	12,000,000	10,800,000	10.800.000		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin		DPUPR Kota Denpasar	12 Laporan	12,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah		0 %	0	0	0							0 %	5,250,000,000				
1	03	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit	0	0	0			Infrastruktur dan Keamanan		DPUPR Kota Denpasar	0 Unit	4,275,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.07	03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		0 Unit	0	0	0			Infrastruktur dan Keamanan		DPUPR Kota Denpasar	0 Unit	800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0	0			Infrastruktur dan Keamanan		DPUPR Kota Denpasar	0 Unit	175,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	14,336,628,890	14,375,560,912	14.926.112.028							100 %	15,215,000,000				
1	03	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	612,000,000	612,000,000	623.505.100		Pajak Rokok	Rutin		DPUPR Kota Denpasar	12 Laporan	615,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	13,724,628,890	13,763,560,912	14.302.606.928		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin		DPUPR Kota Denpasar	12 Laporan	14,600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik		100 %	1,616,230,000	1,508,220,000	1.508.220.000							100 %	1,920,000,000				
1	03	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		74 Unit	924,670,000	920,470,000	920.470.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin		DPUPR Kota Denpasar	74 Unit	950,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		56 Unit	285,000,000	291,500,000	291.500.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin		DPUPR Kota Denpasar	56 Unit	320,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	160,000,000	99,000,000	99.000.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	7 Unit	375,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86 Unit	246,560,000	197,250,000	197.250.000		Pajak Rokok		Rutin	DPUPR Kota Denpasar	86 Unit	275,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang sungai berfungsi normal; Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal	3,5% (2.500 M); 25,50% (14.013)	846,838,835	845,105,270	1.556.291.990							2,766,959,899					
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0							0					
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai berfungsi normal; Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 M; 0 KM	0	0	0				Rutin		0 M; 0 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal	1500 M	846,838,835	845,105,270	1.556.291.990						1500 M	2,766,959,899					
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.067 km	846,838,835	845,105,270	1.556.291.990		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	0	0.067 km	2,766,959,899	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	57,68 % (83.672 SR)	4,182,500,000	2,472,500,000	2.503.752.000							4,182,500,000					
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pipa Sambungan Rumah	94559 SR	4,182,500,000	2,472,500,000	2.503.752.000						94559 SR	4,182,500,000					
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	600 SR	4,182,500,000	2,472,500,000	2.503.752.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur dan Keamanan	masyarakat Kota Denpasar	600 SR	4,182,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana persampahan yang memadai	46,51%	0	0	370.000.000							3,419,000,000					
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			0	0	370.000.000							3,419,000,000					
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1000 Rumah Tangga	0	0	370.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Infrastruktur dan Keamanan		1000 Rumah Tangga	3,419,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,65% (11.103 SR)	2,179,500,000	939,500,000	1.104.500.000							2,179,450,000					
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah	10873 SR	2,179,500,000	939,500,000	1.104.500.000						10873 SR	2,179,450,000					
1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	200 SR	2,179,500,000	939,500,000	1.104.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	masyarakat Kota Denpasar	200 SR	2,179,450,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,22% (1.145.350)	6,083,664,210	6,018,647,680	9.752.868.000							6,589,376,241					
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			6,083,664,210	6,018,647,680	9.752.868.000							6,589,376,241					
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun; Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	2 Dokumen; 0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	2 Dokumen; 0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	510 M	1,460,000,000	1,460,000,000	1.760.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	510 M	1,460,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	753 M	4,623,664,210	4,558,647,680	7.992.868.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	753 M	5,129,376,241	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis	0,36% (1080 IMB)	12,113,454,054	18,206,453,474	18.366.409.474							13,544,248,930					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			12.113,454,054	18,206,453,474	18.366.409.474							13,544,248,930					
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG; Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG; Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG; Meningkatnya Bangunan Gedung yg memenuhi Standar Teknis; Persentase Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis; Persentase Pelayanan Penerbitan IMB/PBG; Persentase Pelayanan Penerbitan SLF	0.36 %; 7 Dokumen; 1080 Dokumen; 1.8 %; 0.72 %; 0.36 %; 0.002 %	734,600,000	934,599,700	938.955.700		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar	0.36 %; 7 Dokumen; 1080 Dokumen; 1.8 %; 0.72 %; 0.36 %; 0.002 %	1,028,059,670	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota; Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota; Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis; Meningkatnya Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	4 Unit; 6 Dokumen; 4 unit; 25 unit	11,172,117,799	17,065,617,699	17.221.217.699		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	4 Unit; 6 Dokumen; 4 unit; 25 unit	12,289,329,578	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bangunan Gedung Sesuai NSPM; Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun; Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun; Meningkatnya Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	40 %; 1 Dokumen; 20 %; 100 %	206,736,255	206,236,075	206.236.075		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar	40 %; 1 Dokumen; 20 %; 100 %	226,859,682	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis	16,67%	15,724,250,000	15,278,999,850	16.675.909.850							17,296,674,835					
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	5 unit	15,724,250,000	15,278,999,850	16.675.909.850							5 unit	17,296,674,835				
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota; Jumlah Kawasan Prioritas yang ditata	0 Dokumen; 2 RTBL	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	0 Dokumen; 2 RTBL	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis; Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya; Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya; Meningkatnya Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	1 Kawasan; 0 Kawasan; 1 Kawasan; 25 Kawasan	15,724,250,000	15,278,999,850	16.675.909.850		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Kawasan; 0 Kawasan; 1 Kawasan; 25 Kawasan	17,296,674,835	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	79,99 %	89,101,369,125	85,683,926,976	121.668.372.236							25,320,700,000					
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	338.84 km	89,101,369,125	85,683,926,976	121.668.372.236							338.84 km	25,320,700,000				
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan; Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	1 Dokumen; 1 Dokumen	301,700,000	301,700,000	301.700.000		Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	1 Dokumen; 1 Dokumen	301,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan; Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	5 Dokumen; 5 Dokumen	781,800,000	759,241,200	959.241.200		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	5 Dokumen; 5 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun; Terbangunnya Jalan	1.2 KM; 1.2 KM	3,791,750,000	3,791,750,000	3.791.750.000		Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	1.2 KM; 1.2 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan; Terlaksananya Rekonstruksi Jalan		3.49 Km; 3.49 Km	24,921,052,000	24,921,052,000	24.143.602.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	3.49 Km; 3.49 Km		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi; Terlaksananya Rehabilitasi Jalan		3.874 KM; 3.874 Km	18,735,880,000	18,735,880,000	23.518.017.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	3.874 KM; 3.874 Km		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala; Terpeliharanya Jalan Secara Berkala		7.611 KM; 7.611 Km	10,185,632,000	9,276,750,000	27.725.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	7.611 KM; 7.611 Km		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin; Terpeliharanya Jalan Secara Rutin		22 KM; 22 Km	5,262,855,125	5,262,854,020	7.839.586.180	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	22 KM; 22 Km		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Terbangun; Panjang Jembatan yang Dibangun		1 Buah; 0 M	0	0	0		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	1 Buah; 0 M		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik; Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian		1 Buah; 0 M	0	0	0		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	1 Buah; 0 M		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin; Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin; Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin		25 M; 25 M; 25 M	101,700,000	101,700,000	101.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	25 M; 25 M; 25 M		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	10	2.01	23	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi		10.76 KM	25,019,000,000	22,532,999,756	33.287.735.856	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar.	10.76 KM	25,019,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	11			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	15%	15%	74,522,500	72,975,520	72.975.520						78,200,000					
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring		85 %	74,522,500	72,975,520	72.975.520					85 %	78,200,000					
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1 Laporan	74,522,500	72,975,520	72.975.520	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	78,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	95,20%		839,674,900	979,065,500	1.579.065.500						923,642,390					
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				230,174,900	369,566,150	369.566.150						253,192,390					
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	.; Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		5 Dokumen Perwali RDTR; 1 Dokumen Perda RTRW	230,174,900	369,566,150	369.566.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kota Denpasar	5 Dokumen Perwali RDTR; 1 Dokumen Perda RTRW	253,192,390	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang; Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		0 Dokumen; 4 Dokumen	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	Kota Denpasar	0 Dokumen; 4 Dokumen		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaatan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu		4 Laporan	179,050,000	179,049,900	779.049.900					4 Laporan	196,955,000					
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		1 Dokumen	179,050,000	179,049,900	779.049.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Kota Denpasar	1 Dokumen	196,955,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang di Hasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		1 Dokumen	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	Kota Denpasar	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang	4.8 %	430,450,000	430,449,450	430,449,450						4.8 %	473,495,000					
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		2 Dokumen Perwali	207,800,000	207,799,850	207,799,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	2 Dokumen Perwali	228,580,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang; Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		1 Dokumen; 0 Dokumen	93,350,000	93,349,700	93,349,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen; 0 Dokumen	102,685,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen	129,300,000	129,299,900	129,299,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	142,230,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			64,943,454,459	64,594,492,984	90,687,529,259							95,215,118,228					
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		14,721,201,748	15,629,626,135	13,322,931,307						16,475,675,733					
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100 %	11,460,805,017	12,520,959,736	9,869,963,472						100 %	13,199,946,207					
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		89 Orang/bulan	11,460,805,017	12,520,959,736	9,869,963,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	ASN	89 Orang/bulan	13,199,946,207	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100 %	0	0	0	0					100 %	0					
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;		0 Orang; 10 Orang	0	0	0			Rutin	Aparatur Dinas	0 Orang; 10 Orang	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 Orang	0	0	0			Rutin	Aparatur Dinas	10 Orang	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100 %	335,512,477	330,659,699	345,629,699						100 %	289,171,326					
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10,325,773	10,055,886	10,055,886	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Aparatur Dinas	1 Paket	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	68,915,804	67,720,789	67,720,789	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Aparatur Dinas	3 Paket	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5 Paket	184,359,850	183,237,773	193,237,773	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Aparatur Dinas	5 Paket	212,561,550	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	37,592,800	18,885,000	18,885,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Aparatur Dinas	2 Paket	20,773,500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	34,318,250	50,760,251	55,730,251	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Aparatur Dinas	1 Paket	55,836,276	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0	111.500.000							122,650,000					
1	04	01	2.07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	0	0	0			Rutin		3 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	0	0	111.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		6 Unit	122,650,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100 %	2,441,101,540	2,256,246,956	2,266,078,392						100 %	2,279,234,282					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	252,420,000	252,420,000	252.420.000		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNNKB)		Rutin	Aparatur Dinas	3 Laporan	277,662,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2,188,681,540	2,003,826,956	2.013.658.392		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	Aparatur Dinas	3 Laporan	2,001,572,282	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100 %	483,782,714	521,759,744	729.759.744						100 %	584,673,918					
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	19,045,400	18,100,000	18.100.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Aparatur Dinas	26 Unit	19,910,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	38 Unit	3,872,000	3,800,000	3.800.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Aparatur Dinas	38 Unit	4,259,200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	248,365,314	297,049,744	297.049.744	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Aparatur Dinas	26 Unit	326,754,718	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	112,500,000	102,810,000	102.810.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Aparatur Dinas	74 Unit	123,750,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	100,000,000	308.000.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	Aparatur Dinas	1 Unit	110,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pemenuhan SPM perumahan	100%	160,000,000	209,888,799	269.888.799							296,877,679					
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	160,000,000	209,888,799	209.888.799						1 Laporan	230,877,679					
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	100,504,592	100.504.592		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	110,555,051	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	160,000,000	109,384,207	109.384.207		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	120,322,628	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			0	0	60.000.000							66,000,000					
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terrehabilitasi	2 Unit Rumah	0	0	60.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan		2 Unit Rumah	66,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh	0,159%	474,369,000	422,977,901	422.977.901							606,138,104					
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1 Dokumen	206,775,200	206,770,461	206.770.461						1 Dokumen	247,714,720					
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1 Dokumen	206,775,200	206,770,461	206.770.461		Pajak Air Permukaan		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	227,452,720	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	20,262,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Seguluh) Ha	Jumlah dokumen penataan perumahan dan kawasan permukiman; Persentase kawasan kumuh yang tertata	1 dokumen; 0,159 %	267,593,800	216,207,440	216.207.440						1 dokumen; 0,159 %	358,423,384					
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	0	0	0					Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	120,595,200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	159,719,800	158,854,647	158.854.647		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	174,740,112	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	107,874,000	57,352,793	57.352.793		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	63,088,072	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	94,50%	853,866,000	1,033,784,152	1.906.159.152							2,096,775,067					
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Unit	20 Unit	853,866,000	1,033,784,152	1.906.159.152						20 Unit	2,096,775,067					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	853,866,000	1,033,784,152	1.906.159.152	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	10 Unit Rumah	2,096,775,067	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	100%		48,734,017,711	47,298,215,997	74,765.572.100						75,739,651,645					
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase	100 %	48,734,017,711	47,298,215,997	74,765.572.100						100 %	75,739,651,645					
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	43 Lokasi	48,734,017,711	47,298,215,997	74,765.572.100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	43 Lokasi	75,739,651,645	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			124,250,080	324,104,775	515.427.213							566,969,934					
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	100%		6,419,880	16,917,045	16.917.045						18,608,749					
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100 %	6,419,880	16,917,045	16.917.045						100 %	18,608,749					
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	6,419,880	16,917,045	16.917.045		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	5 Dokumen	18,608,749	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	12 sertifikat		117,830,200	307,187,730	498.510.168						548,361,185					
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Sertifikat	12 Sertifikat	117,830,200	307,187,730	498.510.168						12 Sertifikat	548,361,185					
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	117,830,200	307,187,730	498.510.168		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan	548,361,185	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			14,405,759,873	14,455,247,400	0							16,066,335,861					
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang; Persentase taman yang terpelihara	35%; 100%		14,405,759,873	14,455,247,400	0						16,066,335,861					
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase	100 %	14,405,759,873	14,455,247,400	0						100 %	16,066,335,861					
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	245224 Ha	5,816,637,910	5,866,125,891	0		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	245224 Ha	6,618,301,701	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola	39 Unit	8,589,121,963	8,589,121,509	0		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	39 Unit	9,448,034,160	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			25,143,231,225	25,121,800,993	25.907.222.502							27,700,232,997					
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		21,752,229,443	21,882,180,130	22.699.022.462						22,435,504,784					
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	10,293,276,592	10,371,175,864	10.899.718.422						100 %	10,293,276,592					
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	10,293,276,592	10,371,175,864	10.899.718.422	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Rutin	0	78 Orang/bulan	10,293,276,592	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian ASN	100 %	245,880,000	166,153,350	166.153.350						100 %	531,570,375					
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket	245,880,000	166,153,350	166.153.350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Rutin	0	100 Paket	531,570,375	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	896,213,160	970,521,581	982.521.581						100 %	1,357,405,475					
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,148,417	6,140,536	6.140.536	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	1 Paket	6,148,417	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	190,374,086	190,793,152	202.793.152	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	7 Paket	224,975,401	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	528,991,477	528,497,913	528.497.913	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	0	7 Paket	721,001,729	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	52,500,000	152,250,000	152.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Rutin	0	4 Paket	273,735,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif									Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	63,551,180	38,194,680	38.194.680	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	4 Paket	76,896,928	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	54,648,000	54,645,300	54.645.300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	36 Dokumen	54,648,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	100 %	0	0	207.785.000						100 %	60,000,000					
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	0	207.785.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	5 Unit	60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8,587,179,368	8,615,265,995	8.683.780.769						100 %	7,982,733,922					
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,410,000	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Rutin	0	1 Laporan	6,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	358,240,000	358,240,000	358.240.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		Rutin	0	3 Laporan	358,240,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24,610,503	58,331,730	58.331.730	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	1 Laporan	24,610,502	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	8,199,918,865	8,198,694,265	8.267.209.039	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	6 Laporan	7,593,883,420	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100 %	1,729,680,323	1,759,063,340	1.759.063.340						100 %	2,210,518,420					
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorisan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	337,250,000	1,332,987,720	1.332.987.720	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	0	30 Unit	390,114,113	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit	1,247,045,141	280,735,620	280.735.620	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rutin	0	134 Unit	1,574,730,744	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	91,045,182	91,000,000	91.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	5 Unit	191,333,563	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	42,790,000	54,340,000	54.340.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	11 Unit	42,790,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	11,550,000	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	0	30 Unit	11,550,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase daerah rawan bencana yang dibina; Persentase pelayanan penanggulangan bencana; Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	37,21%; 100,00%; 100,00%	1,984,810,432	1,921,652,594	1.757.390.646							3,549,528,713					
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana	100 %	39,669,944	195,198,748	195.198.748						100 %	200,000,000					
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	0	102,587,002	102.587.002	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan		1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	5000 Orang	39,669,944	92,611,746	92.611.746	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan		5000 Orang	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 %	1,755,440,488	1,579,701,025	1.415.439.077						100 %	2,699,528,713					
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	0	103,709,201	103.709.201	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Infrastruktur dan Keamanan		1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,003,000,446	1,339,382,828	1.175.120.880	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan		1 Dokumen	1,457,628,713	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit	390,000,000	36,250,000	36.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan		10 Unit	471,900,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan hasil Verifikasi, Rencana rehabilitasi dan Rekonstruksi.	0 ; 2 Dokumen	34,493,400	33,767,859	33.767.859	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan		0 ; 2 Dokumen	220,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		60 Orang	73,180,092	66,591,137	66.591.137	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan		60 Orang	300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi		3 Dokumen	254,766,550	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan		3 Dokumen	250,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana		100 %	189,700,000	146,752,821	146.752.821						100 %	650,000,000				
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		1 Dokumen	139,700,000	94,236,806	94.236.806	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan		1 Dokumen	500,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		0 Orang; 100 Orang	50,000,000	52,516,015	52.516.015	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan		0 Orang; 100 Orang	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			0	0	0	0							0				
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		1 Dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Infrastruktur dan Keamanan		1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate); Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	15 menit; 100%		1,406,191,350	1,317,968,269	1,450,809,394						1,715,199,500					
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya		100 %	1,247,100,000	1,239,045,741	1,371,886,866						100 %	1,297,010,000				
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		5 Unit	1,247,100,000	1,239,045,741	1,371,886,866	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin		5 Unit	1,297,010,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran		100 %	0	0	0						100 %	158,189,500				
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian		1 Dokumen	0	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan		1 Dokumen	158,189,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		100 %	159,091,350	78,922,528	78.922.528						100 %	260,000,000				
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		100 Orang	70,346,200	0	0	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan		100 Orang	110,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		2 Desa/Kelurahan	88,745,150	78,922,528	78.922.528	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan		2 Desa/Kelurahan	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				22,260,920,772	23,208,941,757	23,760,216,561							0				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		22,062,733,454	22,950,108,419	23,497,971,239							0				
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	16,294,967,344	16,997,568,254	16.997.568.254						100 %	0				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		119 Orang/bulan	16,294,967,344	16,997,568,254	16.997.568.254	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	119 Orang/bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah		100 %	256,680,000	298,372,592	298.372.592						100 %	0				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	246 Paket	256,680,000	298,372,592	298.372.592		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	246 Paket		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	0 Orang		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	261,515,918	237,512,353	262.322.353						100 %		0				
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,063,800	3,566,270	3.566.270		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Paket		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	173,741,118	172,760,389	172.760.389		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Paket		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16,651,000	16,544,314	16.544.314		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Paket		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	30,660,000	11,365,380	11.365.380		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	3 Dokumen		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,400,000	5,400,000	3.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Laporan		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	31,000,000	27,876,000	55.086.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Laporan		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah	100 %	340,000,000	340,000,000	591.100.000						100 %		0				
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	340,000,000	340,000,000	591.100.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Unit		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	22 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	ASN Satpol PP Kota Denpasar	22 Unit		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,966,625,192	4,011,900,220	4.279.353.040						100 %		0				
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	229,800,000	211,800,000	211.800.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Laporan		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,736,825,192	3,800,100,220	4.067.553.040		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	12 Laporan		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	100 %	942,945,000	1,064,755,000	1.069.255.000						100 %		0				
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53 Unit	766,695,000	931,450,000	935.950.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	53 Unit		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara; Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit; 9 Unit	3,500,000	3,465,000	3.465.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	0 Unit; 9 Unit		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	136 Unit	122,750,000	79,840,000	79.840.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	136 Unit		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	50,000,000	50.000.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Infrastruktur dan Keamanan	ASN Satpol PP Kota Denpasar	1 Unit		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	88,11%	198,187,318	258,833,338	262.245.322								0				
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Keamanan Keindahan)	85.78 %	83,385,118	74,636,693	76.554.277						85.78 %		0				
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Kasus; 250 Kasus	78,003,600	72,389,277	72.154.277		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	0 Kasus; 250 Kasus		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen; 1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	0 Dokumen; 1 Dokumen		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	2 Orang		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	5,381,518	2,247,416	4.400.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	89.34 %	114,802,200	184,196,645	185.691.045						89.34 %		0				
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	114,802,200	184,196,645	185.691.045		Pajak Rokok; DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Laporan		0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0	0	8.366.772.995							13,162,059,320					
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		0	6.857.631.811							12,117,140,140					
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	0	2.493.772.491								0				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan		0	2.493.772.491	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin		78 Orang/bulan		0 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0	151.333.350								0				
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket		0	151.333.350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Rutin		100 Paket		0 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	0	772.986.449							997,220,988					
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0	5.884.012	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		1 Paket	6,059,500	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		0	133.766.690	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		7 Paket	187,110,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		0	440.056.888	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin		7 Paket	532,785,088	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		0	152.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Rutin		2 Paket	176,475,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		0	27.367.534	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		4 Paket	40,147,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen		0	13.661.325	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		36 Dokumen	54,644,400	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0	132.000.000								0				
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		0	132.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		9 Unit		0 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	2.408.929.796							8,813,068,152					
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		0	358.240.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		Rutin		3 Laporan	358,240,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		0	2.050.689.796	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		6 Laporan	8,454,828,152	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	898.609.725							2,306,851,000					
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		0	676.086.120	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin		30 Unit	1,750,181,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit		0	163.183.605	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Rutin		134 Unit	384,880,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		0	5.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		3 Unit	86,000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		0	54.340.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		11 Unit	85,790,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate); Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran	15 menit; 100%		0	1.509.141.124							1,044,919,180					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif														
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	05	04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			0	0	1.371.886.866					947,820,450					
1	05	04	2.01	06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	0	0	1.371.886.866	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur dan Keamanan	5 Unit	947,820,450	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	04	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			0	0	78.922.528					38,767,000					
1	05	04	2.04	02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	0	0	78.922.528	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Infrastruktur dan Keamanan	2 Desa/Kelurahan	38,767,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	05	04	2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			0	0	58.331.730					58,331,730					
1	05	04	2.05	01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	0	0	58.331.730	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Infrastruktur dan Keamanan	1 Laporan	58,331,730	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
1	06			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			13,551,225,190	14,671,039,832	15,912,282,803					14,945,746,084					
1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekreteriatian	100%	11,064,046,840	12,545,197,508	12,964,483,214					12,103,396,599					
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	6,201,901,330	6,381,763,503	6,381.763.503					100 %	6,694,559,172				
1	06	01	2.02	01 Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	6,198,901,330	6,378,763,503	6.378.763.503	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	36 Orang/bulan	6,691,259,172	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	1 Dokumen	3,300,000	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	472,595,928	472,188,423	530.412.607					100 %	580,332,887				
1	06	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,295,568	14,254,428	14.254.428	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	1 Paket	15,725,125	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	339,269,700	367,167,074	426.721.258	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	1 Paket	433,674,036	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39,478,660	38,755,161	37.425.161	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	1 Paket	43,426,526	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	48,952,000	48,951,760	48.951.760	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	1 Paket	53,847,200	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	30,600,000	3,060,000	3.060.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	4 Dokumen	33,660,000	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3,774,419,582	3,809,091,582	4.000.153.104					100 %	4,151,861,540				
1	06	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	268,800,000	268,800,000	296.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	3 Laporan	295,680,000	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,505,619,582	3,540,291,582	3.703.353.104	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	1 Laporan	3,856,181,540	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	615,130,000	1,882,154,000	2.052.154.000					100 %	676,643,000				
1	06	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	301,880,000	337,880,000	337.880.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	26 Unit	332,068,000	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	133,250,000	133,250,000	133.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	90 Unit	146,575,000	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	180,000,000	1,411,024,000	1.581.024.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	5 Unit	198,000,000	DINAS SOSIAL			
1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	880,557,350	919,394,477	1.484.599.477					1,087,273,385					
1	06	02	2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitaan Ikon Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100 %	7,393,000	7,103,850	7.103.850					100 %	8,132,300				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	24 Dokumen	7,393,000	7,103,850	7.103.850	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	24 Dokumen	8.132.300	DINAS SOSIAL				
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 %	873,164,350	912,290,627	1.477.495.627						100 %	1,079,141,085					
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	86 Orang	133,083,000	125,569,812	125.569.812	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	86 Orang	184,451,300	DINAS SOSIAL				
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	31,688,000	19,650,000	19.650.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	4 Orang	34,856,800	DINAS SOSIAL				
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	690,916,350	767,070,815	1.332.275.815	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	6 Lembaga	859,832,985	DINAS SOSIAL				
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	1,087,340,400	845,500,574	863.246.574							1,075,132,440					
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 %	184,888,000	40,198,800	40.198.800						100 %	200,134,800					
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakalan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	5,000,000	28,198,800	28.198.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Sosial dan Ketenagakerjaan; Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	40 Orang	28,988,000	DINAS SOSIAL				
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	155,588,000	12,000,000	12.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	15 Orang	171,146,800	DINAS SOSIAL				
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 %	902,452,400	805,301,774	823.047.774						100 %	874,997,640					
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	107,250,000	69,120,000	69.120.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	16 Orang	117,975,000	DINAS SOSIAL				
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	377,980,800	429,431,774	447.177.774	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	500 Orang	415,778,880	DINAS SOSIAL				
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3900 Orang	310,221,600	306,750,000	306.750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	3900 Orang	341,243,760	DINAS SOSIAL				
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	100%	367,572,800	300,012,213	539.018.478							476,820,080					
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	367,572,800	300,012,213	539.018.478						100 %	476,820,080					
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9741 Orang	61,150,000	58,900,275	24.006.540	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	9741 Orang	103,510,000	DINAS SOSIAL				
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1742 Keluarga	206,422,800	149,220,488	149.220.488	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1742 Keluarga	263,310,080	DINAS SOSIAL				
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100,000,000	91,891,450	365.791.450	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100 Orang	110,000,000	DINAS SOSIAL				
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemenuhan penanganan bencana	100%	151,707,800	60,935,060	60.935.060							203,123,580					
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	151,707,800	60,935,060	60.935.060						100 %	203,123,580					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	151,707,800	60,935,060	60.935.060	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKPS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	35 Orang	203,123,580	DINAS SOSIAL				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			10,124,181,404	10,239,938,594	11.634.186.594							10,851,451,300					
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	7,434,323,334	7,434,296,594	7.592.144.594							8,172,890,628					
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Sesuai Dengan Peraturan san Perundangan yang Berlaku	26 Orang	4,919,969,632	4,815,376,540	4.815.474.540							5,411,966,595					
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4,919,969,632	4,815,376,540	4.815.474.540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar		26 Orang/bulan	5,411,966,595	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI				
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2,514,353,702	2,618,920,054	2.776.670.054						100 %	2,760,924,033					
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan; 100 %	2,514,353,702	2,618,920,054	2.776.670.054	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rutin	0		0 Laporan; 100 %	2,760,924,033	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI				
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi; Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	88%; 91%	1,536,030,000	1,679,067,100	2.481.067.100							1,719,641,880					
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan di Sektor Jasa (Kepariwisata,Service dan Teknologi Informasi); Jumlah Tenaga Kerja yang Terkompetensi; Tersertifikasi Pencari Kerja/Tenaga Kerja	230 orang; 464 orang; 160 orang	1,504,200,000	1,647,238,600	2.449.238.600							230 orang; 464 orang; 160 orang					
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	430 Orang	1,504,200,000	1,647,238,600	2.449.238.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Rutin	Pencari Kerja di Kota Denpasar	430 Orang	1,671,061,480	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI				
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang memenuhi Syarat sebagai Lembaga Pelatihan; Jumlah LPKS yang memiliki pengetahuan dan Pemahaman Tentang Kelembagaan dan Keterlaksanaan Program LPKS; Jumlah LPKS yang mengikuti Kegiatan Kampung Kompeten Kota Denpasar	56 LPKS; 56 LPKS; 56 LPKS	31,830,000	31,828,500	31.828.500							56 LPKS; 56 LPKS; 56 LPKS	48,580,400				
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	56 Lembaga	31,830,000	31,828,500	31.828.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Sosial dan Ketenagakerjaan	LPKS di Kota Denpasar		56 Lembaga	48,580,400	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI				
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0							0					
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	0 Dokumen	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan			0 Dokumen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI				
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	36%	721,566,960	712,305,450	1.146.705.450							517,933,717					
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku berita pasar kerja; Jumlah buku petunjuk penggunaan BKOL; Jumlah bursa kerja khusus yang termontoring; Jumlah Perusahaan yang termontoring; Terlaksananya ISO 9001:2015 dan ISO 270001	300 buku; 30 buku; 30 BKK; 50 perusahaan; 1 Sertifikat ISO	230,557,140	230,538,750	465.688.750							300 buku; 30 buku; 30 BKK; 50 perusahaan; 1 Sertifikat ISO	358,093,467				
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah buku berita pasar kerja; Jumlah buku petunjuk pelaksana BKK; Jumlah bursa kerja khusus yang termontoring; Jumlah perusahaan yang termontoring; Terlaksananya ISO 9001:2015 dan ISO 270001; Terlathinya Fasilitas Disabilitas	300 buku; 20 buku; 20 BKK; 30 perusahaan; 1 Sertifikat ISO; 15 Orang	182,555,670	182,537,500	327.087.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari kerja, Angkatan Kerja, Pengangguran dan Pengguna Tenaga Kerja		300 buku; 20 buku; 20 BKK; 30 perusahaan; 1 Sertifikat ISO; 15 Orang	305,291,850	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI				
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah siswa-siswi SMA/SMK yang tersuluh dan pemahaman dunia kerja serta mengetahui informasi pasar kerja melalui BKOL; Tersuluhnya pengembangan diri dalam Perluasan Kesempatan Kerja	500 Orang; 75 Orang	48,001,470	48,001,250	138.601.250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari kerja, Angkatan Kerja, Pengangguran dan Pengguna Tenaga Kerja		500 Orang; 75 Orang	52,801,617	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI				
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Buku data dan analisis angkatan kerja kota denpasar; Buku saku informasi ketenagakerjaan; Jumlah pendataan data tenagakerjaan; Leaflet informasi ketenagakerjaan	25 buku; 25 buku; 30 %; 750 buah	427,235,320	418,088,200	518.088.200							25 buku; 25 buku; 30 %; 750 buah	126,117,550				
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang	230,764,820	230,762,500	230.762.500		Dana Insentif Daerah	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari kerja, Angkatan Kerja, Pengangguran, Penyandang disabilitas dan Pengguna tenaga kerja		0 Orang	0	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI				
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja; Jumlah Perusahaan yang terfasilitasi dalam kegiatan bursa kesempatan kerja (job fair)	0 Orang; 40 Perusahaan	196,470,500	187,325,700	287.325.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari kerja, Angkatan Kerja, Pengangguran, Penyandang disabilitas dan Pengguna tenaga kerja		0 Orang; 40 Perusahaan	126,117,550	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif														
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	30,340,000	38,646,777	40.207.327		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	ASN dan Non ASN	12 Paket	42,404,725	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	84,165,000	77,047,000	131.649.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	ASN dan Non ASN	12 Laporan	84,165,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				248,000,000	110,467,925	216.081.000						299,838,000		
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		19 Unit	248,000,000	110,467,925	216.081.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin		19 Unit	299,838,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Jasa yang disediakan		100 %	2,068,518,088	2,059,491,052	2.076.461.784					100 %	2,082,808,088		
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	140,400,000	121,800,000	120.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Jasa Listrik, Jasa Layanan Umum kantor	12 Laporan	154,440,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Laporan	1,750,000	1,750,000	4.050.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Jasa Listrik, Jasa Layanan Umum kantor	2 Laporan	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1,926,368,088	1,935,941,052	1.951.811.784		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Jasa Listrik, Jasa Layanan Umum kantor	12 Laporan	1,926,368,088	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	791,540,000	777,390,000	777.390.000					100 %	905,010,000		
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	34,100,000	40,100,000	40.100.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Barang Milik Daerah	1 Unit	37,510,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		43 Unit	432,440,000	443,870,000	443.870.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Barang Milik Daerah	43 Unit	510,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		6 Unit	6,000,000	6,000,000	6.000.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Barang Milik Daerah	6 Unit	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		78 Unit	92,500,000	60,920,000	60.920.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Barang Milik Daerah	78 Unit	97,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	200,000,000	200,000,000	200.000.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Barang Milik Daerah	2 Unit	220,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	26,500,000	26,500,000	26.500.000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rutin	Barang Milik Daerah	3 Unit	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9,80%		683,290,000	682,389,050	1.264.676.460						898,491,000		
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point. Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak		4 Kecamatan	166,195,000	165,394,600	165.394.600					4 Kecamatan	598,653,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif								Target	Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		36 Perangkat Daerah	88,700,000	88,599,650	88.599.650	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	217,343,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		36 Perangkat Daerah	77,495,000	76,794,950	76.794.950	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	381,309,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Kecamatan	517,095,000	516,994,450	1.099.281.860					4 Kecamatan	299,838,000		
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		9 Dokumen	517,095,000	516,994,450	1.099.281.860	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota Partai Politik Perempuan	9 Dokumen	299,838,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	40%		312,021,064	370,662,744	370.662.744						455,925,000		
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		160 orang	94,250,000	93,449,130	93.449.130					160 orang	153,925,000		
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	94,250,000	93,449,130	93.449.130	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	153,925,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		35 orang	176,605,064	175,553,614	175.553.614					35 orang	200,000,000		
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		100 Layanan	176,605,064	175,553,614	175.553.614	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Rutin	Masyarakat	100 Layanan	200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4 kecamatan	41,166,000	101,660,000	101.660.000					4 kecamatan	102,000,000		
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		20 Orang	41,166,000	101,660,000	101.660.000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Rutin	SDM Penyedia Layanan	20 Orang	102,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/ Lurah)	6,9 %		174,562,500	174,311,490	174.311.490						113,675,375		
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4 Kecamatan	47,543,750	47,493,300	47.493.300					4 kecamatan	43,164,000		
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen	10,062,500	10,062,300	10.062.300	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	0	1 Dokumen	4,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	37,481,250	37,431,000	37.431.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	0	1 Dokumen	38,764,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota		4 Kecamatan	127,018,750	126,818,190	126.818.190					4 Kecamatan	70,511,375		
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		250 Orang	70,893,750	70,893,690	70.893.690	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	250 Orang	31,516,375	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2023		Pagu Indikatif												
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif				
2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	56,125,000	55,924,500	55.924.500		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	2 Dokumen	38,995,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data terpilah Gender dan Anak pada OPD	30%	64,155,000	63,154,640	63.154.640					92,845,500		
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Profil Statistik Gender	1 Profil	64,155,000	63,154,640	63.154.640				1 Profil	92,845,500		
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	22,355,000	21,354,640	21.354.640		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Data Gender	1 Dokumen	46,865,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	41,800,000	41,800,000	41.800.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Data Gender	1 Dokumen	45,980,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Indikator KLA	Utama	919,800,000	909,566,488	944.138.568					1,263,542,500		
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	518,125,000	506,904,743	546.969.823				4 Kecamatan	583,220,000		
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	13 Organisasi	108,700,000	106,039,780	146.104.860		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Organisasi Pemerintah, non pemerintah, Media Usaha dan Non media usaha	13 Organisasi	127,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	409,425,000	400,864,963	400.864.963		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Organisasi Pemerintah, non pemerintah, Media Usaha dan Non media usaha	7 Dokumen	455,620,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	401,675,000	402,661,745	397.168.745				4 kecamatan	680,322,500		
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	116,450,000	112,299,670	112.299.670		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Forum Anak Daerah Kota Denpasar dan Jejaring	200 Orang	128,095,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	67,100,000	61,437,550	61.437.550		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Forum Anak Daerah Kota Denpasar dan Jejaring	10 Dokumen	73,810,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47,175,000	47,074,755	47.074.755		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Forum Anak Daerah Kota Denpasar dan Jejaring	1 Dokumen	290,372,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	170,950,000	181,849,770	176.356.770		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Forum Anak Daerah Kota Denpasar dan Jejaring	1 Dokumen	188,045,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	65%	289,778,936	380,516,251	380.516.251					608,535,766		
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	56,200,000	149,500,000	149.500.000				4 kecamatan	118,020,000		
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	56,200,000	149,500,000	149.500.000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rutin	Jejaring	3 Dokumen	118,020,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	200 orang	172,438,936	171,286,386	171.286.386				200 orang	362,121,766		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2023		Pagu Indikatif												
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif				
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		100 Layanan	172,438,936	171,286,386	171.286.386	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rutin	anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Layanan	362,121,766	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		4 Kecamatan	61,140,000	59,729,865	59.729.865				4 kecamatan	128,394,000	
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	61,140,000	59,729,865	59.729.865	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Lembaga Penyedia Layanan	2 Dokumen	128,394,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6,835,627,000	7,313,351,370	7.324.347.050					9,019,505,500	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB.; Persentase kelompok kerja Bangsa Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif	2,3%; 9,3%		306,315,000	411,251,320	411.251.320					606,630,000	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		4 Kecamatan	306,315,000	411,251,320	411.251.320				4 kecamatan	606,630,000	
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		2 Laporan	0	64,200,000	64.200.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Penyediaan data	2 Laporan	65,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		1 Dokumen	241,515,000	239,651,320	239.651.320	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Penyediaan data	1 Dokumen	371,830,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		2 Laporan	0	101,400,000	101.400.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Penyediaan data	2 Laporan	105,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		2 Dokumen	64,800,000	6,000,000	6.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Penyediaan data	2 Dokumen	64,800,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed)	7,60%		2,710,572,000	2,995,396,700	2.995.396.700					4,221,635,500	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		4 Kecamatan	419,350,000	757,777,500	757.777.500				4 Kecamatan	516,993,500	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		4 Organisasi	4,375,000	84,370,500	84.370.500	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	4 Organisasi	84,375,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1 Dokumen	201,435,000	201,434,800	201.434.800	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	1 Dokumen	219,078,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		1 Dokumen	70,640,000	150,000,000	150.000.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	1 Dokumen	70,640,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		5 Laporan	62,400,000	113,900,000	113.900.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Pendidikan dan Kesehatan	Organisasi dan Mitra Kerja	5 Laporan	62,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		6 Laporan	40,500,000	88,474,700	88.474.700	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	6 Laporan	40,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2023		Pagu Indikatif								Target	Pagu Indikatif							
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan														
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		3 Laporan	40,000,000	119,597,500	119.597.500		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Organisasi dan Mitra Kerja	3 Laporan	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				384,850,000	163,253,200	163.253.200						402,695,000				
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		8 Organisasi	178,450,000	77,253,200	77.253.200		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Organisasi dan Kader Bangsa Kencana	8 Organisasi	196,295,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		516 Orang	206,400,000	86,000,000	86.000.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Organisasi dan Kader Bangsa Kencana	516 Orang	206,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				1,837,372,000	2,003,366,000	2.003.366.000						3,232,947,000				
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		1 Laporan	0	72,900,000	72.900.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Akseptor KB, Tenaga Pelayanan KB	1 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		496 Orang	1,781,272,000	1,860,328,000	1.860.328.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Akseptor KB, Tenaga Pelayanan KB	496 Orang	1,727,130,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		0 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASU DAERAH	Pendidikan dan Kesehatan	Akseptor KB, Tenaga Pelayanan KB	0 Unit	1,432,267,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		15 Laporan	24,000,000	38,100,000	38.100.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Akseptor KB, Tenaga Pelayanan KB	15 Laporan	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		40 Orang	32,100,000	32,038,000	32.038.000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rutin	Akseptor KB, Tenaga Pelayanan KB	40 Orang	33,550,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB		4 Kecamatan	69,000,000	71,000,000	71.000.000						69,000,000				
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		1 Dokumen	0	9,000,000	9.000.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Kampung KB	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		4 Kampung	69,000,000	62,000,000	62.000.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Kampung KB	4 Kampung	69,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)	15%		3,818,740,000	3,906,703,350	3.917.699.030						4,191,240,000				
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		4 Kecamatan	3,809,740,000	3,897,703,350	3.908.699.030						4,181,340,000				
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		20 Unit	0	360,000,000	360.000.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rutin	Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	20 Unit	370,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		100 Orang	16,000,000	16,003,350	26.999.030	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Orang	17,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		296 Orang	3,793,740,000	3,521,700,000	3.521.700.000	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB		Rutin	Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	296 Orang	3,793,740,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		4 Kecamatan	9,000,000	9,000,000	9.000.000					4 Kecamatan	9,900,000					
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		4 Organisasi	9,000,000	9,000,000	9.000.000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Rutin	Organisasi	4 Organisasi	9,900,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			136,812,617,968	132,035,746,527	145.167.613.523							150,493,852,465					
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		59,382,446,614	60,909,795,823	64.279.865.334						65,320,691,275					
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuanganperangkat daerah	100 %		22,744,997,498	23,039,732,983	23.820.729.247					100 %	25,019,497,248					
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		201 Orang/bulan	22,744,997,498	23,039,732,983	23.820.729.247	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	ASN	201 Orang/bulan	25,019,497,248	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah	100 %		914,326,600	906,767,755	1.464.300.625					100 %	1,005,759,260					
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	914,326,600	906,767,755	1.464.300.625	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Tenaga kebersihan	1 Paket	1,005,759,260	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %		972,089,340	724,582,459	1.167.699.919					100 %	1,069,298,274					
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		879,811,740	631,912,789	940.758.620	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN	1 Paket	967,792,914	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		18,403,300	18,285,196	21.322.546	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN	1 Paket	20,243,630	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		53,674,300	53,610,474	46.896.753	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN	1 Paket	59,041,730	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		20,200,000	20,774,000	158.722.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN	1 Laporan	22,220,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		34,027,033,176	35,611,472,626	37.044.895.543					100 %	37,429,736,494					
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		334,933,000	334,929,872	359.109.442	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN dan Non ASN	1 Laporan	368,426,300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		33,692,100,176	35,276,542,754	36.685.786.101	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	ASN dan Non ASN	1 Laporan	37,061,310,194	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		724,000,000	627,240,000	782.240.000					100 %	796,400,000					
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit		24,900,000	24,840,000	24.840.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Kendaraan dinas dan gedung kantor	51 Unit	27,390,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	97 Unit		599,100,000	602,400,000	657.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	Kendaraan dinas dan gedung kantor	97 Unit	659,010,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	0	100.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	Kendaraan dinas dan gedung kantor	1 Unit	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	40%		72,450,663	72,450,513	239.944.144						79,695,729					
2	11	02	2.01	02	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	40 %	72,450,663	72,450,513	72.450.513						40 %	79,695,729					
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	72,450,663	72,450,513	72.450.513	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	1 Dokumen	79,695,729	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2	11	02	2.02	02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS	1 Dok	0	0	167.493.631						1 Dok	0					
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0	0	167.493.631	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kualitas air; Persentase peningkatan kualitas udara; Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	2%; 2%; 1%	376,094,681	376,074,737	506.330.531							413,704,149					
2	11	03	2.01	01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	86.36 %	376,094,681	376,074,737	454.961.307						86.36 %	413,704,149					
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	0	0	32.886.570	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	53,682,400	53,666,628	53.666.628	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	59,050,640	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	322,412,281	322,408,109	368.408.109	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	1 Dokumen	354,653,509	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2	11	03	2.02	02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya sungai bersih di kota Denpasar	45 %	0	0	51.369.224						45 %	0					
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	0	0	51.369.224	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang; Persentase taman yang terpelihara	35%; 100%	2,385,969,750	2,943,294,034	17.101.927.892							2,624,539,425					
2	11	04	2.01	01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota; Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota; Persentase pohon pemeliharaan yang ditata	1792.12 Ha; 1792.12 Ha; 41 %	2,385,969,750	2,943,294,034	17.101.927.892						1792.12 Ha; 1792.12 Ha; 41 %	2,624,539,425					
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1792.12 Ha	2,385,969,750	2,943,294,034	8.053.761.939	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	1792.12 Ha	2,624,539,425	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	255 Ha	0	0	0				Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	255 Ha	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	39 Unit	0	0	9.048.165.953	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pendapatan Bagi Hasil			Masyarakat	39 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat	100%	0	0	0							0					
2	11	05	2.02	02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase limbah B3 yang ditangani	100 %	0	0	0						100 %	0					
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	0	0	0			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					Target 2023		Pagu Indikatif														
					Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketataan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	82%		294,839,260	291,560,762	137.090.513						324,323,186					
2	11	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Pesetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar		148	294,839,260	291,560,762	137.090.513					148	324,323,186					
2	11	06	2.01	01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		200 Dokumen	139,917,560	137,094,077	32.623.828	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	200 Dokumen	153,909,316	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2	11	06	2.01	03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		70 Laporan	154,921,700	154,466,685	104.466.685	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	70 Laporan	170,413,870	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	2%		0	0	62.933.000						0					
2	11	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menerima penghargaan		5 Buah	0	0	62.933.000					5 Buah	0					
2	11	09	2.01	01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		5 Entitas	0	0	62.933.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Infrastruktur dan Keamanan	Sekolah dan masyarakat	5 Entitas	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	95%		74,300,817,000	67,442,570,658	62.839.522.109						81,730,898,700					
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah	jumlah volume sampah yang dikelola		1365718.008 m3	74,300,817,000	67,442,570,658	62.839.522.109						1365718.008 m3	81,730,898,700				
2	11	11	2.01	03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		1020 Ton	40,022,816,000	33,803,000,031	17.965.400.031	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	1020 Ton	44,025,097,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2	11	11	2.01	04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		10 Kelompok	0	0	0			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	10 Kelompok	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2	11	11	2.01	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		0 Dokumen	0	0	0			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	0 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2	11	11	2.01	06 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		0 Dokumen	0	0	0			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	0 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2	11	11	2.01	07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		413 Unit	34,278,001,000	33,639,570,627	44.874.122.078	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat	413 Unit	37,705,801,100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				19,866,632,295	14,866,524,892	25.116.248.732						26,601,036,897					
2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		13,826,751,215	14,517,377,732	14.763.439.072						15,209,426,337					
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	9,728,190,130	9,623,147,734	9.623.147.734					100 %	10,701,009,143					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023		Pagu Indikatif														
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
2	13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (UKD) yang Aktif; Jumlah Pasar Desa dengan fasilitas yang baik	27 UKD; 15 Pasar	1,861,814,600	1,821,831,528	2.731.432.304						27 UKD; 15 Pasar	2,047,996,060					
2	13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	237,545,000	172,473,684	172.473.684	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	2 Dokumen	261,299,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27 Lembaga	25,918,600	25,918,075	25.918.075	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	27 Lembaga	28,510,460	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	102,660,000	102,559,709	327.616.823	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	2 Dokumen	112,926,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	6,925,000	6,899,795	6.899.795	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	1 Laporan	7,617,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	7,805,000	7,805,000	7.805.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	0	1 Laporan	8,585,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1,480,961,000	1,506,175,265	2.190.718.927	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Rutin	0	1 Dokumen	1,629,057,100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			60,005,739,835	59,234,377,824	65.775.996.835							64,613,621,540					
2	15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	40,605,124,047	51,994,173,714	55.058.580.128							43,272,940,674					
2	15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi	7 Dokumen	0	0	0						7 Dokumen	0					
2	15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	0	0	0				Rutin	-	4 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0	0	0				Rutin	-	3 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	18,569,277,065	18,138,802,528	18.138.802.528						100 %	19,033,508,992					
2	15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/Bulan	18,569,277,065	18,138,802,528	18.138.802.528		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	-	132 Orang/Bulan	19,033,508,992	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0	0	0							0					
2	15 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0	0	0				Infrastruktur dan Keamanan		1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2,052,055,079	14,035,208,269	14.655.614.683						100 %	2,257,260,588					
2	15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	21,122,970	20,048,857	20.048.857		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	-	2 Paket	23,235,267	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1,780,990,156	13,733,225,724	14.271.426.138		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	-	7 Paket	1,959,089,172	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	56,188,788	40,776,652	40.776.652		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	-	2 Paket	61,807,667	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	112,816,165	124,571,036	124.571.036		Pendapatan Bagi Hasil		Rutin	-	2 Paket	124,097,782	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	45,000,000	45,000,000	45.000.000		Pendapatan Bagi Hasil		Rutin	-	2 Dokumen	49,500,000	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	35,937,000	71,586,000	153.792.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	-	66 Laporan	39,530,700	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	40 %	0	0	0						40 %	0					
2	15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	0	0				Rutin	-	5 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif													
			Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif					
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	19,235,600,000	18,939,120,000	21.339.120.000				100 %	21,159,160,000			
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	52 Laporan	19,235,600,000	18,939,120,000	21.339.120.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	-	52 Laporan	21,159,160,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85 %	748,191,903	881,042,917	925.042.917					85 %	823,011,094		
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit	553,429,703	563,632,917	581.632.917		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	-	106 Unit	608,772,674	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	144,982,200	110,410,000	110.410.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	-	116 Unit	159,480,420	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49,780,000	207,000,000	233.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	-	1 Unit	54,758,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33%	19,005,995,088	6,836,263,138	10.078.733.735					20,906,594,596			
2	15	02	2.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Perengkapan Jalan Kabupaten / Kota	60 %	7,018,582,169	3,227,279,716	4.627.869.011					60 %	7,720,440,386		
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	65 Unit	0	0	260.609.235		Pajak Kendaraan Bermotor	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	-	65 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	77 Unit	3,986,836,027	2,810,190,513	3.781.845.573		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	-	77 Unit	4,385,519,630	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	142 Unit	3,031,746,142	417,089,203	585.414.203		Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	-	142 Unit	3,334,920,756	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Utilitas Terminal Penumpang Tipe C	62 %	904,573,138	421,023,215	718.643.715					62 %	995,030,451		
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	292,222,099	367,213,106	632.713.106		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	1 Unit	321,444,309	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	612,351,039	53,810,109	85.930.609		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	4 Unit	673,586,142	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji	57 %	2,507,816,190	1,280,478,027	1.675.018.829					57 %	2,758,597,809		
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	464,216,500	335,163,202	667.663.202		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	3 Unit	510,638,150	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30000 Dokumen	687,500,000	675,410,250	729.392.350		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	30000 Dokumen	756,250,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	39 Unit	1,356,099,690	269,904,575	277.963.277		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	39 Unit	1,491,709,659	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Manajemen Rekayasa yang Efektif dan Efisien untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota (Tingkat kinerja Pelayanan Jalan)	50 %	3,011,172,205	610,512,201	1.017.832.201					50 %	3,312,289,426		
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8 Laporan	79,118,050	5,949,621	255.269.621		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	8 Laporan	87,029,855	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	2,932,054,155	604,562,580	762.562.580		Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	6 Laporan	3,225,259,571	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemenuhan Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100 %	1,793,774,108	88,164,724	88.164.724					100 %	1,973,151,519		
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,753,812,758	57,622,762	57.622.762		Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	-	1 Laporan	1,929,194,034	DINAS PERHUBUNGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif														
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		1 Laporan	39,961,350	30,541,962	30.541.962	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Keamanan	-	1 Laporan	43,957,085	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Penumpang yang Menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota		33 %	3,770,077,278	1,208,805,255	1.951.205.255					33 %	4,147,085,006					
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		14 Unit	3,585,673,068	933,187,653	1.535.587.653	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	14 Unit	3,944,240,375	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		4 Laporan	184,404,210	275,617,602	415.617.602	Pajak Kendaraan Bermotor; Pendapatan Bagi Hasil		Infrastruktur dan Keamanan	-	4 Laporan	202,844,631	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	70%		394,620,700	403,940,972	638.682.972						434,086,270					
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan Pemenuhan Sarpras Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal		34 %	394,620,700	403,940,972	638.682.972					34 %	434,086,270					
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		1 Unit	293,475,000	124,430,959	585.215.959	Pendapatan Bagi Hasil		Rutin	-	1 Unit	322,826,000	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		2 Unit	101,145,700	279,510,013	53.467.013	Pendapatan Bagi Hasil		Rutin	-	2 Unit	111,260,270	DINAS PERHUBUNGAN				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12,458,579,700	13,427,102,434	14.208.308.249						18,691,745,500					
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%		6,204,607,462	9,185,093,460	9.866.299.275						10,018,907,338					
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar		100 %	4,504,904,502	5,076,651,918	5.076.651.918					100 %	7,853,969,539					
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar		1 Tahun	4,504,904,502	5,076,651,918	5.076.651.918	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	1 Tahun	7,853,969,539	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK				
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Terpenuhinya Administrasi Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar		12 Bulan	1,021,349,140	3,172,537,722	3.846.920.558						1,310,626,992					
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar		12 Bulan	791,879,648	2,961,814,222	3.584.200.158	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	1,046,221,367	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK				
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar		12 Bulan	102,931,692	103,096,498	111.705.398	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	113,228,527	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK				
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar		12 Bulan	79,287,800	69,427,002	69.427.002	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	96,727,098	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK				
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		12 Bulan	47,250,000	38,200,000	81.588.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	54,450,000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK				
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar		12 Bulan	678,353,820	935,903,820	942.726.799					12 Bulan	854,310,807					
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah		12 Bulan	409,823,820	448,823,820	455.646.799	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	556,466,282	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK				
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		12 Bulan	268,530,000	487,080,000	487.080.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	12 Bulan	297,844,525	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK				
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	85%		2,236,238,698	1,002,179,046	1.102.179.046						3,445,202,025					

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.



